



LAPORAN KEGIATAN

**Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Tahun 2024 bagi
Partai Bulan Bintang**

Bogor, 19 s.d. 22 Juni 2023



PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota Partai Bulan Bintang mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, Plt Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test	7
B.6.3. Acara Pembukaan	8
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	11
D. HAMBATAN	20
E. PENUTUP	20
F. LAMPIRAN	21

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Jadwal Kegiatan
3. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
4. Bahan Penjelasan Teknis
5. Panduan Penggunaan SIMULTAN
6. Panduan Moderator
7. Panduan Narasumber
8. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
9. Kumpulan Materi Narasumber
10. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
11. Surat Tugas Narasumber
12. Surat Perjanjian Kerjasama
13. Daftar Hadir Peserta
14. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
15. Penilaian Hasil Praktek Peserta
16. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
17. Daftar Pertanyaan Peserta
18. Tata Tertib Peserta
19. Alur Kegiatan *Offline*
20. Laporan Keuangan
21. Surat Tugas Peserta
22. Daftar Peserta Kegiatan Registrasi



PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI BULAN BINTANG

Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 Juni 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Partai Bulan Bintang sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemohon maupun pihak terkait pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;

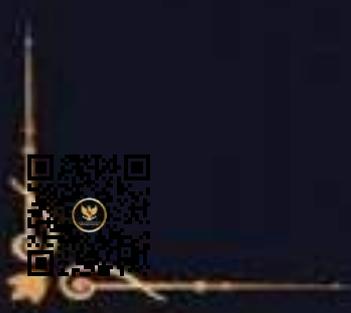


- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.





PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang”.

B.2. Waktu dan Tempat

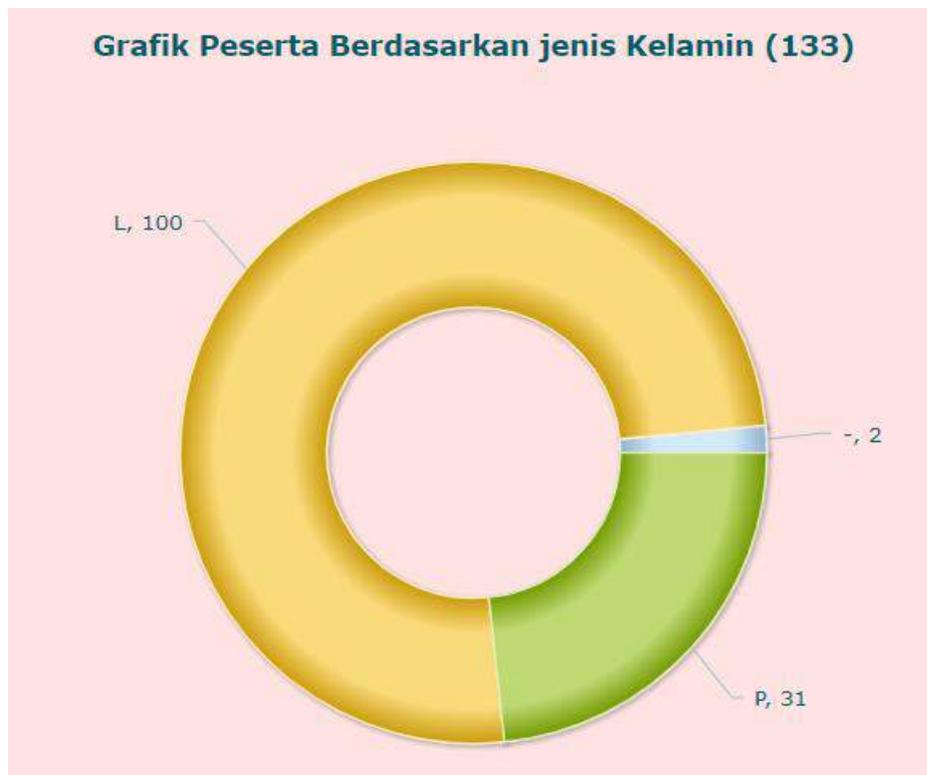
Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

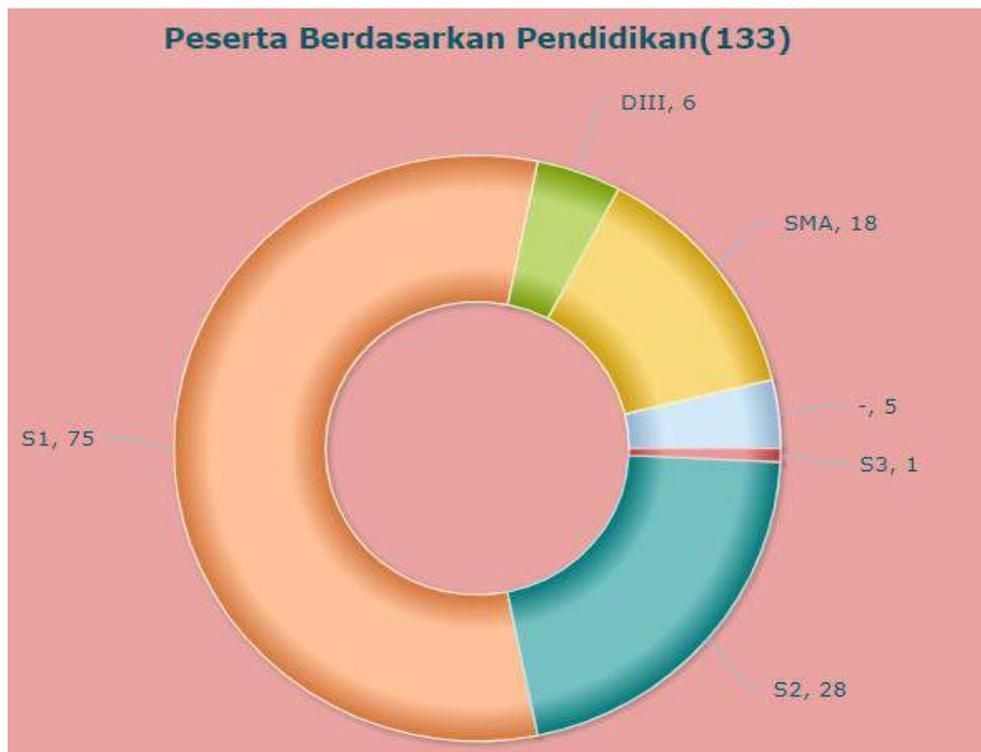
Peserta kegiatan sebanyak 133 orang pengurus dan/atau anggota Partai Bulan Bintang. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang:

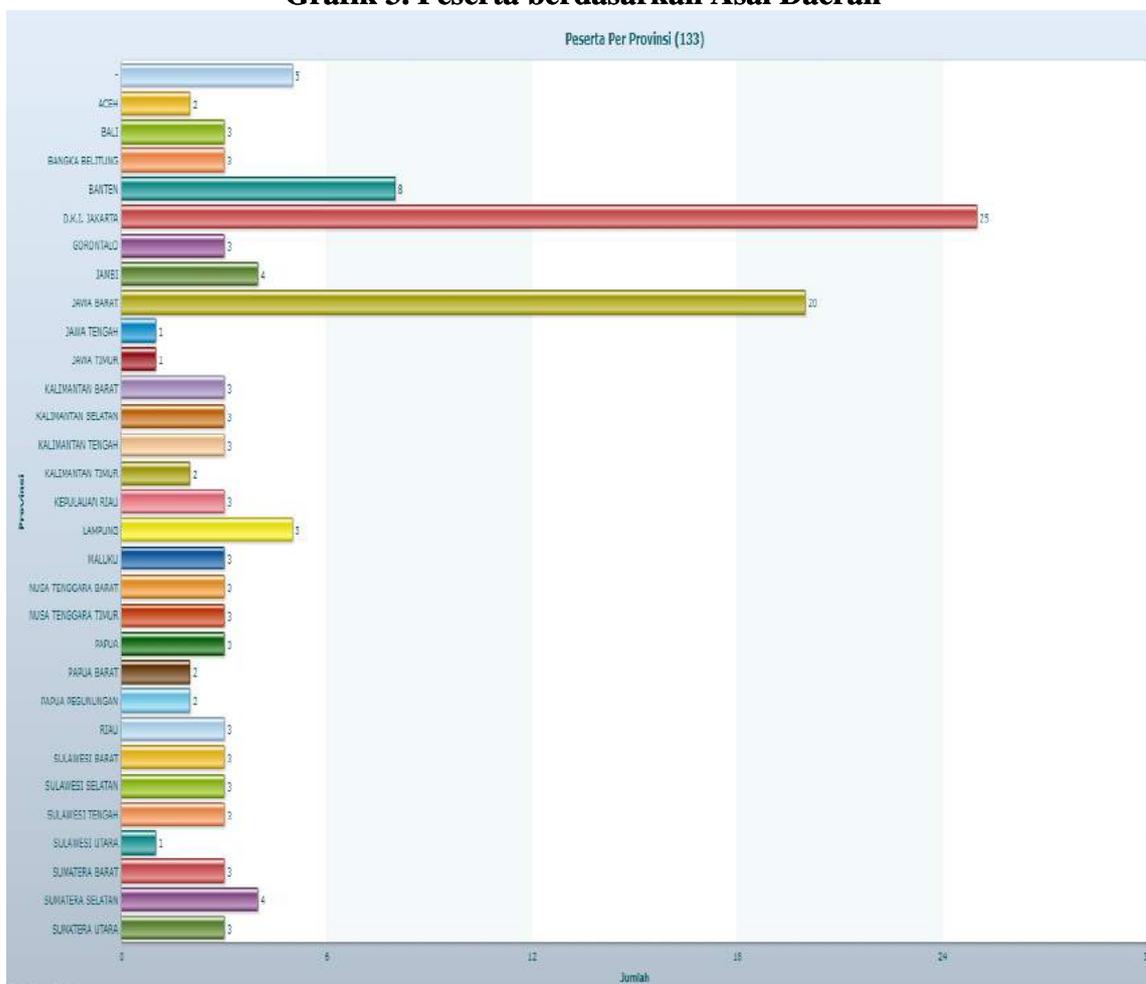
Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 19 Juni 2023 pukul 09.30 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 19 Juni 2023 pukul 14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.



B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H pada Senin, 19 Juni 2023 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Plt Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Ibu Elisabeth, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, Bapak Ir. Afriansyah Noor, M.Si. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars Mahkamah Konstitusi, Mars Partai Bulan Bintang, Laporan Plt Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, Ceramah Kunci dan Arahan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyanyikan Hymne Partai Bulan Bintang, Hymne Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 2. YM Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum
2.	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.
3.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
4.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Riska Aprian, S.T., M.Kom. 2. Agung Wisnu Laksono, A.Md



NO.	MATERI	NARASUMBER
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ria Indriyani, S.H., M.H. 2. Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H. 3. Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum. 4. Intan Permata Putri, S.H.
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yunita Rhamadani, S.H., M.H. 2. Dr. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H. 3. Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H. 4. Alboin Pasaribu, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya,



menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Kamis, 22 Juni 2023 oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.





HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 6,28 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 95 menunjukkan nilai sebesar 1,66105. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **1,23**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,59 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,59 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,62 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,62 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,60 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.



C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,60 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,59 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3,63 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,72 yang tergolong kategori Baik.**

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,66 yang tergolong kategori Baik.**

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. **Nilai persepsi atas layanan**



keuangan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,91 yang tergolong kategori Sangat Baik.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,68 dengan kategori Baik**. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,64 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,51	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,64	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,61	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,59	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,63	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,59	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,56	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
		2. Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	
	Moderator yang paling menarik	1. Ardiansyah Salim 2. Angga Putri Gardina	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,59	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,61	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,62	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,62	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,60	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,63	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,63	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,62	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,60	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,64	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,56	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,60	Baik
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,56	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,62	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,59	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,65	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,61	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,63	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,72	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,72	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,72	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,65	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,66	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan	3,66	Baik
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	3,91	Sangat Baik
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,68	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,64	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PPHU bagi Partai Bulan Bintang. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,23 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 2,46. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,64 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,64+2,46)/2 = 3,05$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,05**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta



setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**

- a) Waktu pembelajaran mohon ditambah agar peserta senior dapat memahami materi dan narasumber mampu menjawab semua pertanyaan peserta;
- b) Panitia dapat lebih informatif;
- c) Waktu praktik dapat ditambah;
- d) *Ice breaking* jangan hanya pantun;
- e) Instruktur senam mengecewakan karena tidak paham dengan gerakannya sendiri dan tidak kompak;
- f) Moderator hendaknya dapat menarik perhatian peserta mengikuti materi agar tidak jenuh;
- g) Narasumber jangan terlalu cepat menjelaskan materi;
- h) Interaksi atau dialog antara narasumber dengan peserta dapat diperbanyak;
- i) Dapat ditingkatkan lagi terkait efisiensi waktu;
- j) Sertifikat dapat diterima dalam bentuk fisik;
- k) Bimtek dapat dilakukan setiap tahun;
- l) Website Sempel-Test harap diberikan keterangan “sebagai web uji coba”.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**

- a) Disiapkan TV di dalam kamar;
- b) Di setiap meja disiapkan konektor listrik;
- c) Selimut kurang tebal sehingga dingin;
- d) Peserta dapat diberikan uang saku;
- e) Ditambah lagi tempat untuk berolahraga;
- f) Kualitas WiFi dapat ditambah terutama di dalam kamar;
- g) Kebersihan kamar mandi di dalam kamar dapat ditingkatkan;
- h) Colokan listrik di dalam kamar perlu diletakkan di tempat yang mudah dijangkau;
- i) Konsumsi pagi hari sebaiknya menu makanan ringan seperti bubur kacang hijau;
- j) Menu konsumsi dapat lebih bervariasi;



- k) Rasa makanan dapat ditingkatkan;
- l) AC di aula dapat ditingkatkan;
- m) Air minum hangat atau air jahe bisa selalu disediakan;
- n) Tempat sholat di dalam kamar sangat sempit;
- o) Obat-obatan yang tersedia dapat lebih lengkap.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 119 orang dari 133 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi
NIP. 19640415 198502 1 001

Bogor, 22 Agustus 2023

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, Plt Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. dan YM Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 oleh Bapak Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.



Materi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Materi Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



Peserta melakukan senam pagi.

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI BULAN BINTANG

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 Juni 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Bulan Bintang

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 19 Juni 2023	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Bulan Bintang 5. Laporan Plt Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 6. Sambutan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Partai Bulan Bintang 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa 	YM Ketua MK Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Plt. Kapusdik	Aula Grha Konstitusi 3

	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 20 Juni 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7

Rabu, 21 Juni 2023	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3

Kamis, 22 Juni 2023	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Ketua Bidang Rekrutmen dan Pembinaan Anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang 3. Sambutan Penutupan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Ketua Bidang Rekrutmen dan Pembinaan Anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik MK	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI BULAN BINTANG

Bogor, 19 s.d. 22 Juni 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota Partai Bulan Bintang yang terdiri dari pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Juni 2023

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Elisabeth



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	10
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	14
8. Akomodasi	14
9. Konsumsi	14
10. Pembiayaan	14
11. Biaya Transportasi	15
12. Lain-lain	16
13. Kontak	16
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	17
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	27
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	29
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	29
2. Sarana dan Prasarana.....	31
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	34

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



- Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
 - Kepala Biro Kepegawaian MA
 - Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
 - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir :
 - Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
 - Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
 - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
 - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
 - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
 - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
 - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah
IAIN Syarif Hidayatullah
- S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
- S2 – Universitas Tarumanegara
- S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
- S2 – Universitas Sumatera Utara
- S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : 9 Juni 1969
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 19 Juni 2023	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none"> Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pembacaan Teks Pancasila Mars Mahkamah Konstitusi Mars Partai Bulan Bintang Laporan Sekretaris Jenderal MK Sambutan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi Hymne Mahkamah Konstitusi Pembacaan Doa

	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
Selasa, 20 Juni 2023	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
KETIGA		
Rabu, 21 Juni 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Sarapan
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
KEEMPAT		
Kamis, 22 Juni 2023	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>

	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa
--	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Bulan Bintang, yang terdiri dari:

- a. 36 orang Pengurus Dewan Pimpinan Pusat; dan
- b. 114 orang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 	120 menit
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK 	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak 	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindakanlanjut Pasca Putusan	
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (<i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i>)	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon; g. Permohonan Pemohon; h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD; i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait; j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.	120 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
 - Sandal kamar.
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Biaya Transportasi

a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transportasi peserta adalah:**

- 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
- 2) *Boarding Pass* kedatangan;
- 3) Tiket Datang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 4) Tiket Pulang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti struk bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat registrasi**.

c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. ***Boarding pass***

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up/fiktif*);
- 2) Tiket Pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Rescheduling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. **Transportasi Darat/Laut**

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/Tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.

- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian biaya transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

12. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

13. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggantian kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan

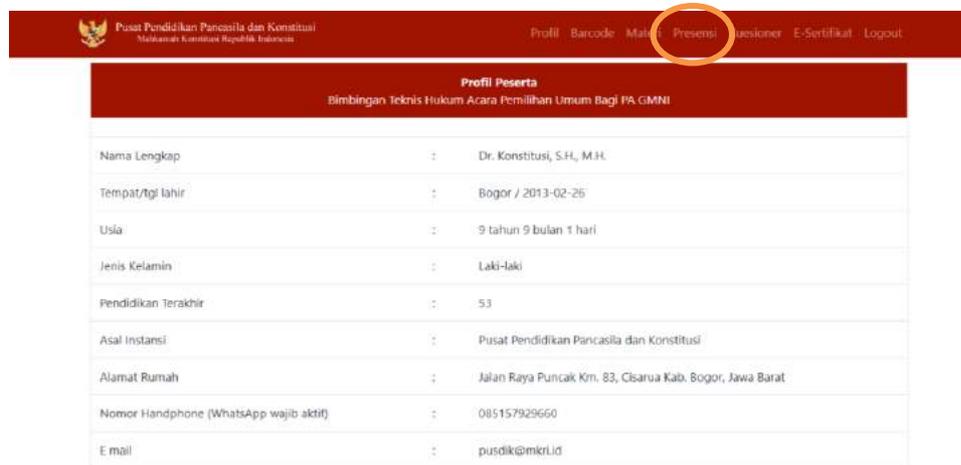
1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



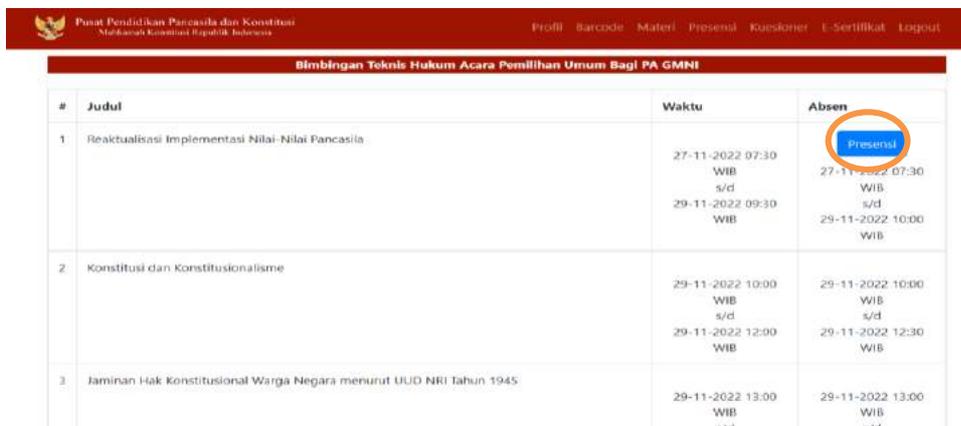
2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi **Kuesioner** E-Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Pilkada

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				: 6
Nilai Post Test				: 0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.



Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

Badan Pengawas Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

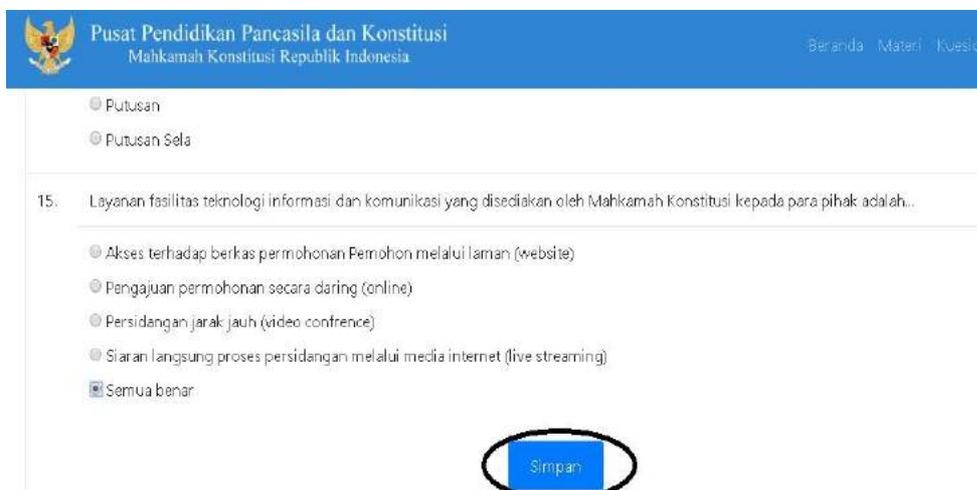
Komisi Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi

Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

Putusan

Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)

Pengajuan permohonan secara daring (online)

Persidangan jarak jauh (video conference)

Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)

Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1

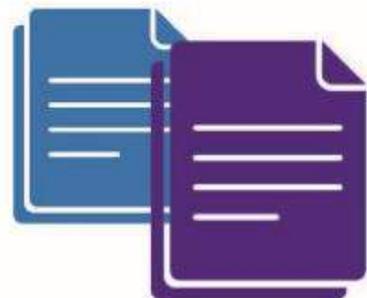
Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan,
Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Elisabeth, S.E.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: pusklat_MKRI, password: pusklatmk*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username: gk3_pusklat, password: pusklatmkri*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username: MK-TAMU, password: Konstitusi123*, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Partai Bulan
Bintang

Senin, 19 Juni 2023



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

NO
Gratifikasi



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

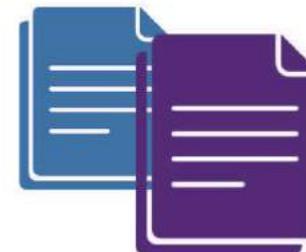
1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan,
Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



4

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



5

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Elisabeth

Plt. Kepala Pusdik
Pancasila dan
Konstitusi



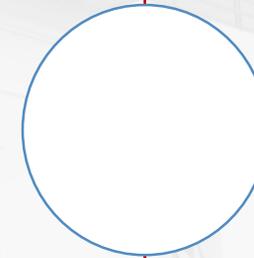
Nanang Subekti

Kabid Program
dan
Penyelenggaraan



Nanda Adityansyah

Jabatan Fungsional
(Pranata Komputer)



Kabag Umum



**Ardiansyah
Salim**

Kasubid
Program dan
Evaluasi



**Santhy
Kustrihardiani**

Kasubid
Penyelenggaraan



**Melati Kusuma
W**

Kasubag Tata
Usaha



**Bambang
Sukmadi**

Kasubag
Sarana dan
Prasarana



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik



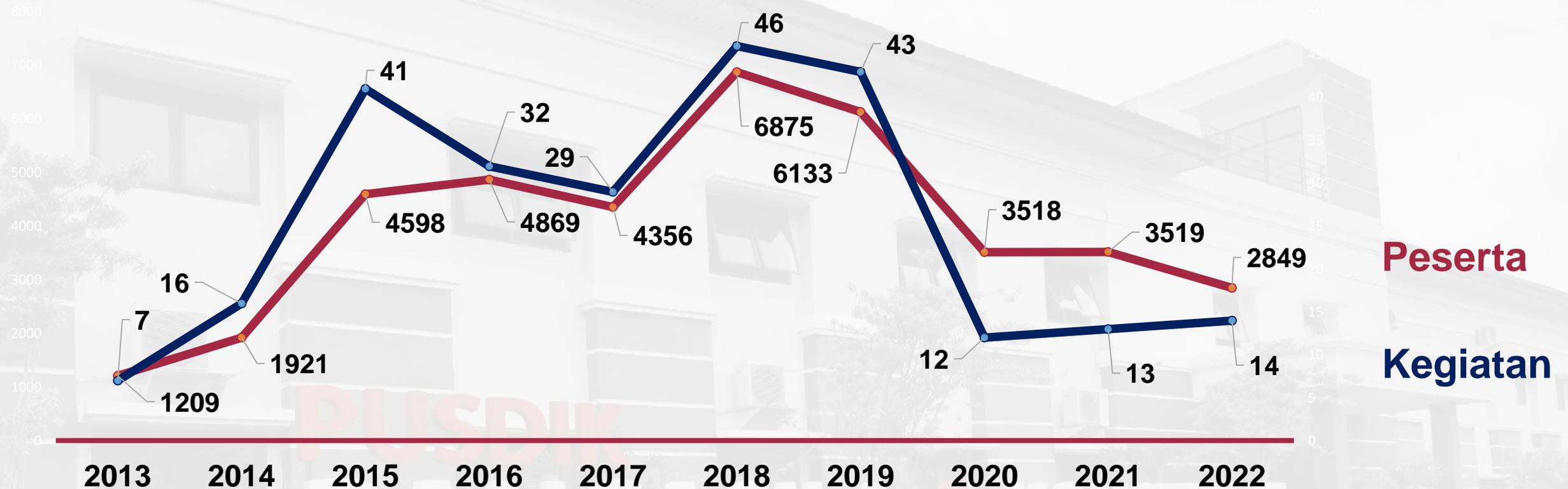
Edwin Rivano

KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
3. Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024



KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **28.727** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **36.303** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Kamis
19 s.d. 22 Juni 2023
- **Tempat** :
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 19 Juni 2023	09.30 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi dan Mars Partai Bulan Bintang 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. & Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 20 Juni 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda II – Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
	21.00 WIB	Istirahat

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 21 Juni 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Syukri Asy'ari, S.H.I., M.Hum.
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 22 Juni 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa



PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 150 orang pengurus dan/anggota Partai Bulan Bintang, terdiri dari:
 - 36 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Pusat; serta
 - 114 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.
- ✓ Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Presiden atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI



BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga peserta harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia Partai Bulan Bintang

AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

- ❖ Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin, bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.
- ❖ Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.



MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

❖ **Boarding pass**

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

❖ **Tiket Datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

❖ Transportasi Darat/Laut

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

❖ Penggantian transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*





**FASILITAS
DI PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN
KONSTITUSI**

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik
- Kantin Kejujuran
- Souvenir

Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung



KONSTITUSI

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2

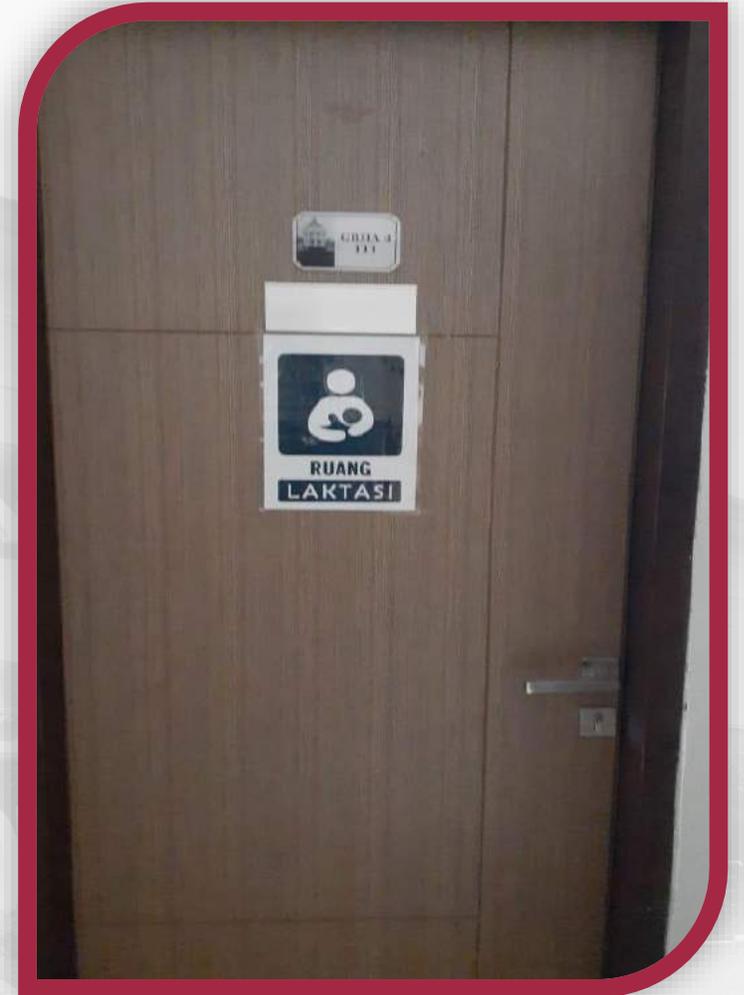
Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4

Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2



**T
E
R
I
M
A**

**K
A
S
I
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL "pusdik.mkri.id". The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a blue background with a large white text block and a circular image of the building. A green button is visible on the left side of the main content area.

PusdikMK

[Beranda](#) [Tentang Pusdik](#) [Simultan](#) [Kegiatan](#) [Alumni](#) [Zona Integritas](#) [Informasi Publik](#) [Kontak](#)

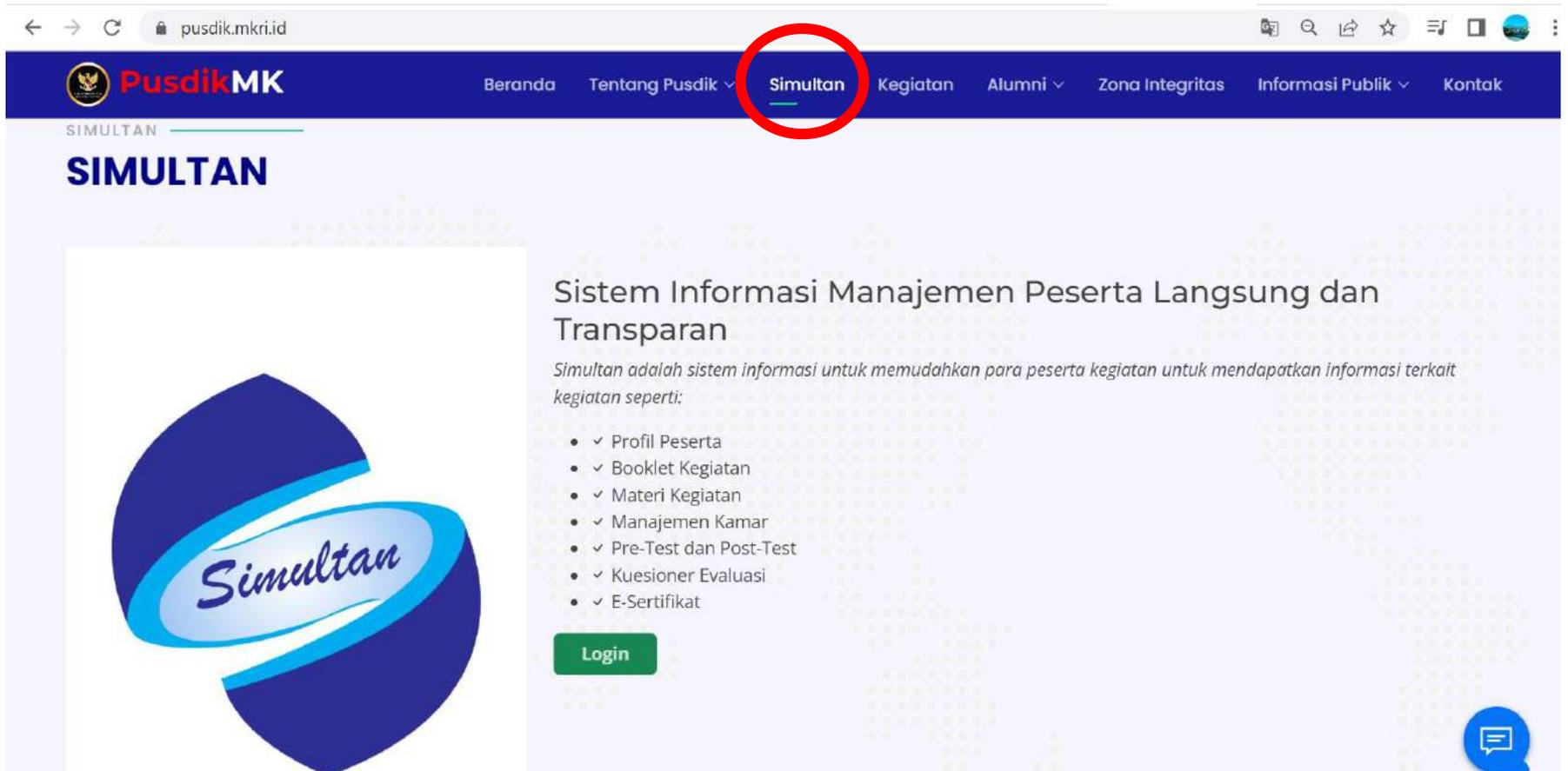
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Sejarah Singkat](#)

**PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI**

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



The screenshot shows the website interface for PusdikMK. The browser address bar displays 'pusdik.mkri.id'. The navigation menu includes 'Beranda', 'Tentang Pusdik', 'Simultan', 'Kegiatan', 'Alumni', 'Zona Integritas', 'Informasi Publik', and 'Kontak'. The 'Simultan' menu item is highlighted with a red circle. Below the navigation bar, the page title 'SIMULTAN' is displayed. The main content area features a large graphic of the 'Simultan' logo on the left and a text block on the right. The text block describes the system as a direct and transparent management information system for participants, listing various features such as participant profiles, activity booklets, materials, room management, pre-test and post-test, evaluation questionnaires, and e-certificates. A green 'Login' button is positioned below the list.

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN

Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password

← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan * :

Nama Lengkap * : Safira Putri Purnama
Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang * : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir * : Jakarta | 1985-09-26

Jenis Kelamin * : Perempuan

Pendidikan * : S2

Instansi * : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan * : Programmer Utama

Alamat * :

Desa/Kelurahan * : Desa Satriamekar

Provinsi * : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota * : KOTA JAKARTA TIMUR

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta

Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [Sertifikat](#) [Logout](#)

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

*** Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan



Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematernya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Bulan Bintang
Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 Juni 2023**

YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. & YM Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mohon dipertahankan Cukup
2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	0	52	3,25	Lobby atas Grha Konstitusi 2 kotor. Menu makan siang 19 Juni 2023, empal & cumi asin banget
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	9	54	3,38	Diminta komisi 3 meningkatkan anggaran u MK
4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	8	54	3,38	
5	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	9	51	3,19	ke depan bisa lebih baik dan berintegritas
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Berikan cara buka sistem aplikasi kepada DPP terlebih dahulu supaya peserta bisa pelajari dan saat materi peserta bisa langsung paham dan melaksanakan perintah dalam materi sudah lancar tidak ada kendala
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
8	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	8	55	3,44	Semoga bisa di tambah waktu penyampaian materinya Sangat mudah di mengerti penjelasan-penjelasan materinya
9	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	0	55	3,44	sebaiknya dalam pemaparan materi memberikan contoh perkara dan lebih memancing peserta untuk mberikan padanangan terkait perkara PHPU
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
12	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	9	57	3,56	
13	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	9	59	3,69	Pertahankan pemaparan dengan baik dan jika mungkin ditingkatkan lagi.. Terimakasih atas pemaparannya.
14	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	59	3,69	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	59	3,69	Moderator sebaiknya juga seorang fasilitator. Aktif. Bagian dari Team teaching.
17	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	59	3,69	Moderator sebaiknya juga seorang fasilitator. Aktif. Bagian dari Team teaching.
18	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	8	52	3,25	Waktu untuk interaksi peserta lebih banyak lagi. Lebih banyak memberi contoh penyelesaian kasus sengketa Pemilu tahun sebelumnya
19	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	2	4	4	8	59	3,69	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	8	57	3,56	bangun bahar ajar yang menyenangkan dalam penyajian pemateri perbanyak senyum
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	8	57	3,56	Sdh sangat baik tentu sbg manusia tdk ada yg sempurna sehingga perbaikan2 seiring waktu dan kebutuhan tetap ada ke depan
25	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	8	56	3,50	waktunya kurang, hanya 3 penanya yang bisa menyampaikan pertanyaan
26	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	9	59	3,69	kedepannya lebih ditingkatkan lagi
27	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
29	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	8	56	3,50	
30	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	agar lebih banyak diskusi dgn peserta
31	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	8	53	3,31	waktu dialog / interaksi pemateri dengan peserta diperbanyak
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	8	54	3,38	untuk tanya jawab dan interaksi dengan audience masih kurang banyak buat ice breaking dong... kalau bisa dari peserta yang mimpin... jangan terlalu kaku... sekarang jamannya segala sesuatu dibuat fun...
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	pertama kali mengikuti acara bimtek dan saya rasa sangat bagus dan sangat luar biasa di karenakan ketua MK dan Wakil MK dapat memberikan materinya dan menghadiri acara tersebut
35	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	sudah sangat baik semua -
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Cukup memuaskan, baik dari segi penyampaian maupun konten yang disampaikan. Pemateri juga komunikatif dan mampu menjawab semua pertanyaan peserta.
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	8	59	3,69	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
43	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	Penjelasan dr Pemateri sangatlah jelas dan bermanfaat Waktunya kl bisa di hari ke 2 km hr pertama cukup melelahkan.
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tidak ada saran tidak ada perbaikan
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	8	47	2,94	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	7	50	3,13	Materi materi sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan berbagi pengalaman Sudah cukup
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	62	3,88	Tingkatkan lagi supaya lebih baik Saat ini sangat baik tingkatkan lagi
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	waktu penyampaian harus ditambah sehingga bagi yang sudah tua2 lebih dapat memahami materi
51	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	9	51	3,19	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	63	3,94	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
55	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
56	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	9	56	3,50	
57	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	8	38	2,38	
58	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	8	38	2,38	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	8	51	3,19	Lebih interaktif lagi
60	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16	1,00	lebih ditingkatkan materi pada jam sore dikarenakan pada sore hari sudah tidak ada kegiatan
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Semua Sudah sangat Baik
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81	Tingkatkan agar lebih baik lagi materi kalau bisa diberikan secara fisik
74	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	9	58	3,63	Keseluruhan rangkaian acara sudah bagus dan memuaskan, hanya faktor kedisiplinan peserta belum memuaskan. Usul perbaikan : absensi elektronik ditambah tertulis disaat di ruang paripurna
75	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	8	56	3,50	Kadang dari pemberi materi narasumber bicaranya kurang greget
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tidak ada tidak ada
	3,70	3,66	3,57	3,62	3,62	3,59	3,63	3,62	3,67	3,70	3,75	3,62	3,62	3,53	3,70	3,72			3,64	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Bulan Bintang
Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 Juni 2023

Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	7	55	3,44	Sangat baik Ditambahkan lagi waktu penyampaian materinya
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	dipertahankan saya pikir cukup
3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	8	54	3,38	
4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	8	55	3,44	
5	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	8	55	3,44	
6	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	60	3,75	
7	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	9	61	3,81	
8	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	9	60	3,75	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	agar tidak terlalu monoton, perbanyak interaksi / dialog / diskusi dengan peserta
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Lebih byk membicarakan MK di berbagai negara, bkn dinamika penanganan PHPU Moderator hrsnya membisikan kpd Narsum.
11	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	8	55	3,44	
12	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	7	50	3,13	penyampaian materi lebih baik lagi sedikit senyum
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mantap sekali dipertahankan
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	9	60	3,75	Sy merasa hari ini kita kuliah hukum.. besar harapan sy MK lebih mengakar lagi kemasyarakat spy mengerti apa itu MK. Terimakasih atas penyampainnya pak Dr. Semoga bermanfaat bagi kami semua.
19	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
20	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	8	51	3,19	berikan metode pembelajaran interkatif dengan peserta pelatihan supaya lebih semangat dan cepat terserap materinya, dan tidak ngantuk peserta, secara keseluruhan penyampaian materi bagus..
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	3	3	4	3	2	3	4	4	4	4	4	1	4	2	3	2	7	50	3,13	Bahan ajar ditingkatkan, Pemaparan membosankan, peserta hanya mendengarkan pematari
24	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Pematari dalam memberikan materinya sudah sangat mumpuni tapi alangkah baiknya jika waktu untuk tanya jawabnya lebih banyak lagi sehingga peserta lebih paham lagi. Perlu di berikan contoh2 kasus agar lebih mengerti lagi.
25	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3,63	Agar narasumber berdiri dan menyapa secara langsung sambil berjalan ke peserta. Gunakan bahasa persuasif, pendek-pendek, mengajak, merayu, menghimbau dan menggapai-gapai.
26	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	9	59	3,69	Kita tetap berbenah menuju yg terbaik Semoga tetap ada solusi
29	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	0	58	3,63	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Semua sdh memenuhi kreteria dan terus ditingkatkan.
31	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	8	54	3,38	Sesi pertama sangat baik dan jelas sekali Sesi ke 2 nya materinya lumayan sanagat mengerti
32	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	0	60	3,75	ok
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tidak ada tidak ada
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	
37	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	7	53	3,31	Sudah cukup di di pelajari Cukup untuk saya pelajari dan tidak ada pebeiki
38	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	7	57	3,56	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	Tingkatkan lagi Semoga lebih baik lagi
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	agar kopi dihidangkan berikut snack
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lanjutkan Sangat berguna
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	waktu pembelajaran mhon ditambah agar kami yang tua2 lebih dapat memahami materi
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	49	3,06	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	8	61	3,81	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
50	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	8	52	3,25		
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Lebih interaktif lagi	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Lebih baik lagi Lebih komunikatif lg	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	7	49	3,06		
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
59	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	52	3,25		
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Semua Sangat Membantu	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	TINGKATKAN MATERI DALAM BENTUK FISIK	
63	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	9	56	3,50	tingkatkan kedisiplinan peserta Absensi elektronik diiringi absensi tertulis	
64	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	58	3,63	Dalam pemberian materi bicaranya terlalu monoton	
	3,66	3,59	3,52	3,55	3,50	3,56	3,59	3,63	3,66	3,69	3,61	3,53	3,53	3,48	3,59	3,58				3,58	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Bulan Bintang
Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 Juni 2023

Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Perlu sosialisasi bahan ajar untuk dipelajari dan dipahami sebelum acara bimtek berlangsung
2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	7	58	3,63	Ditambah lagi waktu untuk pematerinya Sangat mudah di pahami penyampaian materinya
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pertahankan Sudah cukup
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	9	52	3,25	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	8	54	3,38	
10	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Kita tetap berbenah sesuai kondisi dan kebutuhan Sangat di mengerti
11	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	8	56	3,50	materi / bahan ajar sebaiknya diberikan / tersedia sebelum acara.
12	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	9	57	3,56	
13	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	8	59	3,69	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantaaap ditingkat kan terus Semoga bpk sehat selalu Terimakasih atas penjelasannya bpk.. semoga ilmu yg bpk berikan bermanfaat bagi kami Kader PBB.
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	tingkatkan interaktif senyum ditambah
18	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	8	62	3,88	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Cukup interaktif, beliau menyampaikan materi secara langsung dengan turun di antara peserta. QnA bisa langsung terjadi di tangan penyampaian materi, jadi tidak ada sesi tanya jawab di akhir penyampaian materi.
20	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Pemateri sangat interaktif dan bikin tidak mengantuk Pemateri hrs lebih banyak kasih umpan soal ke peserta.
21	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	0	61	3,81	ok
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tidak ada tidak ada
23	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	58	3,63	
24	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Di awal materi, sebaiknya pemateri melakukan review terhadap materi sebelumnya yang mungkin akan ada irisan dengan materi yang akan disampaikan.
25	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	Tingkatkan terus
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
27	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	9	60	3,75	
28	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
29	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	Tingkatkan lagi Semoga bisa lebih baik lagi
30	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	8	59	3,69	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	Saran cukup Sudah puas dan tidak ada perbaikan
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	waktu pembelajaran mhon ditambah agar kami yang tua2 lebih dapat memahami materi
36	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	9	56	3,50	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Lebih interaktif lagi
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	7	50	3,13	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	9	58	3,63	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	8	63	3,94	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Tidak ada Perbaikan Semua Sudah Yang Terbaik

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	Tingkat kan terus Materi pisik
58	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	61	3,81	Penggunaan alat bantu untuk menyajikan materi membingungkan bolak balik, bolak balik tidak tersusun untuk menjelaskannya
	3,72	3,69	3,71	3,74	3,69	3,64	3,74	3,76	3,71	3,72	3,66	3,67	3,64	3,62	3,71	3,71			3,70	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Bulan Bintang
Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 Juni 2023**

Riska Aprian, S.T., M.Kom. & Agung Wisnu Laksono, A.Md.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Dipertahankan Sudah Cukup baik
2	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	7	52	3,25	
3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	49	3,06	ok
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	tidak ada tidak ada
6	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	59	3,69	
7	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13	materi menarik, hanya penyempaiannya terlalu cepat
8	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	8	53	3,31	
9	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	7	53	3,31	Pada jam mengantuk, metode praktek permohonan secara online sebaiknya langsung praktek menggunakan laptop dan dibimbing oleh asisten pemateri.
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	pemateri supaya dapat menyajikan simple dan mudah dipahami. pemateri tambah senyumnya
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Semangat terus.. tingkatkan pelayanan Terimakasih atas ilmunya..
14	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
17	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13	
18	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	8	58	3,63	Karena materi yang disampaikan bersifat praktis, agak sukut jika tidak langsung dilaksanakan. Secara keseluruhan materi sangat baik, terutama bagi bacaleg.
19	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	Tingkatkan lagi Semoga bs lebih baik lagi
20	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	8	55	3,44	Aplikasi yg dijelaskan error sehingga tidak bs praktek langsung. Masih perlu penjelasan yg lebih mendalam lagi karena sangat diperlukan apabila memasukan permohonan melalui email tidak tatap muka
21	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	perbanyak interaksi / dialog dengan peserta
22	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
23	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	8	55	3,44	
24	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	8	57	3,56	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	waktu pembelajaran mhon ditambah agar kami yang tua2 lebih dapat memahami materi
29	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	7	52	3,25	Materi masih mebingungkan bagi peserta yang belum familiar dengan sistem informasi MK. Peserta lebih banyak sebagai advokat/pengacara yang biasa beracara di pengadilan dengan e-court. Perbaikan: perlu dibuatkan sistem Sistem Informasi yang sudah familiar dengan peserta yang kebanyakan sebagai advokat yang mengacu kepada e-court
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Lebih interaktif lagi
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	7	50	3,13	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	8	62	3,88	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Tidak Saran untuk perbaikan
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tingkatkan Materi pisik
51	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	9	56	3,50	
	3,61	3,57	3,51	3,49	3,49	3,51	3,53	3,51	3,57	3,55	3,53	3,55	3,51	3,45	3,55	3,55			3,53	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Bulan Bintang
Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 Juni 2023**

Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Dipertahankan Sudah Cukup Baik
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tidak ada tidak ada
3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	61	3,81	Bisa lebih baik lagi Tingkatkan lagi
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	9	56	3,50	Pemateri memberikan materi cukup komperenshif Perlu banyak memberikan umpan pertanyaan ke peserta
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
6	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	9	59	3,69	
7	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	62	3,88	
8	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	57	3,56	
9	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	7	56	3,50	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	
13	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	Pemateri menyampaikan dengan baik, jawaban terhadap pertanyaan juga terjawab dengan baik.
14	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	52	3,25	tingkatkan komunikasi dan dialog / diskusi dengan peserta
15	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Lebih ditingkatkan lagi terutama masalah komunikasi 2 arah..
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	waktu pembelajaran mhon ditambah agar kami yang tua2 lebih dapat memahami materi
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	interaktif dengan peserta harus ditingkatkan agar lebih maksimal
22	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	8	55	3,44	
23	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	8	58	3,63	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	9	51	3,19	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	9	63	3,94	perlu dibuatkan contoh simulasi agar peserta lebih memahami
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
32	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
34	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	8	55	3,44	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tetap berbenah
43	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	8	59	3,69	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tingkatkan
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tingkatkan
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tingkatkan
	3,63	3,58	3,54	3,60	3,63	3,54	3,50	3,52	3,63	3,60	3,58	3,54	3,46	3,56	3,58	3,63			3,57	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Bulan Bintang
Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 Juni 2023**

Ria Indriyani, S.H., M.H., Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H., Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum., & Intan Permata Putri, S.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Dpertahankan Sudah Cukup Baik	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tidak ada tidak ada	
3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	8	60	3,75	Tingkatkan lagi Tingkatkan lagi	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	Pemateri sangat jitu memberikan strategi2 dalam menyusun permohonan Harus banyak memberikan praktek2 yg harus dilakukan oleh pemohon dan pihak terkait	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
6	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	7	52	3,25		
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
11	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	8	52	3,25		
12	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	Tidak ada saran atau lainnya Cukup di mengerti dan baik	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	waktu pembelajaran mhon ditambah agar kami yang tua2 lebih dapat memahami materi	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
20	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	55	3,44		
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pemateri sangat komunikatif dan membantu, beliau membimbing dari awal sampai akhir praktik. Sangat terbantu.	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06		
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
26	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	9	57	3,56		
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
30	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81		
31	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	9	55	3,44		
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13		
35	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	51	3,19		
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
42	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	8	58	3,63		
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tingkatkan	
46	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	9	57	3,56		
	3,61	3,54	3,61	3,61	3,57	3,59	3,52	3,57	3,63	3,63	3,63	3,57	3,54	3,54	3,63	3,59				3,59	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Bulan Bintang
Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 Juni 2023

Yunita Rhamadani, S.H., M.H., Dr. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H., Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H., & Alboin Pasaribu, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Dipertahankan Sudah Cukup Baik
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tidak ada tidak ada
3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	57	3,56	Semoga bisa ditingkatkan lagi Kurang interaksi narasumber ke peserta
4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	8	54	3,38	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
6	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	waktu pembelajaran mhon ditambah agar kami yang tua2 lebih dapat memahami materi
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13	Saran cukup Cukup
13	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	8	58	3,63	
14	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	9	55	3,44	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
20	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Tingkatkan dialog / diskusi disetiap forum
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Interaksi lbh sering Ok
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	materi tidak memberikan contoh permohonan dalam sengketa PHPU kombinasi yaitu suara terpecah kepada eksternal partai (parpol) dan internal partai (perorangan) dalam 1 dapil. materi tidak memberikan contoh sengketa PHPU perorangan jika ketum dan sekjen partai tidak memberikan persetujuan
28	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	59	3,69	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	7	50	3,13	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Evaluasi dijelaskan dengan sangat baik dan menyeluruh. Disampaikan poin per poin sesuai dengan jawabannya lalu di jelaskan.
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
37	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	8	55	3,44	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
44	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	8	57	3,56	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tingkatkan
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,57	3,55	3,62	3,64	3,57	3,62	3,66	3,64	3,62	3,66	3,66	3,60	3,55	3,62	3,64	3,64			3,62	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Bulan Bintang
Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 Juni 2023**

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	ok ok ok
2	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
3	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	3	2	5	2	2	3	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	60	2,86	Saya kebetulan kemarin sakit. Tidak ada informasi yang saya terima bahwa sesi kemarin tgl 21 adalah wajib. Tidak bisa saya menyalahkan peserta lain. Saran dan masukan. Selain info di kelas yg menyatakan sesi itu wajib baiknya juga di infokan melalui informasi agar sampai ke kamar jika ada peserta yg sakit. SEHINGGA TIDAK ADA YANG DIRUGIKAN km saya percaya TIDAK ADA PESERTA YANG SENGAJA TIDAK HADIR KECUALI SAKIT ATAU MEMANG SANGAT BERHALANGAN.
4	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	80	3,81	
5	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	waktu pembelajaran mhon ditambah agar kami yang tua2 lebih dapat memahami materi
6	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
7	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	4	4	11	4	3	7	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	70	3,33	Disiapkan tv di kamar tidur
8	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	74	3,52	
9	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
10	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
11	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	semoga untuk kedepannya pusediklat MK semakin baik
12	4	4	4	12	4	4	4	12	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
13	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	2	3	3	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	Lebih informatif.
14	3	4	4	11	3	3	4	10	Agung Wisnu Laksono, A.Md.	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	3	3	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	68	3,24	Dipertahankan Kalau bisa setiap meja ada konektor listrik biar gampang mencas laptop
15	3	4	3	10	4	4	4	12	Agung Wisnu Laksono, A.Md.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	3	11	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	71	3,38	Dipertahankan Kalau bisa setiap meja ada konektor cas Baik semuanya
16	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
17	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
18	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
19	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
20	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.		4	4	8	4	3	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	4	7	82	3,90	
21	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
22	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
23	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
24	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
25	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
26	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Selamat kurang tebal dingin
27	3	3	3	9	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	3	4	7	4	3	3	10	3	3	6	3	4	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	71	3,38	Tingkatkan lagi Tingkatkan lagi Tingkatkan lagi
28	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
29	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
30	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	69	3,29	jadikan pusdiklat tempat menyenangkan untuk belajar
31	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Secara menyeluruh kegiatan bimtek ini sangatlah bagus dan cuma utk praktek pembuatan permohonan dsb lebih banyak lagi waktunya. Untuk klaim transport di mohon tdk teralu di persulit km peserta 4hr meninggalkan pekerjaannya dn mengikuti bimtek ini yg seharusnya mendapatkan uang saku. Perlu ditambahkan utk kegiatan tmp olahraga spy tidak bosan
32	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
33	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adyriansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
34	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Suhardi	3	4	7	3	3	3	9	4	3	7	3	4	7	4	3	7	3	3	6	3	3	6	67	3,19	
35	3	3	3	9	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Ardiansyah Salim	4	3	7	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	73	3,48	
36	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
37	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
38	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
39	3	4	4	11	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	77	3,67	Agar lebih komunikatif dengan peserta Untuk jaringan koneksi internet agar lebi di perbaiki Waktu pelaksanaan kegiatan agar lebih di tambah agar tidak ada pemateri yang terbunu2 dan mampu menjawab semua pertanyaan peserta
40	4	4	3	11	3	4	4	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adyriansyah	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Prasarana di tingkat kan lagi khusus kebersihan kamar mandi penginapan Terimakasih sdh melayani kami dengan baik Semoga MK kedepan lebih baik lagi dalam melayani gugatan PHPU dari partai politik maupun pihak terkait
41	3	4	4	11	3	3	4	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	68	3,24	
42	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adyriansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
43	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	Colokan listrik di kamar Grha 5 238 tempatnya tidak strategis dan sulit di akses sehingga membuat peserta memerlukan upaya untuk menemukannya
44	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	
45	4	4	4	12	4	4	3	11	Syukri Asy'ari, S.H., M.Hum.	Nanda Adyriansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Konsumsi pagi hari sebaiknya menu makanan ringan seperti bubur kacang hijau, bubur ayam yang kental (jgn encer), roti, dan makanan nasi goreng/ kebuli. Ice breaking jgn hanya pantun saja, disampaikan oleh moderator sebagai selingan ketika peserta sudah mulai suntuk.
46	4	4	4	12	4	4	4	12	Agung Wisnu Laksono, A.Md.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Tidak ada Tidak ada Tidak ada

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
47	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Semua sudah sangat baik, Terimakasih Banyak Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Untuk Narasumber dan Mediator semuanya sangat menarik.
48	3	4	3	10	3	4	3	10	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	3	3	6	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	75	3,57	Makin baik ke depan
49	3	3	3	9	3	3	3	9	Agung Wisnu Laksono, A.Md.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	4	3	10	3	3	6	3	3	6	3	4	7	4	4	8	3	0	3	64	3,05	
50	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
51	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
52	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
53	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
54	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Semoga bisa ikut bimtek di mk lagi ilmunya banyak Terimakasih pusdiklat mahkama Konstitusi Republik Indonesia
55	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
56	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	jadikan pusdiklat tempat belajar yang menyenangkan
57	3	4	4	11	3	4	4	11	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	3	4	3	10	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	
58	3	3	4	10	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
59	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
60	3	3	3	9	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	4	10	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	74	3,52	Tidak ada saran dan perbaikan
61	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pelayanan terbaik untuk Para Peserta ...
62	3	3	4	10	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Untuk senam instruktumya tidak bagus dan mengecewakan sekali karena tidak paham dgn gerakan nya dan tidak kompak antara teman nya
63	4	4	4	12	4	4	4	12	Agung Wisnu Laksono, A.Md.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Tidak ada Tidak ada Tidak ada
64	4	4	4	12	4	4	4	12	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	0	4	4	4	8	79	3,76	Kedepan menurut saya perlu adanya sesi penyusunan berkas permohonan pemohon. Terimakasih.
65	4	4	4	12	4	3	4	11	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	3	3	4	10	4	3	7	3	4	7	4	3	7	4	4	8	3	4	7	77	3,67	Untuk Moderator hendaknya dapat memberi daya tarik peserta, agar peserta tidak jemu Untuk Nara Sumber hendaknya dalam membenarkan atau menerangkan materi hendaknya tidak terlalu cepat, agar dapat mudah dipahami dan dimengerti bagi peserta Bimtek Fasilitas sarana dan menu hidangan hendaknya lebih ditingkatkan lagi
66	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
67	3	4	4	11	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
68	3	3	4	10	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	76	3,62	Sangat memuaskan dan memberikan pengalaman yang baru bagi setiap peserta.
69	4	4	4	12	4	4	4	12	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
70	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Tetap berbenah
71	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	4	7	64	3,05	
72	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Untuk instruktur senam, baiknya pilih yg benar2 instruktur, biar jadi tambah semangat Itu saja

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
73	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	AC di Ballroom mohon ditingkatkan lagi Selebihnya oke semua.. termasuk penginapan
74	4	4	1	9	4	4	2	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Perbanyak petugas penyelenggara dari perempuan Perbanyak petugas penyelenggara dari perempuan Tempat hiburan disediakan, selain sarana karaoke
75	3	4	3	10	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	3	4	7	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	70	3,33	Interaksi/dialog Narsum dgn peserta diperbanyak Latihan/praktek pembuatan pemohonan dan/atau jawaban pihak terkait diperbanyak atau ditambah waktunya
76	3	3	4	10	3	4	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	3	4	7	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	75	3,57	Semog tambah maju kedepan ya
77	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	67	3,19	
78	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Saran saya Lebih di tingkatkan lagi efisiensi waktunya beserta snack nya, dan untuk sertifikat agar kedepannya bisa di terima dengan bentuk fisik bukan secara online.
79	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	3	4	7	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Kalau Bisa Pusdik MK Di Selenggarakan Tiap Tahun Untuk Sertifikat kalau Bisa Di Berikan Dalam Bentuk Fisik karean Suatu Ke Homatan Dan Kebanggaan Bagi Peserta Pusdik MK
80	3	4	3	10	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	
81	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Tingkat kan terus supaya lebih baik lagi baik dan lebih baik
82	3	4	4	11	4	4	3	11	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	67	3,19	
83	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	67	3,19	
84	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	4	3	7	4	4	8	4	4	8	72	3,43	Menunya lebih variasi lagi, seperti ikan asin / teri , balado , Air hangat slalu ada ,Klw bnyk yg pakai Minuman jaha lebih di perbanyak kama cuaca yg dingin
85	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Kita tetap berbenah
86	4	4	4	12	4	3	4	11	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	80	3,81	Mengenai jaringan internet ketika di kelas sangat bagus jaringannya, tapi ketika dikamar konstitusi 4 hilang jaringannya. mengenai konsumsi sudah bagus bervariasi, tapi ada kalanya pada menu2 tertentu tidak jelas rasanya atau adem tidak berasa garam atau manis. Mengenai kamar terlalu padat barang yang besar2 seperti lemari dan meja, sehingga ketika kita sholat dikamar tidak lesuasa, jika yg berbadan agak besar kesulitan bergerak.
87	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
88	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	kami dari berbagai daerah sangat bersyukur dan berterimakasih atas diadakan bimtek mk ini dimana ilmu terkait PPHU sangat bermanfaat bagi kami dan generasi kedepan... terimakasih yang sebesar besamya bagi pelaksana bimtek PPHU MKRI.. semoga selalu diberikan kesehatan dan umur yang barokah amin.....
89	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
90	3	4	4	11	4	3	4	11	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	3	11	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Terima kasih semua materi yang telah di berikan oleh panitia untuk persiapan hari pemilihan di tahun depan. Penyampaian materi begitu banyak dari pihak panitia tetapi semoga itu menjadi bermanfaat kami saya. Semua materi ini sangat bermanfaat bagi kami yang mengikuti kegiatan bimtek sehingga kami punya persiapan yang lebih baik dalam pemilihan tahun 2024.
91	4	4	4	12	3	3	3	9	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	0	4	74	3,52	Terimakasih banyak buat kegiatan Bimtek yang mana kami telah ikut dari tanggal 19 pembukaan sampe penutupan hari ini tanggal 22. kegiatan ini sangat membantu para kader PBB di partai politik untuk siapakan diri menghadapi pemili 2024 saran kami : semua stekolder yg menjalankan tugas Negara RI sama-sama mendapatkan ilmu dalam pendidikan politik pihak-pihak yang terkait terus berbagai materi dan narasumber terus semakin mantap kedepan
92	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
93	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
94	3	3	4	10	4	4	3	11	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	3	4	7	78	3,71	Soal2 salam praktek beracara pass MK ada simulasi agar konsep yg diajukan dapat bersesuaian dengan lisan soal yg di buatkan oleh para peseta. Waktu BIMTEK perlu ditambahkan pass akhir sesi yakni praktek langsung jika pengajuan materi SYAWAL Tidak cukup secara lisan. Terimakasih atas bimbingan teknis Dan ilmu Yang bermanfaat ini.
95	3	3	3	9	3	3	3	9	Agung Wisnu Laksono, A.Md.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
96	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	0	3	3	60	2,86	
97	3	3	4	10	4	4	3	11	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	3	4	7	78	3,71	Soal2 salam praktek beracara pass MK ada simulasi agar konsep yg diajukan dapat bersesuaian dengan lisan soal yg di buatkan oleh para peseta. Waktu BIMTEK perlu ditambahkan pass akhir sesi yakni praktek langsung jika pengajuan materi SYAWAL Tidak cukup secara lisan. Terimakasih atas bimbingan teknis Dan ilmu Yang bermanfaat ini.
98	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
99	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
100	3	3	3	9	3	3	3	9	Intan Permata Putri, S.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	65	3,10	
101	3	4	4	11	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	73	3,48	kegiatan ini agar dipertahankan ditingkatkan agar lebih memuasakan
102	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	4	7	63	3,00	Instruktur senam kurang bagus Hrsnya yg biasa jd instruktur senam
103	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
104	4	4	3	11	3	3	4	10	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	2	3	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	75	3,57	Obat2an perlu di siapkan setidak penyakit ringan seperti batuk, pilek dan demam. Km setiap kegiatan pasti ada tim kesehatan yg menyiapkan obat pertolongan pertama.
105	3	3	3	9	3	3	3	9	Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
106	4	4	4	12	4	4	4	12	Agung Wisnu Laksono, A.Md.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
107	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	4	4	3	11	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
108	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
109	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	83	3,95	Website simpel-test harap diberikan keterangan sebagai web ujicoba., entah berupa popup / lainnya Ketika sesudah regist di web simpel, berikan juga keterangan untuk periksa spam folder .. karena memang sering masuk kesitu Juga bangun trust untuk IP sender., agar tidak masuk spam Jaga jangan sampai website down Itu krusial, berpotensi merugikan calon terkait kehilangan kursinya karena ketidak tahuan adanya perkara masuk
	3,51	3,64	3,61	3,59	3,63	3,59	3,56	3,59			3,61	3,62	3,61	3,60	3,63	3,63	3,62	3,64	3,56	3,60	3,56	3,62	3,59	3,65	3,61	3,63	3,72	3,72	3,72	3,65	3,66	3,66	79,70	3,62	



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024

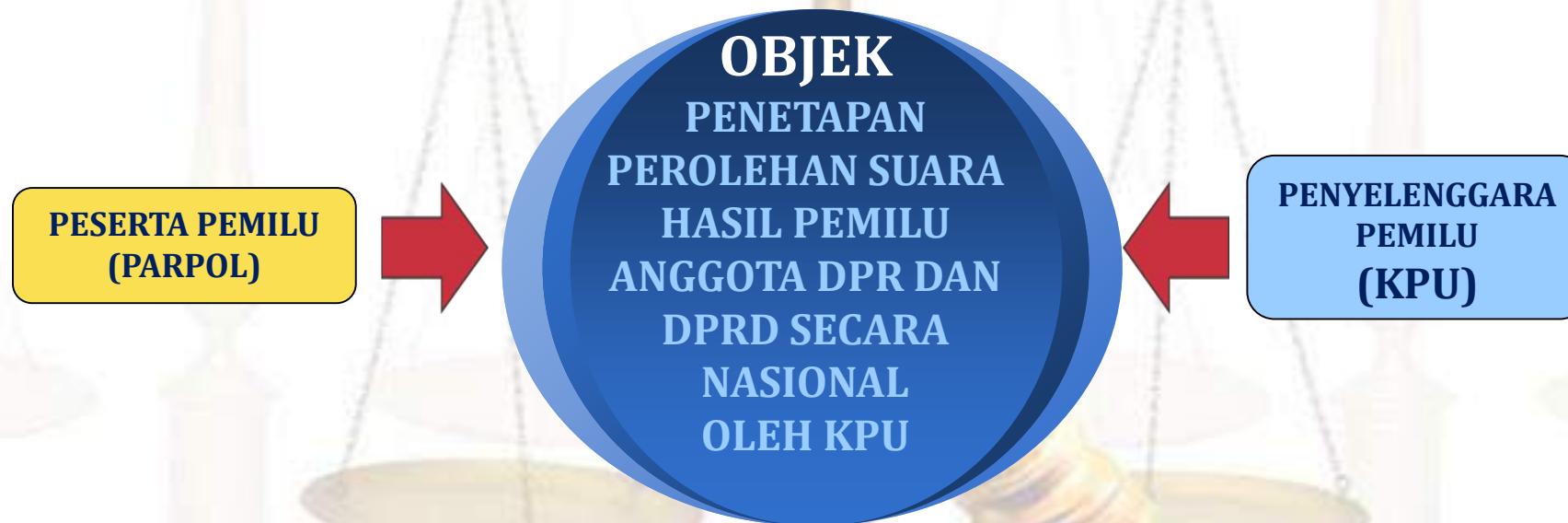
Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi

DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA atas UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD



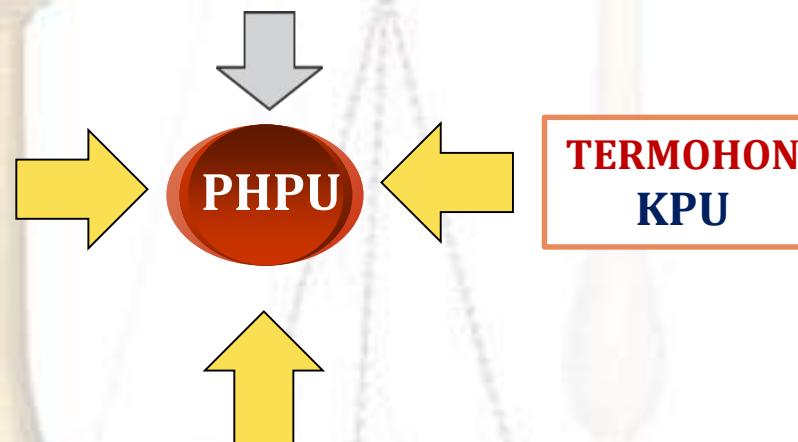
PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

PEMBERI KETERANGAN

BAWASLU



PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPR dan DPRD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**terpilihnya Pemohon
sebagai anggota
DPR dan DPRD**

PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

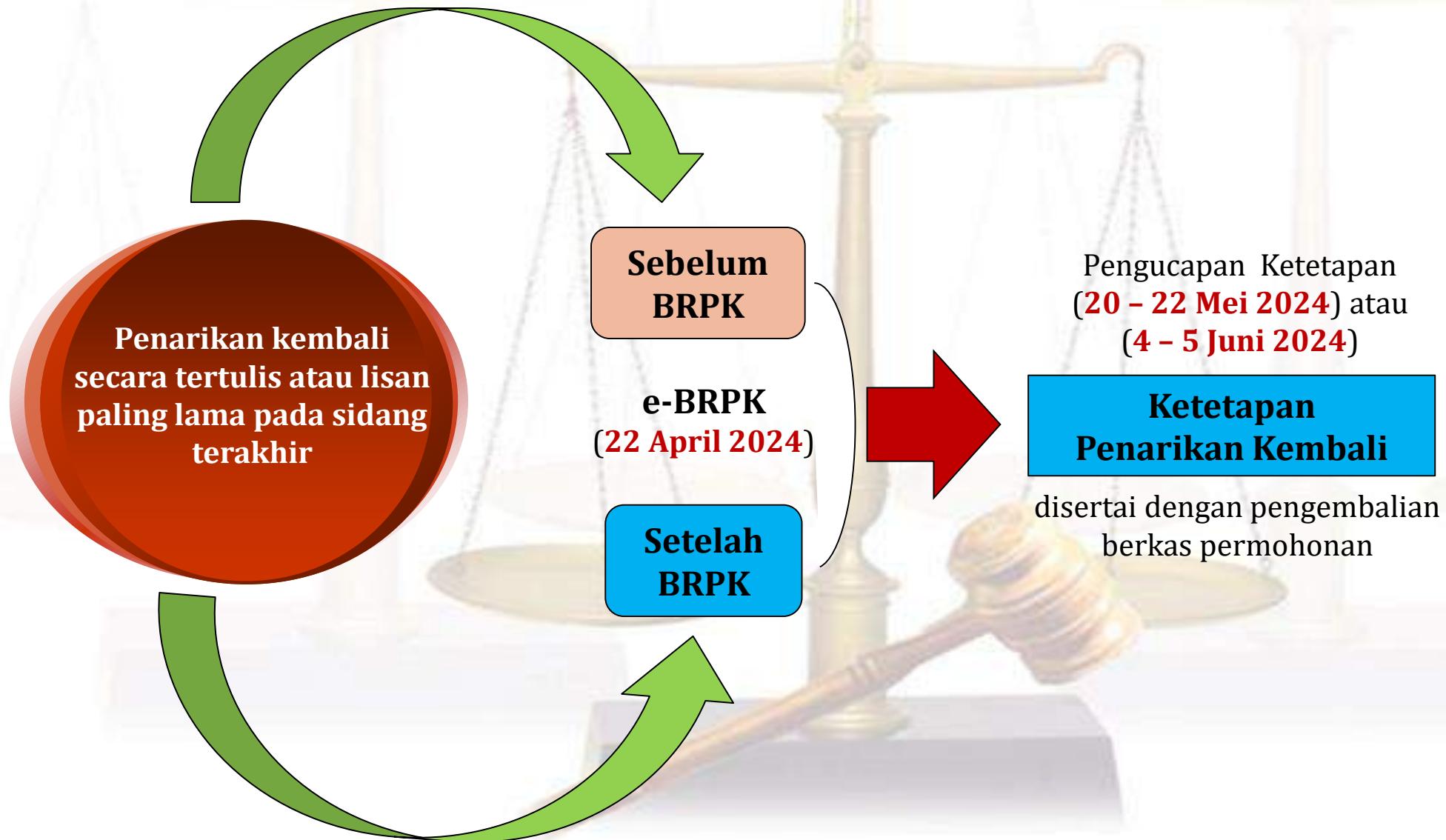
PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

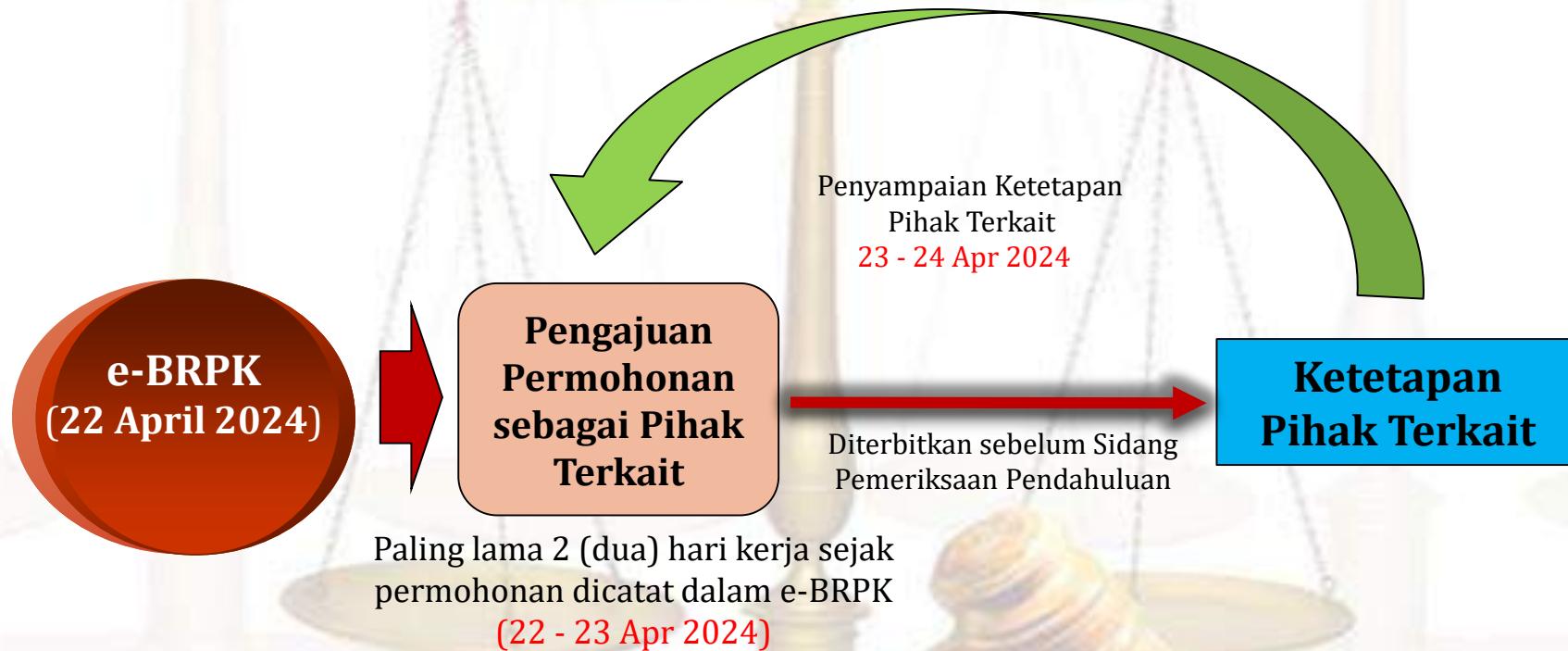
Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



KETERANGAN PIHAK TERKAIT



1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

JENIS ALAT BUKTI

1. surat atau tulisan;
2. keterangan para pihak;
3. keterangan saksi;
4. keterangan ahli;
5. keterangan pihak lain;
6. alat bukti lain; dan/atau
7. petunjuk.

ALAT BUKTI (PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD) (Surat atau Tulisan)

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - b. KPU/KIP kabupaten/kota
 - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

Alat bukti keterangan para pihak (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.

- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

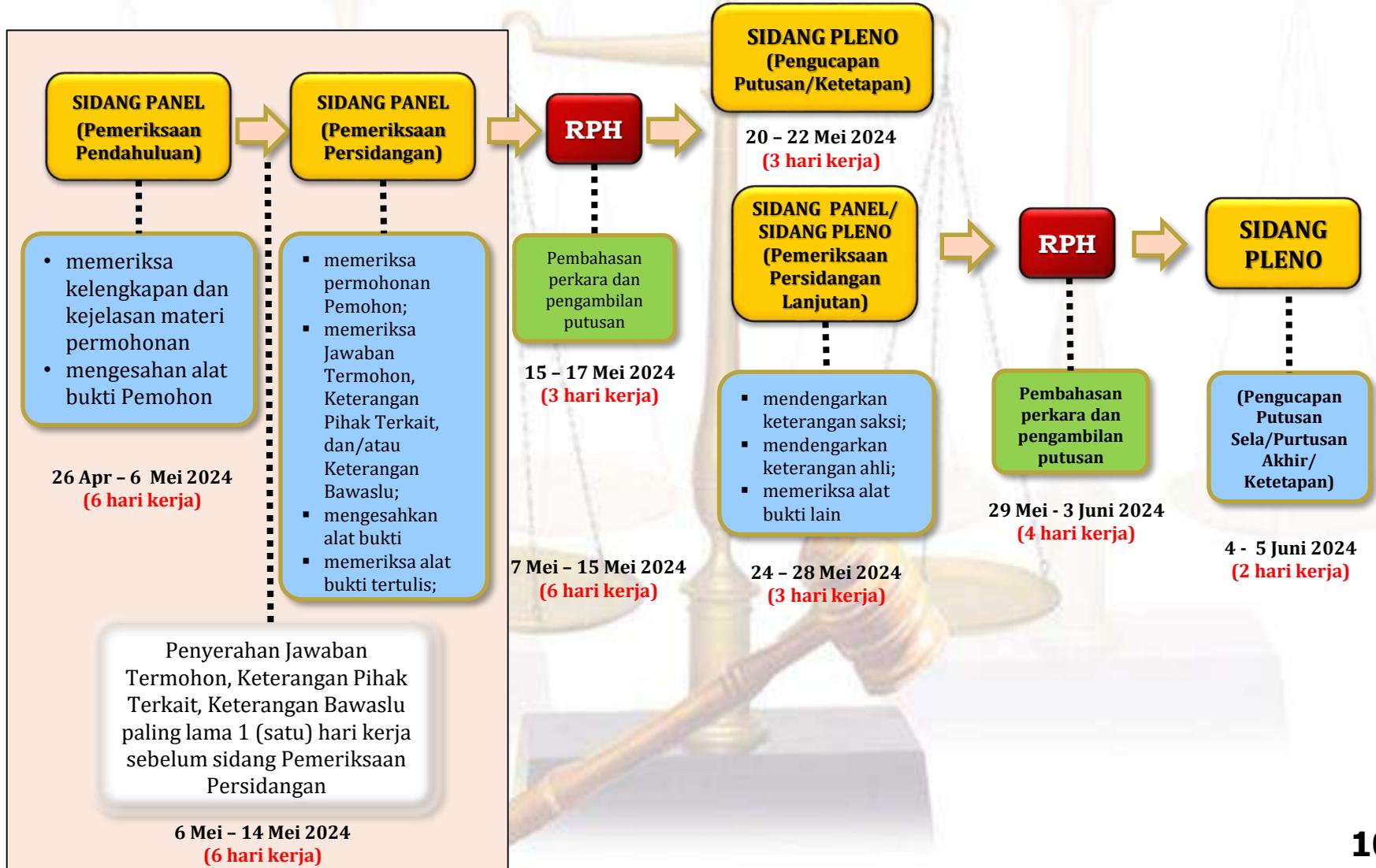
Lanjutan ...

Alat bukti keterangan pihak lain, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

Alat bukti lain, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

Alat bukti petunjuk, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan

Putusan Mahkamah, vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam e-BRPK, diperiksa dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam Sidang pleno terbuka untuk umum, termasuk ketetapan

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Lanjutan ...

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH
KONSTITUSI

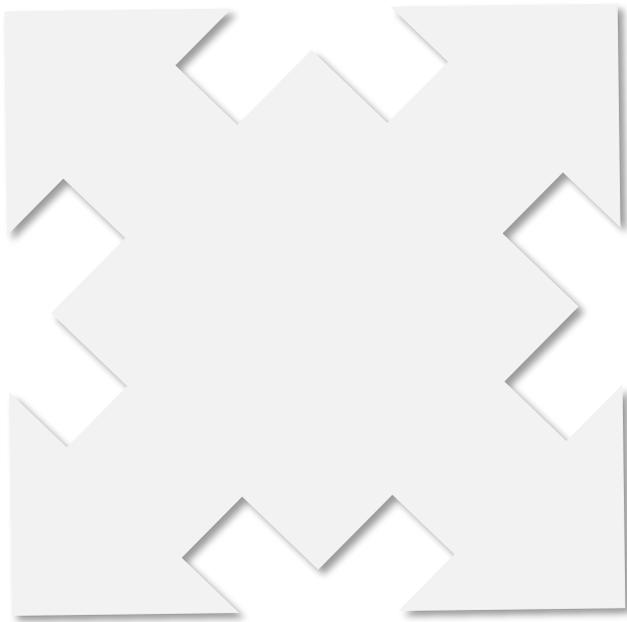


DINAMIKA PENANGANAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Dr. Fajar Laksono Suroso

KEWENANGAN

MAHKAMAH KONSTITUSI



1

MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945

2

MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

3

MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

4

MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU

5

MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

MENGAPA MK?

PERADILAN DIPERCAYA BERPERAN SIGNIFIKAN MEMBENAHAI SISTEM POLITIK, KARENA KEMAMPUANNYA MELINDUNGI DEMOKRASI
(AUSTRALIA, JERMAN, UKRAINA, MEKSIKO, AS, DLL)

DALAM PEMILU TERKANDUNG HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA YANG DILINDUNGI KONSTITUSI: HAK MEMILIH DAN HAK DIPILIH ADALAH HAK KONSTITUSIONAL SENGKETA DISELESAIKAN BERDASAR HUKUM DAN PRINSIP KONSTITUSI

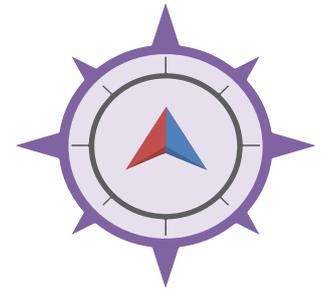
HISTORISITAS:

- BURUKNYA WAJAH PEMILU MASA LALU
- PERMASALAHAN PEMILU DITUTUPI, TIDAK MUNCUL KE PERMUKAAN
- PEMILU 1955, 1971, TIDAK ADA SENGKETA: TAKUT ATAU DITEKAN
- PEMILU 1977, 1982, 1987, 1992, 1997: TIDAK ADA PENYELESAIAN DEMOKRATIS
- PEMILU 1999: ADA SENGKETA YANG DIAJUKAN 27 DARI 48 PARPOL PESERTA PEMILU, DIANGGAP SAH OLEH PANWASLU, DIAJUKAN KE MA, TAPI DINYATAKAN MA PANWASLU BERWENANG MENENTUKAN SAH TIDAKNYA HASIL PEMILU

RAGAM MOTIF BERPERKARA DI MK

1. IDEALISME TINGGI
2. TIDAK SIAP DAN 'MENOLAK' KALAH
3. INGIN KALAH 'TERHORMAT', BERJUANG HINGGA TITIK PENGHABISAN
4. TAK SERIUS ATAU 'COBA-COBA'
5. 'GERTAKAN' UNTUK MENINGGIKAN NILAI TAWAR POLITIK DI MATA RIVAL
6. DORONGAN/TEKANAN PARA PENDUKUNG/TIM SUKSES

REKAPITULASI PUTUSAN MK



JENIS PUTUSAN	JUMLAH PUTUSAN	KABUL	TOLAK	TIDAK DITERIMA	DITARIK KEMBALI	GUGUR	TIDAK BERWENANG
PUU	1.613	297	610	500	167	25	14
SKLN	29	1	2	18	7	-	1
PHPU LEGISLATIF	671	53	423	148	13	34	-
PHPU PRESIDEN/ WAKIL PRESIDEN	5	-	5	-	-	-	-
PHP KADA	1.136	83	495	509	35	7	7

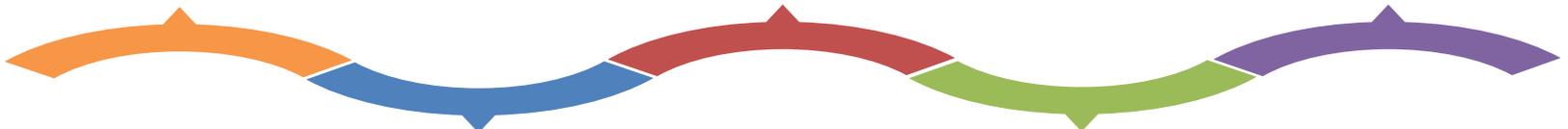
Keterangan: Belum ada perkara terkait dengan (1) pembubaran partai politik dan (2) *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden



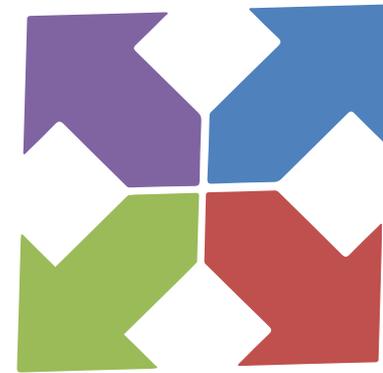
PUTUSAN PUU TERKAIT PEMILU

- KTP/PASPOR UNTUK MEMILIH BAGI YANG TIDAK TERDAFTAR DI DPT
- SISTEM PEMILU DARI NOMOR URUT MENJADI SUARA TERBANYAK
- AMBANG BATAS PARPOL DI PARLEMEN (*ELECTORAL & PARLIAMENTARY THRESHOLD*)
- AMBANG BATAS PENGAJUAN CAPRES (*PRESIDENTIAL THRESHOLD*)
- VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
- PILPRES DENGAN DUA PASANGAN CALON

- **LANJUTAN:**
 - SYARAT TIDAK PERNAH DIPIDANA UNTUK CALON LEGISLATIF
 - SOLUSI TERHADAP CALON TUNGGAL KEPALA DAERAH
 - HAK PILIH BAGI PENDERITA GANGGUAN JIWA
 - SYARAT MENJADI ANGGOTA KPU
 - PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK
 - SYARAT CALON ANGGOTA DPD
 - PENGADILAN KHUSUS PEMILU/PILKADA
 - JEDA 5 TAHUN UNTUK MANTAN TERPIDANA
 - DIFERENSIASI VERIFIKASI PARPOL
 - DLL



PARA PIHAK DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILU



PEMOHON:

PEMILU PRESIDEN:

PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PEMILU LEGISLATIF

DPR/DPRD:

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU.
BAGAIMANA DENGAN CALEG?

DPD: PERSEORANGAN CALON
ANGGOTA DPD

PEMILU KEPALA DAERAH:

PASANGAN CALON KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PEMANTAU PEMILU TERAKREDITASI
(APABILA CALON TUNGGAL)



TERMOHON:

1. KPU PUSAT
2. KPU PROVINSI
3. KPU KABUPATEN/KOTA

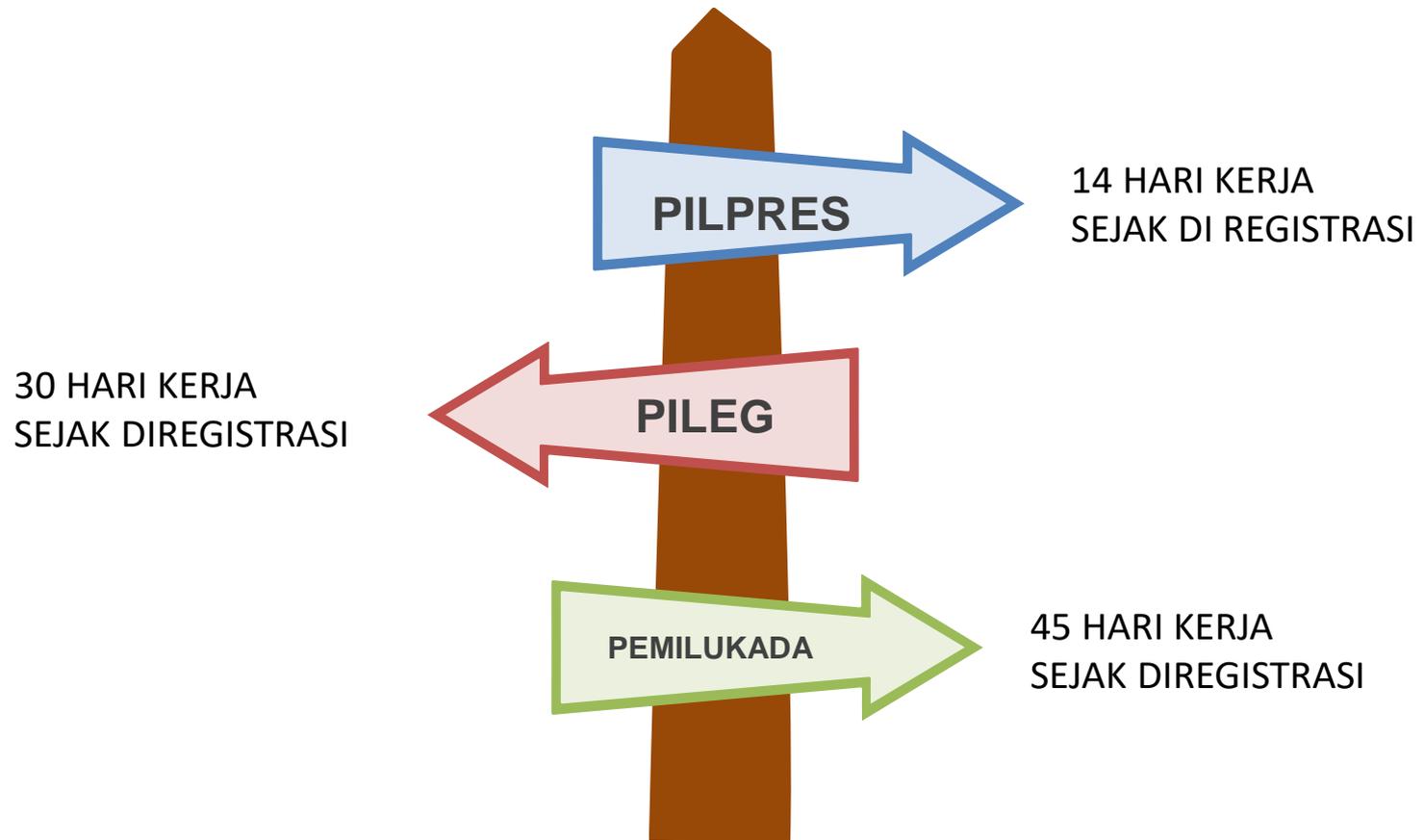
PIHAK TERKAIT

PASANGAN CALON LAIN (YANG
MENDAPATKAN SUARA TERBANYAK
BERDASARKAN REKAPITULASI KPU)

PEMBERI KETERANGAN

BAWASLU

RENTANG WAKTU PENYELESAIAN PERKARA



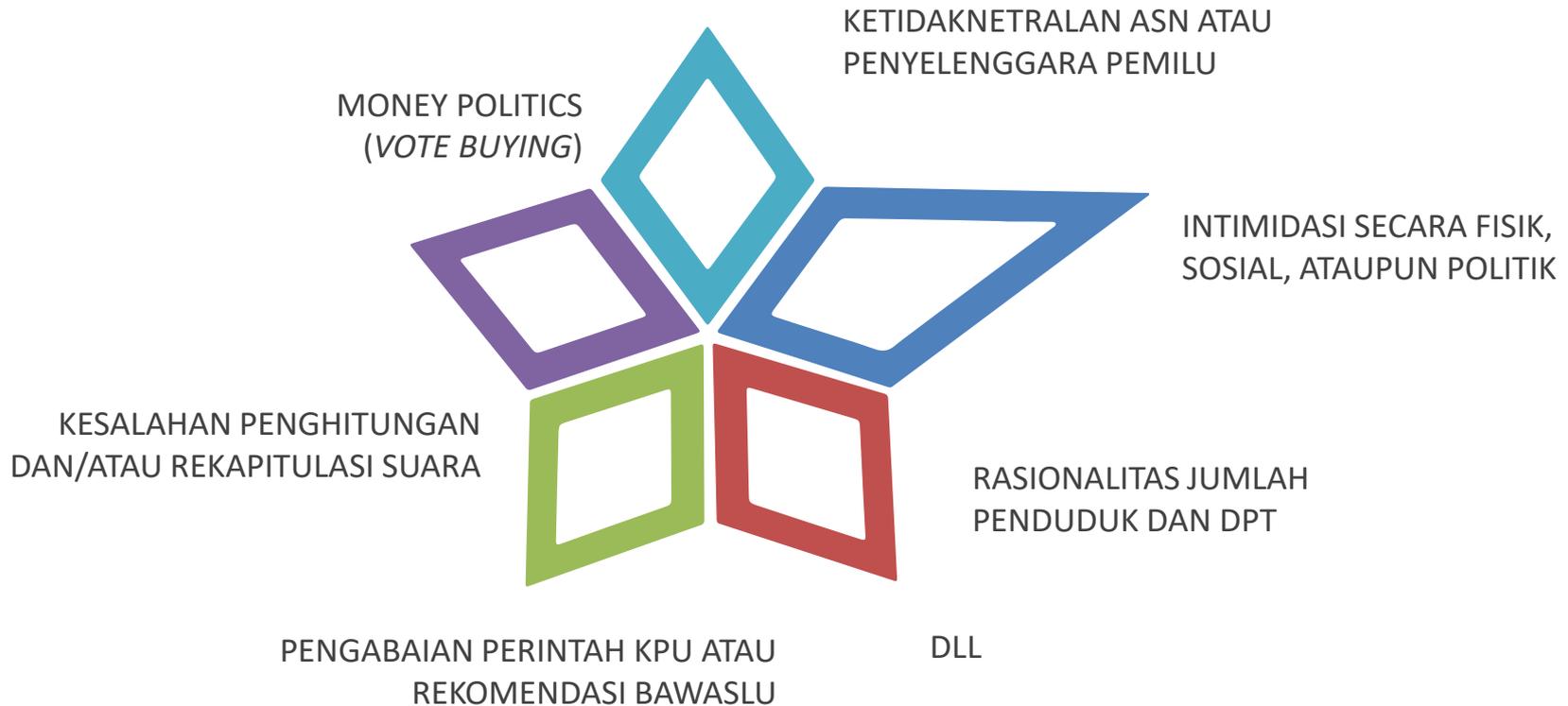
PERGESERAN PARADIGMA PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU

KEADILAN PROSEDURAL

KEADILAN SUBSTANTIF



CONTOH JENIS PELANGGARAN PEMILU



PELANGGARAN TSM DAN SIGNIFIKAN

TERSTRUKTUR

PELANGGARAN MELIBATKAN ATAU DILAKUKAN APARATUR NEGARA, PENYELENGGARA PEMILU, ATAU TIM PEMENANGAN SECARA BERJENJANG

SISTEMATIS

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA TERENCANA DAN TELAH DIPERSIAPKAN SEBELUMNYA

MASIF

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA MELUAS, TIDAK SPORADIS ATAU TUNGGAL

SIGNIFIKAN

PELANGGARAN ATAU KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA DAPAT MENGUBAH PEROLEHAN KURSI ATAU KEMENANGAN PASANGAN CALON



AMAR PUTUSAN: PSU

TIDAK DITERIMA | MENOLAK | MENGABULKAN

PENGHITUNGAN SUARA ULANG

APABILA TERJADI KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA ATAU PELANGGARAN DALAM PROSES REKAPITULASI SUARA, MK MEMERINTAHKAN AGAR DILAKUKAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PADA TPS ATAU WILAYAH TERTENTU

PEMUNGUTAN SUARA ULANG

APABILA TERBUKTI TERJADI PELANGGARAN YANG MENGAKIBATKAN TIDAK DAPAT DIGUNAKANNYA HASIL REKAPITULASI YANG ADA, MAKA MAHKAMAH MEMERINTAHKAN AGAR DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

PUTUSAN SELA



PUTUSAN AKHIR

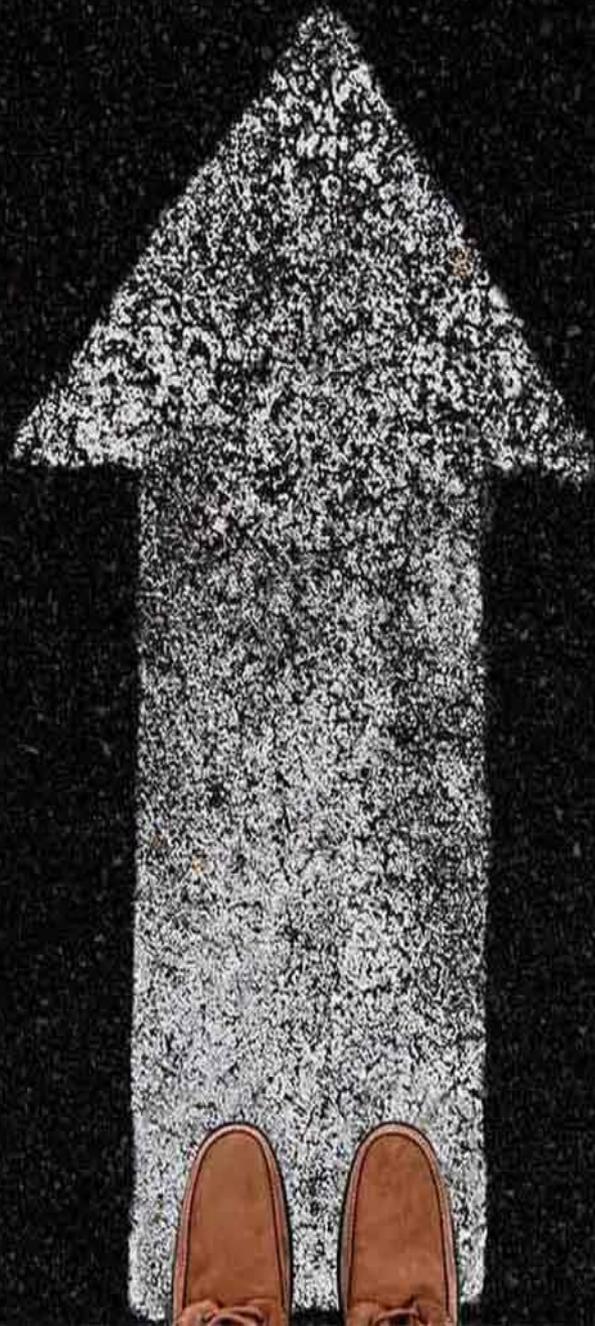
REKAPITULASI PUTUSAN PILEG DAN PILKADA

PHPU LEGISLATIF (DPR dan DPRD)

Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	44	15	13	16	0	0
2009	42	70	24	37	8	1	0
2014	14	296	1	291	2	2	0
2019	20	261	13	82	122	10	34

PHP KEPALA DAERAH

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2



TERIMA KASIH



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3

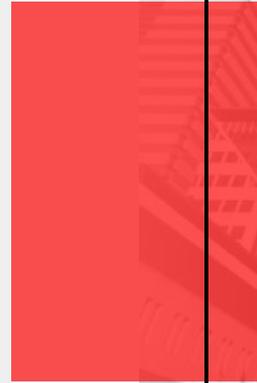
Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval

4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.

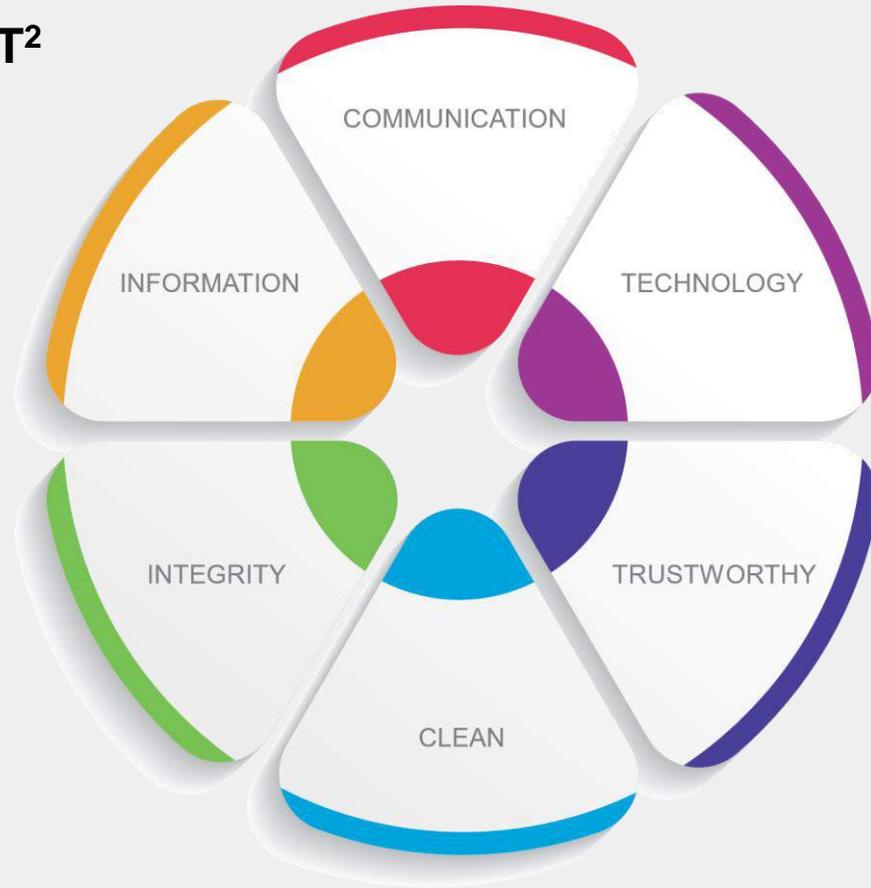




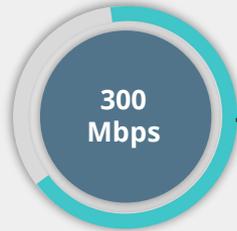
Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



300
Mbps

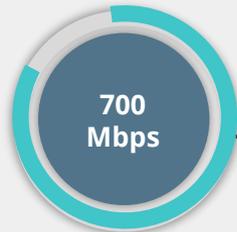
**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



700
Mbps

**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll

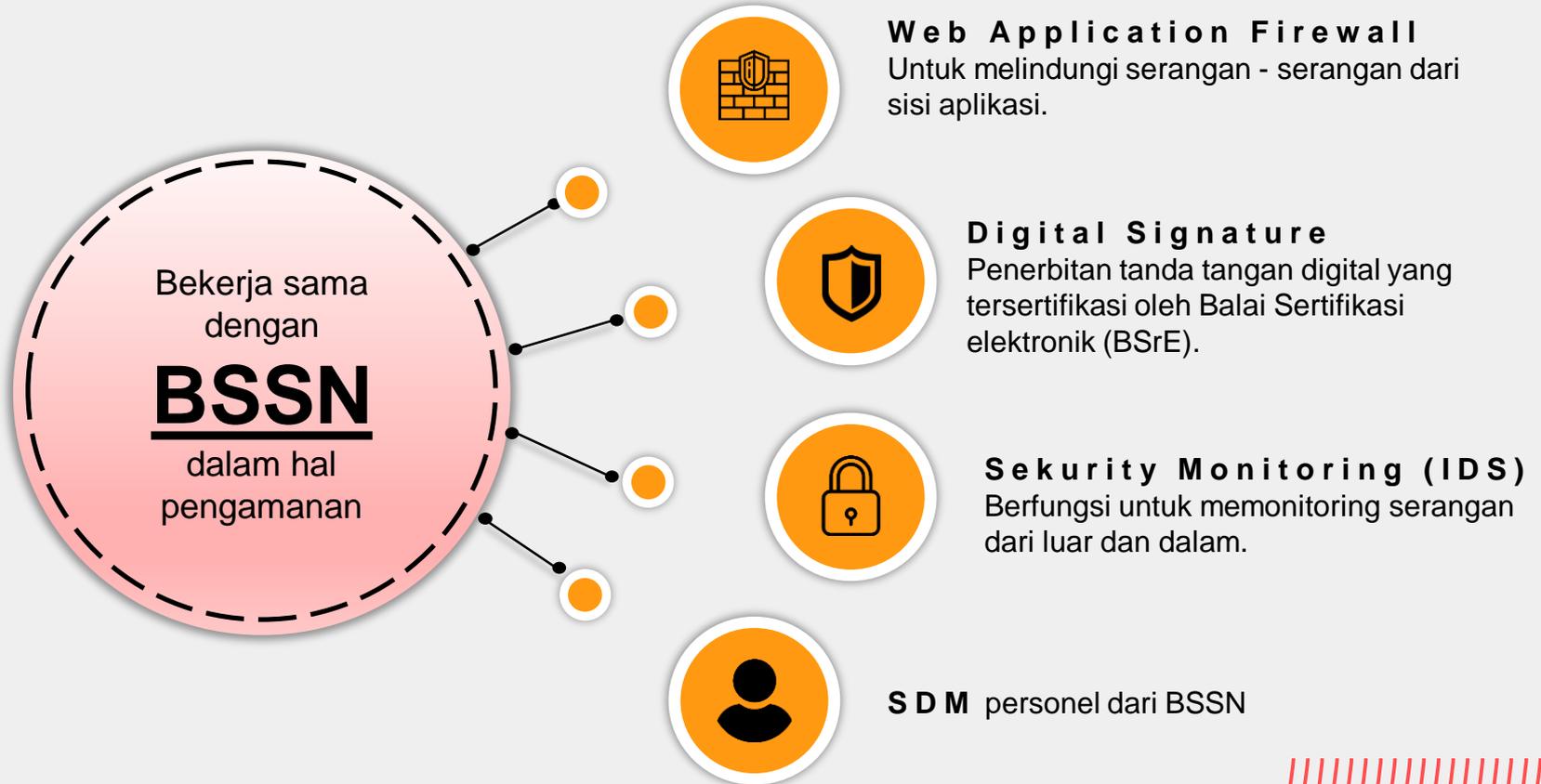


MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

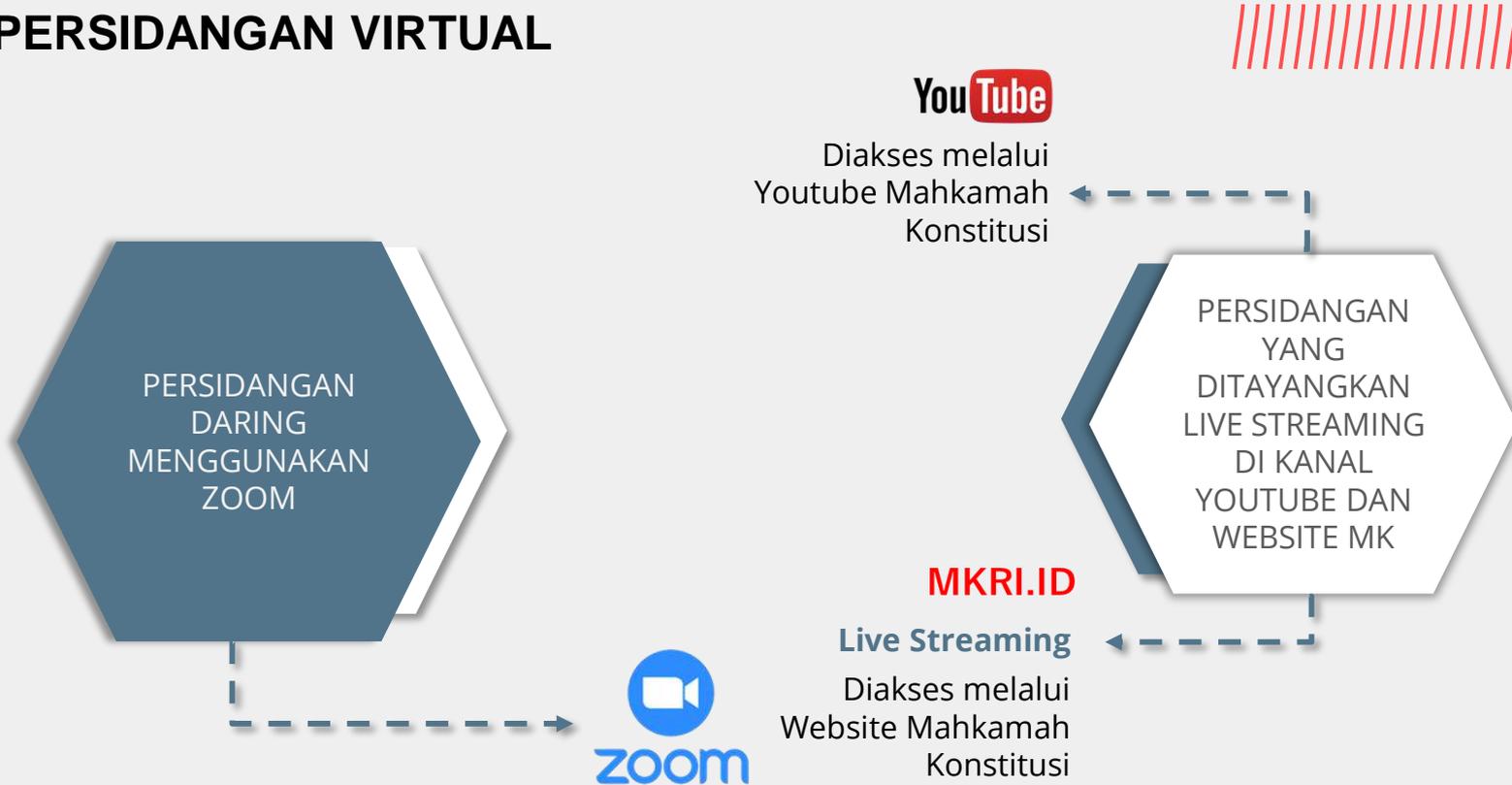
Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



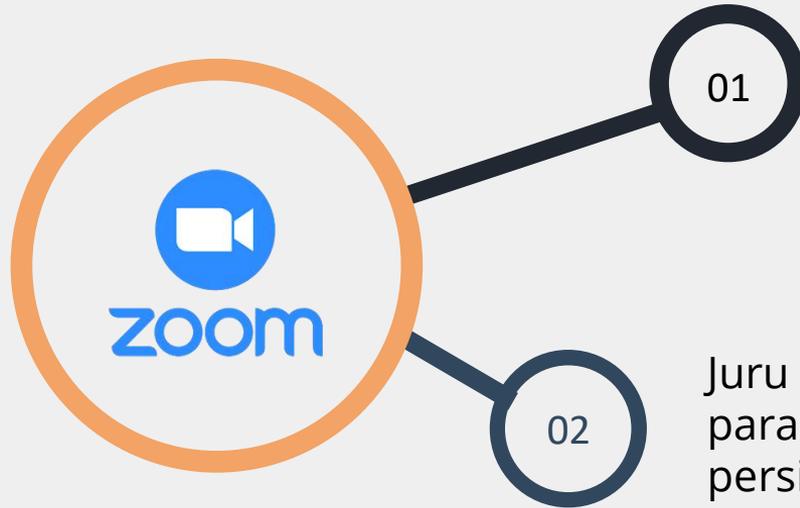
PERSIDANGAN VIRTUAL



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



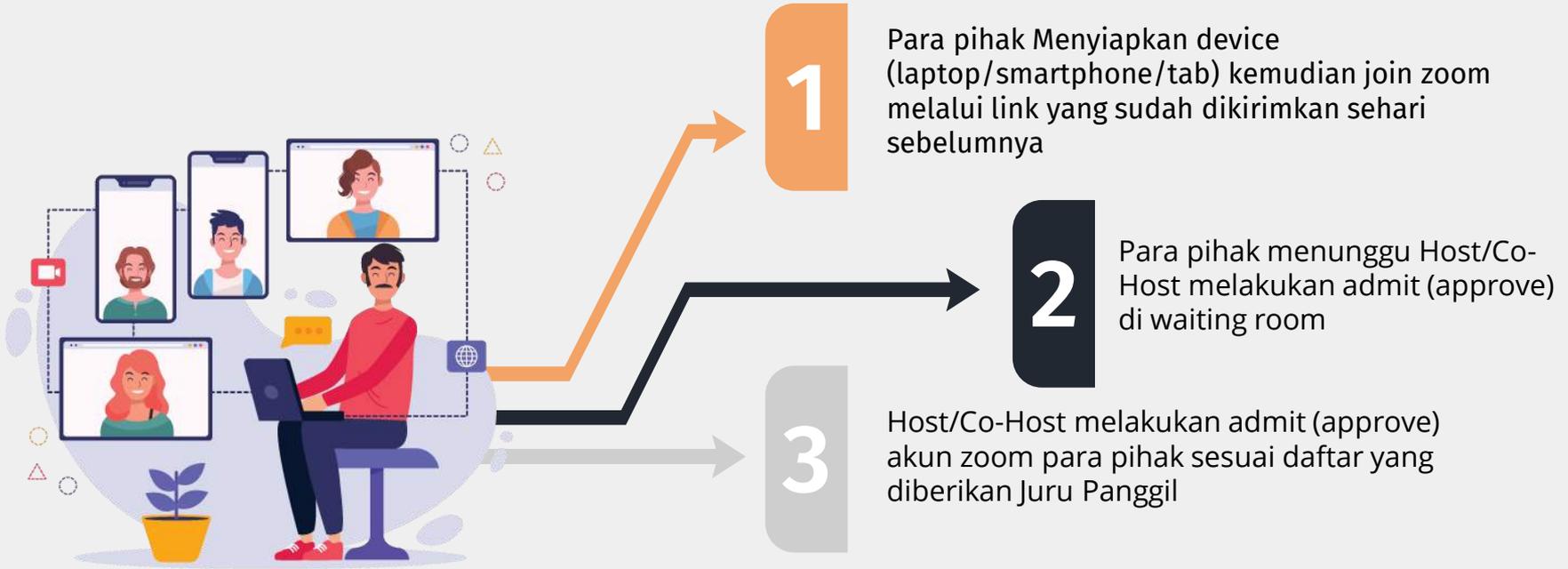
TAHAP PERSIAPAN



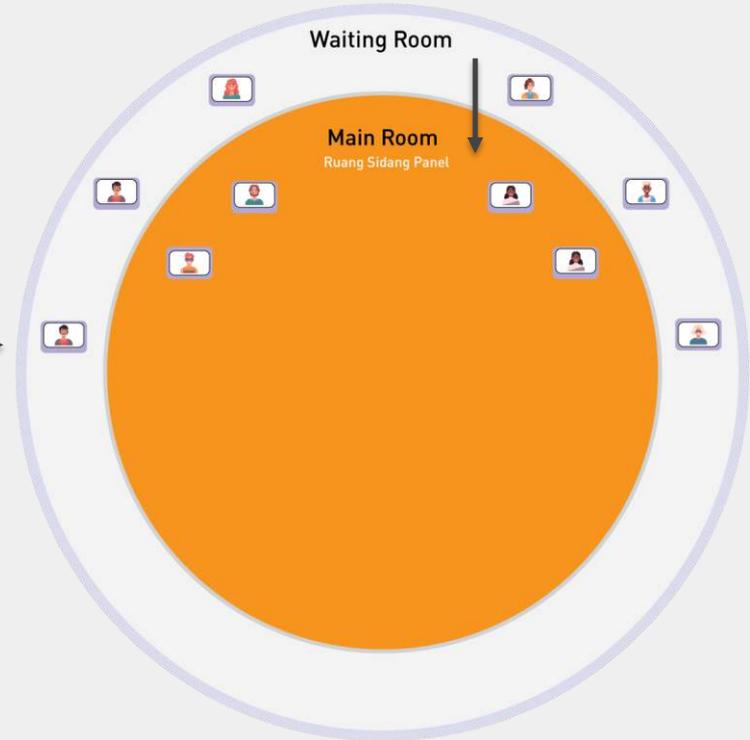
01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan

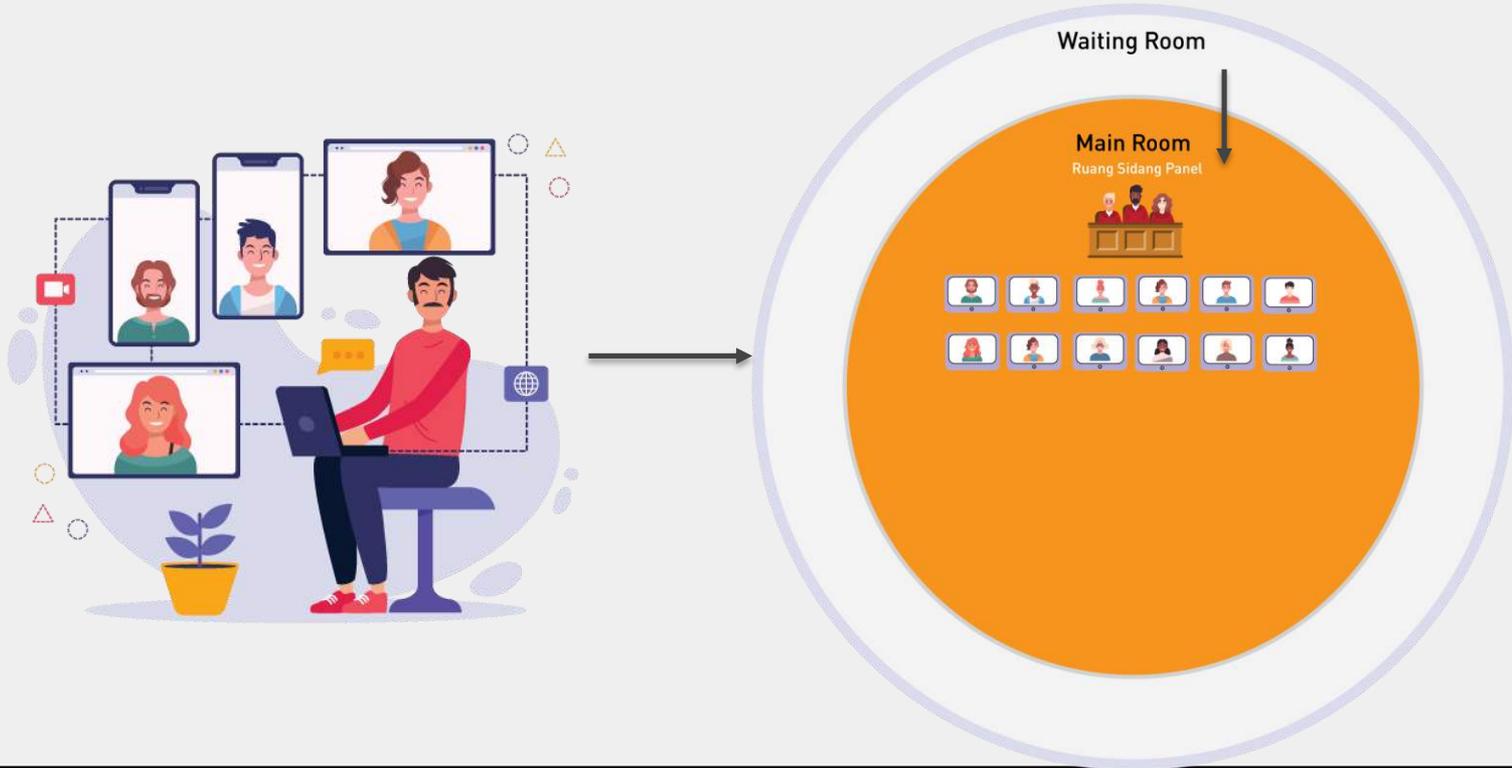
ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®

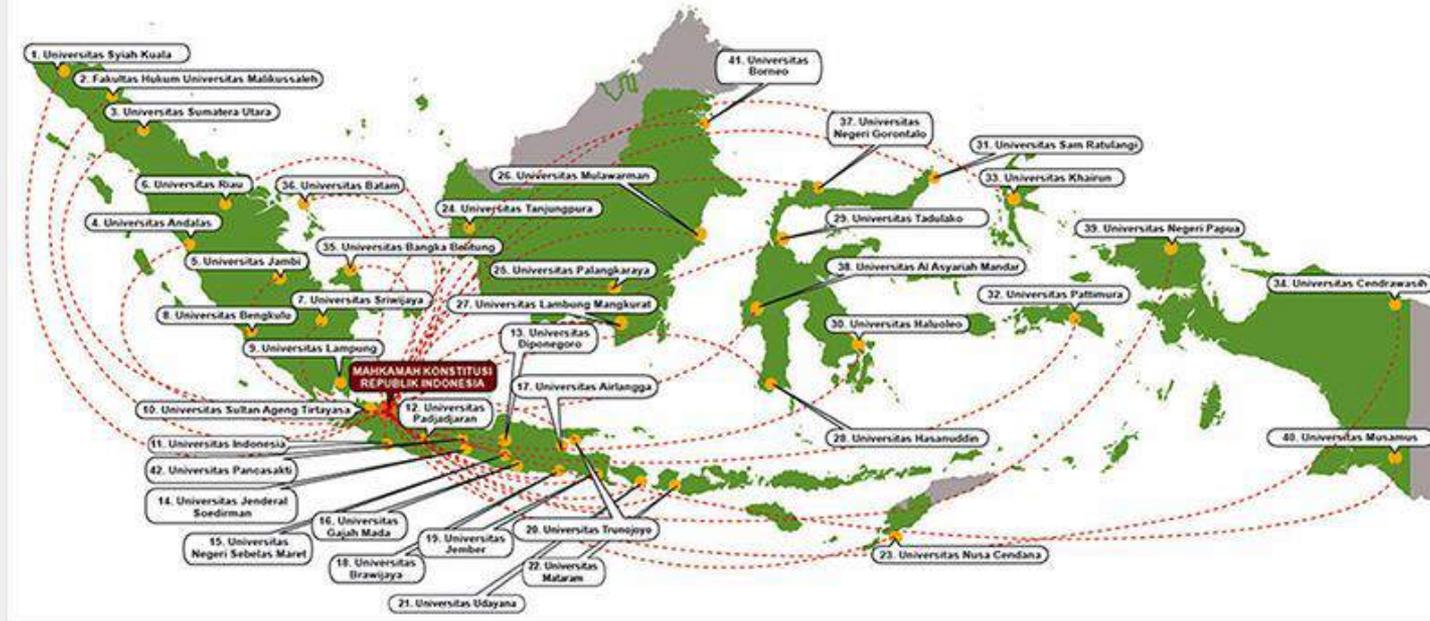


VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Samatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

www.mki.id

Mahkamah Konstitusi RI 94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

rum : Dr. Suharto, Sidang Pengucapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

1:25:45 3:08:10 14:15 19:16 19:15 1:41:05



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
“TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG”

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

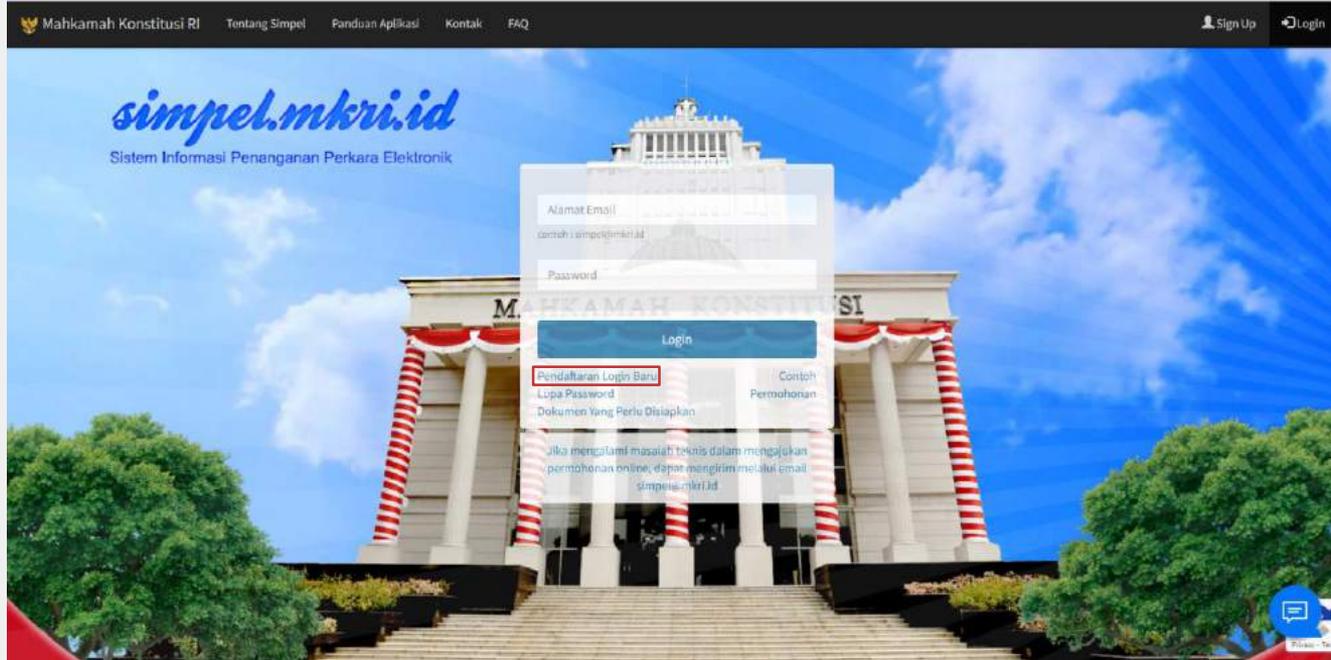
"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



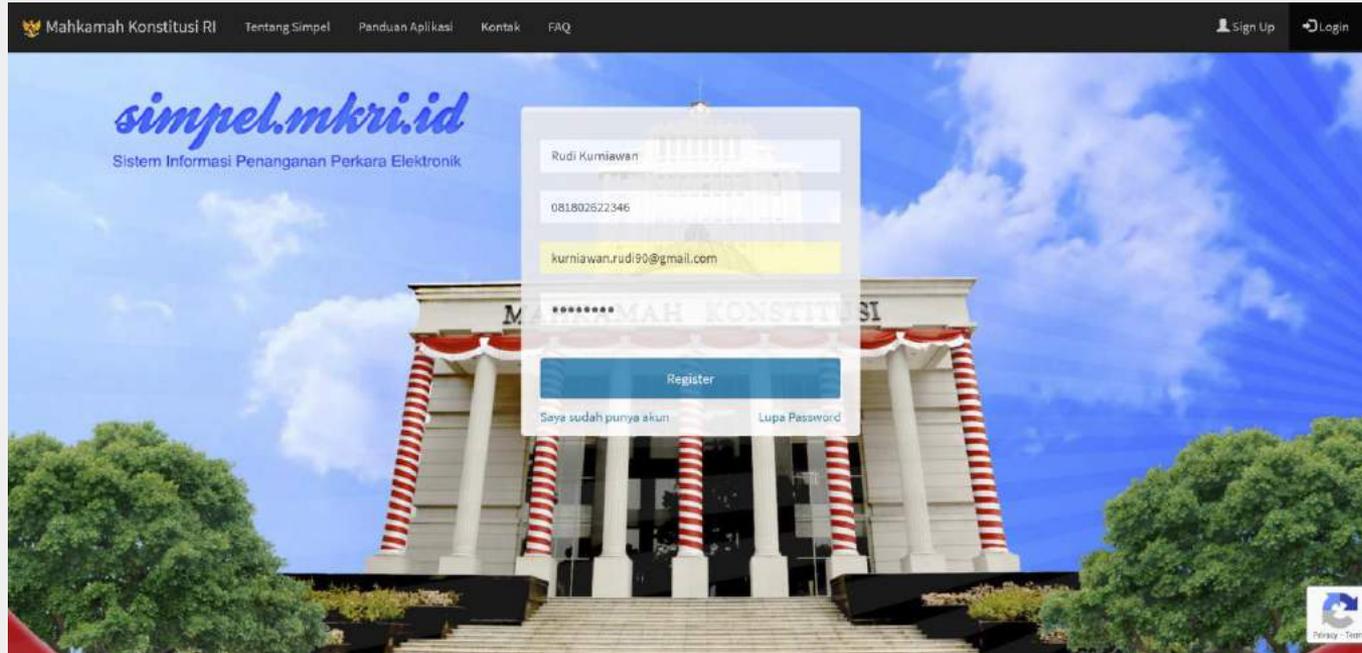
Permohonan Online (simpler.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpler.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



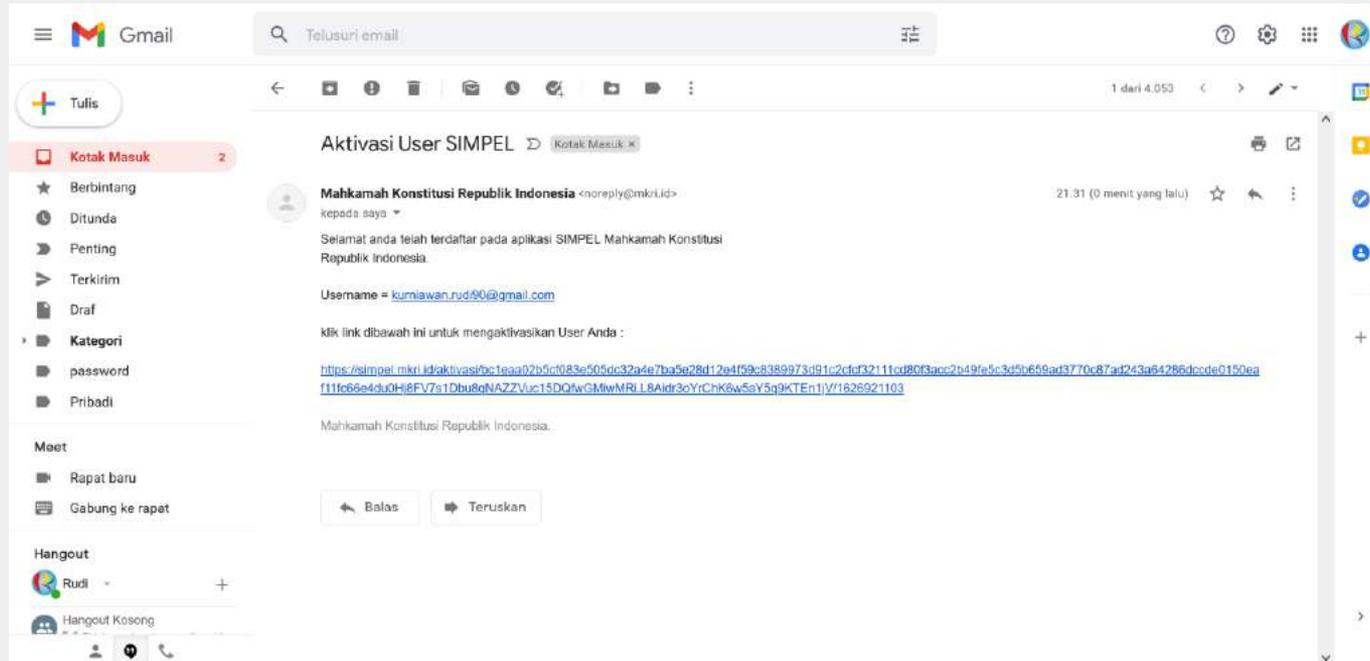
Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL user profile page. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The profile page shows the following information:

- Name:** Rudi Kurniawan
- Email:** kurniawan.rudi90@gmail.com
- Nomor Telepon/HP:** 0811002022566
- Nomor KTP:** 1234567891011121
- File KTP:** 01234567891011121 (File type harus .jpg or .png and Sebelum ada file KTP)

The page also shows a sidebar with navigation options and a footer with copyright information: Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL dashboard interface. At the top, the user is identified as Rudi Kurniawan. The main area is titled 'Permohonan' and features four large cards representing different types of applications: PPU (Pengajuan Undang-Undang) with a count of 1, SKLN (Sengketa Kompetensi Lembaga Negara) with 0, PPHU (Perwakilan Hasil Pemilihan Umum) with 0, and PHP (Perwakilan Hasil Pemilihan Umum Legislatif) with 0. Below this, there is a section for 'Persepsi Hasil Pemilihan Kepala Daerah' with a count of 0. At the bottom, a 'Kalender Sidang' (Meeting Calendar) is shown for July 2021, with a legend for 'Sidang' (Meeting), 'Publik' (Public), and 'Khusus' (Special).

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PPU atau SKLN atau PPHU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik) web application. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main page is titled "Permohonan Online - PUU (Pengujian Undang-Undang)". It features a navigation menu on the left with options like Dashboard, Info Permohonan, Permohonan PUU, SKLN, P-IPU, P-IP Kepala Daerah, and Informasi. The main content area is divided into three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan" (selected), "Proses Pengisian Data Permohonan dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". Under the selected tab, there is a form titled "Permohonan" with a text area for "Uraian Pokok Permohonan" containing the example text: "Uraian Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)". Below the text area is a list of required documents: "Dokumen yg harus disiapkan:" including KTP Permohon, Email Permohon, KTP Kuasa, Email Kuasa, Surat Kuasa, File KTABAS, Permohonan (pdf/doc), Daftar alat bukti, and Alat/dokumen bukti. A "Keterangan:" section notes that asterisks indicate required documents. At the bottom of the form are "Batal" and "Simpan" buttons. The footer contains copyright information for the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia and the version number 2.1.

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

SIMPTEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMORONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Version 2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan

Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa

Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materilil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon [+ Tambah Pemohon](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

Data Kuasa [+ Tambah Kuasa](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan) Simpan Sementara Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main content area is titled "Permohonan Online" and "PUU(Pengujian Undang-Undang)". It features a progress bar with three stages: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". Below this is a section for "Berkas Permohonan" (Application Documents) with a table listing required documents and their upload status.

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

At the bottom of the interface, there are several action buttons: "Kembali (Edit Permohonan)", "Batal (Hapus Permohonan)", "Simpan Sementara", and "Kirim Permohonan". A "Tambah Berkas" button is also visible above the "Kirim Permohonan" button.

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

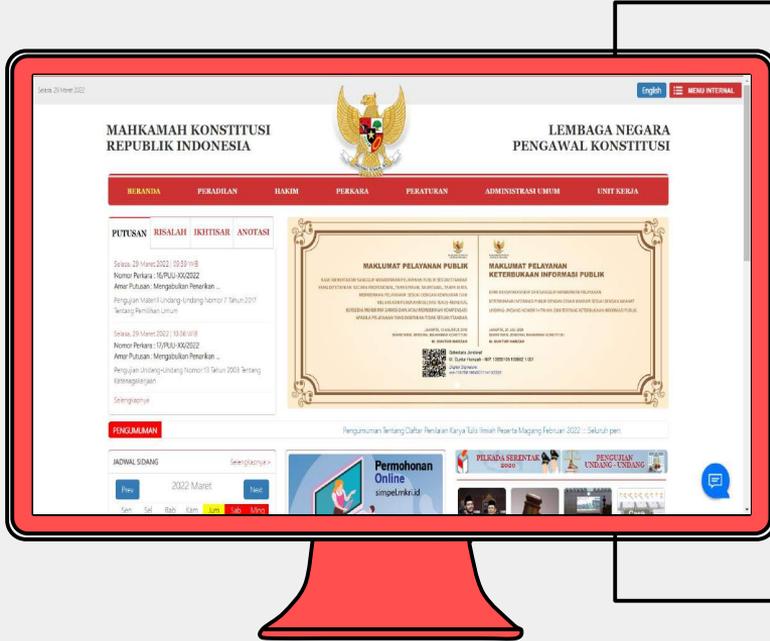
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDIA MENEMPAH SANGGUP MEMBERIKAN KONSOLIDASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARTO, JENDRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERANG BANYAK, SESUAI DENGAN ANAKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 JULI 2020
SUHARTO, JENDRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 192001051000021001
Zuhair Zuhair
nip.1970081904201114100335

PENGUMUMAN Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh per...

JADWAL SIDANG Selengkapnya >
Prev 2022 Maret Next
Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan Online
simplm.kri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTSAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERKEMASAN PISYOKANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEKALA MENURUT MAHASISWA DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHAR SUHAR, JENYAL, MAHARAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 12020125 100002 1 001
Zuhri Zuhri
021-121788 1004221114 102335

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERANG BANYAK, SESUAI DENGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 JULI 2020
SUHAR SUHAR, JENYAL, MAHARAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh perni

JADWAL SIDANG

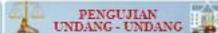
Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)

Permohonan Online

simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!

BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)



Permohonan Online
simplp.mkri.id

simplp.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarganya ■ Tunda ■ Libur



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**



Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDIH

Pusdik MKRI Perpustakaan Pusat Sejarah Konstitusi Gedung MK

Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consvrev SP4N-LAPOR!

MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consrev | SP4N-LAPOR!

LIVE STREAMING PERSIDANGAN





Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MK: Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MK: Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Rendirannya Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Constrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Selasa, 22/03/2022



Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa, 22/03/2022



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021, Senin, 21/03/2022



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

 **2352-9000**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA-JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)

Permohonan Online
simpel.mkri.id

- BERITA** | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

- PILKADA SERENTAK 2020
- PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!



CASE TRACKING



Cari

CASE TRACKING

MKRI PUU SKLN PHPU PHPKADA

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

10/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CLICK MK



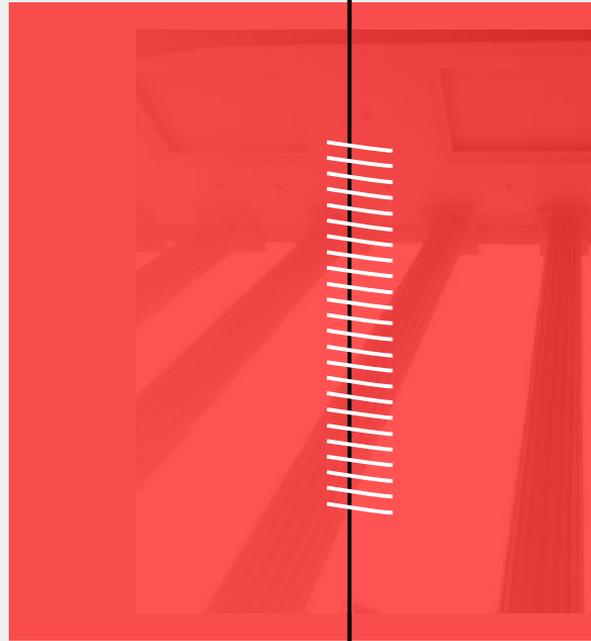
CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"
CISARUA – 21 Juni 2023**

PARA PIHAK DALAM PPHU ANGGOTA DPR DAN DPRD

A. Pemohon

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan;

OBJEK PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Objek dalam perkara **PHPU anggota DPR dan DPRD** adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & PIHAK TERKAIT

PERMOHONAN PEMOHON

1. Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
2. Permohonan diajukan per provinsi.
3. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- 1) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- 2) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 x 24 jam** sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024
15 Feb – 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

A. Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)

B. Identitas Termohon

C. Uraian mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah;
2. Kedudukan hukum Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pokok permohonan Pemohon;
5. Petitum Pemohon.

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
 - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
 - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

Identitas Pemohon & Termohon

Identitas Pemohon memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. nomor telepon/seluler;
 - c. alamat surat elektronik (*email*); dan
- *) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi/DPRA, DPRD
Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta
Pusat,
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Identitas Pihak Terkait

Identitas Pihak Terkait memuat:

a. nama dan alamat Pihak Terkit;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRRA,
DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan ... yang telah memperoleh
persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (terlampir).

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tntg Kekuasaan Kehakiman;
 - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
 - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

Jika permohonan diajukan perseorangan:

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
 - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
 - Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023;
- b. hari, tanggal, dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. hari, tanggal, dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... pada tanggal...2024, pukul... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

Pemohon Parpol:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

Pemohon Perseorangan:

Pemohon menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.
2.
3.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.
2.
3.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Uraian Petitum Pihak Terkait

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PBB (PHPU 2019)

Permohonan:

- A. 12 Permohonan (1 dari perseorangan).
- B. Jika dilihat dari Dapil: 23 Dapil dengan rincian sbb:
 - 1) DPR: 0 Dapil dari 80 Dapil DPR RI
 - 2) DPRD Provinsi: 2 Dapil dari 272 Dapil DPRD Provinsi
 - 3) DPRD Kabupaten/Kota: 21 Dapil dari 2.206 Dapil DPRD Kab/Kota.

Putusan

- a) 0 Dapil dikabulkan
- b) 1 Dapil ditarik kembali
- c) 10 Dapil ditolak;
- d) 12 Dapil tidak dapat diterima;**

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1011/DK.06.00/06/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

15 Juni 2023

Kepada,
YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 22 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 19 Juni 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk906123854230614110006

Lampiran I

Nomor : 1011/DK.06.00/06/2023

Tanggal : 15 Juni 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI BULAN BINTANG**

Hari, Tanggal : Senin, 19 Juni 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 19 Juni 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 969/DK.06.00/06/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

13 Juni 2023

Kepada,
YM. Hakim Konstitusi
Bapak Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 22 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 19 Juni 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-598702238230613114539

Lampiran I

Nomor : 969/DK.06.00/06/2023

Tanggal : 13 Juni 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI BULAN BINTANG**

Hari, Tanggal : Senin, 19 Juni 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 19 Juni 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. - YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Nomor : 950/DK.06.00/06/2023

www.mkri.id

13 Juni 2023

Lampiran : -

Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Yth,

Saudara Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 22 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan PHPU di
Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.



Digital Signature
mk-1177664886230613121459



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 955/DK.06.00/06/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

13 Juni 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda II
Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 22 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan III.



Digital Signature
mk338487761230613114756



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 952/DK.06.00/06/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

13 Juni 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Riska Aprian, S.T., M.Kom.**
 - 2. Agung Wisnu Laksono, A.Md.**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 22 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk266195846230613114901



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 954/DK.06.00/06/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

13 Juni 2023

Kepada Yth,
Saudara Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 22 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 21 Juni 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk-549799211230613115008



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1035/DK.06.00/06/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

16 Juni 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Fransisca**
 - 2. Dian Chusnul Chatimah**
 - 3. Anna Triningsih**
 - 4. Intan Permata Putri**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 22 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 21 Juni 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-2139055426230615022740



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1036/DK.06.00/06/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

16 Juni 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Yunita Rhamadani**
 - 2. Rahadian Prima Nugraha**
 - 3. Andriani Wahyuningtyas Novitasari**
 - 4. Alboin Pasaribu**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 22 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 22 Juni 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan
Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk551808699230615022850



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 957/DK.06.00/06/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

13 Juni 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda I
Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 22 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 22 Juni 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.



Digital Signature
mk-376967949230613115216



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 114/DK.06.00/01/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

19 Januari 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB)
Bapak Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 22 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Bulan Bintang yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 5 Juni 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk447489502230119081754

Lampiran I

Nomor : 114/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Bulan Bintang yang terdiri dari:
 - 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Partai Bulan Bintang memberikan daftar nama peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang paling lambat pada tanggal **5 Juni 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. *Boarding pass*

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. Transport Darat/Laut

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
 - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 114/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Bulan Bintang

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 19 s.d. 22 Juni 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Bulan Bintang

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 19 Juni 2023	09.30 – 11.30 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	11.30 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi	YM Ketua MK Ketua Partai Politik Plt. Kapusdik	Pusdik



		<ul style="list-style-type: none"> 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Ketua Partai Politik 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa 		
	17.30 WIB	Istrahat	Panitia	
KEDUA				
Selasa, 20 Juni 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 21 Juni 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik



	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 22 Juni 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik



		7. Pembacaan Doa		
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 114/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi , Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
120										



Lampiran IV

Nomor : 114/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
19 s.d. 22 Juni 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Bulan Bintang
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 166/DK.00/01/2023

09 Januari 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB)

Bapak Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024**, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Tembusan Yth:

1. Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;



Digital Signature
mk400271064230109040246



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 968/DK.06.00/06/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

13 Juni 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB)
Bapak Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang** yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 22 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Hari, tanggal : Senin, 19 Juni 2023

Waktu : 16.30 –18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1330478798230613114218

Lampiran I

Nomor : 968/DK.06.00/06/2023

Tanggal : 13 Juni 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Bulan Bintang

Hari, Tanggal : **Senin, 19 Juni 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Bulan Bintang

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 19 Juni 2023	16.30 –18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Bulan Bintang 5. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Ketua Umum Partai Bulan Bintang 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Partai Bulan Bintang 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua Umum PBB Sekjen MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 421/ST.SPD/2000/06/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Bulan Bintang di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 19 s.d. 22 Juni 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 19 Juni 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
mk-1142135304230626125208

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 421/ST.SPD/2000/06/2023

Tanggal : 19 Juni 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI BULAN BINTANG**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	19 Juni 2023
2	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA.	Narasumber	19 Juni 2023
3	Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum	Narasumber	19 Juni 2023
4	Elisabeth, S.E.	Narasumber	19 Juni 2023
5	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	Narasumber	20 Juni 2023
6	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Narasumber	20 Juni 2023
7	Riska Aprian, S.T., M.Kom.	Narasumber	20 Juni 2023
8	Agung Wisnu Laksono, A.Md.	Narasumber	20 Juni 2023
9	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Narasumber	21 Juni 2023
10	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Narasumber	21 Juni 2023
11	Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.	Narasumber	21 Juni 2023
12	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.H.	Narasumber	21 Juni 2023
13	Intan Permata Putri, S.H.	Narasumber	21 Juni 2023
14	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Koordinator	22 Juni 2023
15	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Narasumber	22 Juni 2023
16	Dr. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.	Narasumber	22 Juni 2023
17	Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H.	Narasumber	22 Juni 2023
18	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Narasumber	22 Juni 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PARTAI BULAN BINTANG

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI BULAN BINTANG TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI BULAN BINTANG

NOMOR : 29/PK/2023

NOMOR : B-739/DPP-Sek/I/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan belas** bulan **Januari**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Elisabeth**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.**, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18, Nomor. 1B, Jakarta Selatan, 12740, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

f 8

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 19 s.d. 22 Juni 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
 - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Bulan Bintang sebagai peserta kegiatan Bimbingan

Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:

- 36 orang Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **5 Juni 2023**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **5 Juni 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Elisabeth

Plt. Kepala Pusat

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Partai Bulan Bintang



Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Ketua Umum

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Arifa Mutiara	19/06/2023 16:11:30 WIB
2	Afifa Resti Pradita	19/06/2023 16:13:30 WIB
3	Caesar Sophan Aditya	19/06/2023 16:14:33 WIB
4	Diah Sutarsih	19/06/2023 16:20:25 WIB
5	Armansah	19/06/2023 16:20:44 WIB
6	Supriyadi	19/06/2023 16:21:20 WIB
7	Eti Yuliaty	19/06/2023 16:21:22 WIB
8	Nurmala	19/06/2023 16:21:31 WIB
9	Nur Afifah	19/06/2023 16:21:44 WIB
10	MUHAMMAD NAMRI	19/06/2023 16:22:09 WIB
11	Safriil Partang	19/06/2023 16:22:09 WIB
12	Basuki	19/06/2023

	16:22:22 WIB
13 H. Awaluddin Sibarani	19/06/2023 16:22:29 WIB
14 Moh. Nugrah	19/06/2023 16:22:36 WIB
15 Zaldi Heriwan	19/06/2023 16:22:47 WIB
16 Sri Mulyana	19/06/2023 16:22:56 WIB
17 Mirza Kamal	19/06/2023 16:22:59 WIB
18 Evi Pratiwi Handayani	19/06/2023 16:23:00 WIB
19 Tahir	19/06/2023 16:23:01 WIB
20 Ajat Sudrajat	19/06/2023 16:23:01 WIB
21 MUHAMMAD IQBAL	19/06/2023 16:23:03 WIB
22 Albir Abdi	19/06/2023 16:23:03 WIB
23 Joki Mardison	19/06/2023 16:23:04 WIB
24 Soesanto Gunawan	19/06/2023 16:23:06 WIB
25 Nurul Fajar Rozyqin	19/06/2023 16:23:06 WIB
26 Susi Rahayu	

	19/06/2023 16:23:08 WIB
27 Imran Harahap	19/06/2023 16:23:09 WIB
28 Abu Anas	19/06/2023 16:23:10 WIB
29 Syaifudin	19/06/2023 16:23:10 WIB
30 Boris Dianjaya	19/06/2023 16:23:11 WIB
31 Lebrata	19/06/2023 16:23:11 WIB
32 MUHAMMAD NAMRI	19/06/2023 16:23:13 WIB
33 Lis Purwanti	19/06/2023 16:23:13 WIB
34 Arman Muis	19/06/2023 16:23:13 WIB
35 Mohammad Fauzie Dianjaya	19/06/2023 16:23:14 WIB
36 Yessi Yuga Puspita	19/06/2023 16:23:15 WIB
37 Abdullah	19/06/2023 16:23:15 WIB
38 Alfian Trenggana	19/06/2023 16:23:17 WIB
39 Irfan Febrianto	19/06/2023 16:23:18 WIB

40 Yoga Pranata	19/06/2023 16:23:20 WIB
41 Yulius Nur	19/06/2023 16:23:21 WIB
42 Fathurian Ramadhan	19/06/2023 16:23:22 WIB
43 H. Yanuar Amnur	19/06/2023 16:23:27 WIB
44 GATOT PRIADI	19/06/2023 16:23:28 WIB
45 Harsuyana Dahlina Lubis	19/06/2023 16:23:28 WIB
46 Januari Marianie	19/06/2023 16:23:39 WIB
47 Aspihani	19/06/2023 16:23:40 WIB
48 Omisah	19/06/2023 16:23:41 WIB
49 Poppy Rezki Adiatma	19/06/2023 16:23:48 WIB
50 Aris Maryani	19/06/2023 16:23:50 WIB
51 Arni Dasrianti	19/06/2023 16:23:50 WIB
52 Yudi Setiawan	19/06/2023 16:23:55 WIB
53 Triana Widya Wijayanti	19/06/2023

	16:24:03 WIB
54 Diah Yudiastuti	19/06/2023 16:24:06 WIB
55 Samsabastian	19/06/2023 16:24:07 WIB
56 Doriangat Pakpahan	19/06/2023 16:24:07 WIB
57 Muhammad Arfah	19/06/2023 16:24:08 WIB
58 HERMAN LATABE	19/06/2023 16:24:10 WIB
59 MAHDI PANA	19/06/2023 16:24:11 WIB
60 ERON NORMANDIA BACHSIN	19/06/2023 16:24:18 WIB
61 Faiz Alkautsar	19/06/2023 16:24:20 WIB
62 DENY RISMAWAN	19/06/2023 16:24:35 WIB
63 Azrul Saleh Rumata	19/06/2023 16:24:47 WIB
64 Muhammad Idris	19/06/2023 16:24:56 WIB
65 Susanto	19/06/2023 16:24:57 WIB
66 Deny Boy	19/06/2023 16:24:59 WIB
67 Gregorius Welly Agung Poy	

	19/06/2023 16:25:07 WIB
68 Saiful Sabit Assidik	19/06/2023 16:26:33 WIB
69 H. Hasan Basri	19/06/2023 16:26:43 WIB
70 Siti Dermawan Situmorang	19/06/2023 16:26:45 WIB
71 Asrul Bin Usman	19/06/2023 16:26:50 WIB
72 Gregorius Matrecano	19/06/2023 16:27:55 WIB
73 Yusniar Cecilia	19/06/2023 16:27:56 WIB
74 Yani Hakim	19/06/2023 16:29:21 WIB
75 M. Heikal Akmal	19/06/2023 16:29:33 WIB
76 YUSRIL MARICAR	19/06/2023 16:30:07 WIB
77 Sukandi	19/06/2023 16:30:12 WIB
78 Irfan Nauval El Hassan	19/06/2023 16:32:48 WIB
79 Mohammad Isa Litololy	19/06/2023 16:33:29 WIB
80 Nur Raihan	19/06/2023 16:33:44 WIB

81 M. AFIAT HARIPAI	19/06/2023 16:33:49 WIB
82 Farlaini	19/06/2023 16:34:11 WIB
83 Muhammad Fajrin	19/06/2023 16:42:21 WIB
84 Ratna Juita Yakoeb	19/06/2023 16:59:36 WIB
85 Aminuddin	19/06/2023 17:05:28 WIB
86 DIANSYAH PUTRA	19/06/2023 17:21:08 WIB
87 SOLAHUDDIN	19/06/2023 17:21:34 WIB
88 Muhammad Riano Pertama	19/06/2023 17:30:14 WIB
89 Muhammad Mir Purnama	19/06/2023 18:02:33 WIB
90 Nyimas Nining Rachman	19/06/2023 18:30:10 WIB
91 Juardi Ardiansah	19/06/2023 18:48:42 WIB
92 Muhamad Ahsan	19/06/2023 19:15:40 WIB
93 Rusli	19/06/2023 19:17:16 WIB
94 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023

	19:18:36 WIB
95 Muhammad Fakhrol Azmi	19/06/2023 19:25:05 WIB
96 Rita Sahagia	19/06/2023 19:42:56 WIB
97 Jamali	19/06/2023 19:58:02 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	YUSRIL MARICAR	19/06/2023 16:30:13 WIB
2	Sukandi	19/06/2023 16:30:15 WIB
3	Deny Boy	19/06/2023 16:31:21 WIB
4	M. AFIAT HARIPAI	19/06/2023 16:33:56 WIB
5	Nur Raihan	19/06/2023 16:34:02 WIB
6	Harsuyana Dahlina Lubis	19/06/2023 16:34:17 WIB
7	Syaifudin	19/06/2023 16:34:28 WIB
8	Samsabastian	19/06/2023 16:36:16 WIB
9	Abu Anas	

	19/06/2023 16:36:50 WIB
10 Muhammad Fajrin	19/06/2023 16:42:27 WIB
11 H. Hasan Basri	19/06/2023 16:42:59 WIB
12 Albir Abdi	19/06/2023 16:43:49 WIB
13 M. Heikal Akmal	19/06/2023 16:44:40 WIB
14 Joki Mardison	19/06/2023 16:44:53 WIB
15 Arni Dasrianti	19/06/2023 16:45:16 WIB
16 Fathurian Ramadhan	19/06/2023 16:59:44 WIB
17 Ratna Juita Yakoeb	19/06/2023 16:59:44 WIB
18 Azrul Saleh Rumata	19/06/2023 17:04:02 WIB
19 H. Awaluddin Sibarani	19/06/2023 17:04:52 WIB
20 Aminuddin	19/06/2023 17:05:35 WIB
21 Muhammad Idris	19/06/2023 17:08:02 WIB
22 Rusli	19/06/2023 17:09:06 WIB

23 H. Yanuar Amnur	19/06/2023 17:14:01 WIB
24 Abdullah	19/06/2023 17:17:15 WIB
25 HERMAN LATABE	19/06/2023 17:17:33 WIB
26 Diah Sutarsih	19/06/2023 17:17:44 WIB
27 Arman Muis	19/06/2023 17:19:30 WIB
28 DIANSYAH PUTRA	19/06/2023 17:21:19 WIB
29 SOLAHUDDIN	19/06/2023 17:21:37 WIB
30 MUHAMMAD NAMRI	19/06/2023 17:21:39 WIB
31 Diah Yudiastuti	19/06/2023 17:21:54 WIB
32 Triana Widya Wijayanti	19/06/2023 17:23:07 WIB
33 Nurul Fajar Rozyqin	19/06/2023 17:32:41 WIB
34 Poppy Rezki Adiatma	19/06/2023 17:33:11 WIB
35 MAHDI PANA	19/06/2023 17:33:24 WIB
36 Saiful Sabit Assidik	19/06/2023

	17:33:46 WIB
37 ERON NORMANDIA BACHSIN	19/06/2023 17:34:04 WIB
38 Aspihani	19/06/2023 17:35:14 WIB
39 Caesar Sophan Aditya	19/06/2023 17:36:09 WIB
40 Yessi Yuga Puspita	19/06/2023 17:36:54 WIB
41 Yudi Setiawan	19/06/2023 17:38:00 WIB
42 Arifa Mutiara	19/06/2023 17:43:58 WIB
43 Irfan Febrianto	19/06/2023 18:00:24 WIB
44 Muhammad Mir Purnama	19/06/2023 18:02:36 WIB
45 Supriyadi	19/06/2023 18:06:12 WIB
46 Nyimas Nining Rachman	19/06/2023 18:30:14 WIB
47 Juardi Ardiansah	19/06/2023 18:48:57 WIB
48 Mohammad Fauzie Dianjaya	19/06/2023 19:07:52 WIB
49 Mirza Kamal	19/06/2023 19:08:36 WIB
50 Afifa Resti Pradita	

	19/06/2023 19:11:24 WIB
51 Imran Harahap	19/06/2023 19:11:41 WIB
52 Nur Afifah	19/06/2023 19:11:48 WIB
53 Arifa Mutiara	19/06/2023 19:11:59 WIB
54 Susi Rahayu	19/06/2023 19:12:21 WIB
55 Muhammad Arfah	19/06/2023 19:13:51 WIB
56 Basuki	19/06/2023 19:14:20 WIB
57 Sri Mulyana	19/06/2023 19:14:44 WIB
58 Sri Mulyana	19/06/2023 19:14:44 WIB
59 Sri Mulyana	19/06/2023 19:14:56 WIB
60 Januari Marianie	19/06/2023 19:14:57 WIB
61 Evi Pratiwi Handayani	19/06/2023 19:14:59 WIB
62 Lis Purwanti	19/06/2023 19:15:10 WIB
63 Muhamad Ahsan	19/06/2023 19:15:14 WIB

64 Eti Yuliati	19/06/2023 19:17:02 WIB
65 MUHAMMAD IQBAL	19/06/2023 19:17:26 WIB
66 Yusniar Cecilia	19/06/2023 19:17:33 WIB
67 Safril Partang	19/06/2023 19:18:37 WIB
68 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:20:39 WIB
69 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:20:39 WIB
70 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:20:39 WIB
71 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:20:39 WIB
72 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:20:39 WIB
73 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:20:39 WIB
74 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:20:39 WIB
75 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:20:39 WIB
76 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:20:39 WIB
77 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023

	19:20:39 WIB
78 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:20:39 WIB
79 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:20:39 WIB
80 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:20:39 WIB
81 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:20:39 WIB
82 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:20:39 WIB
83 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:20:39 WIB
84 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:20:39 WIB
85 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:20:39 WIB
86 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:20:39 WIB
87 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:20:39 WIB
88 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:20:39 WIB
89 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:20:39 WIB
90 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:21:22 WIB
91 Zaldi Heriwan	

	19/06/2023 19:22:28 WIB
92 Muhammad Riano Pertama	19/06/2023 19:22:29 WIB
93 Doriangat Pakpahan	19/06/2023 19:23:08 WIB
94 GATOT PRIADI	19/06/2023 19:23:32 WIB
95 Siti Dermawan Situmorang	19/06/2023 19:23:56 WIB
96 Faiz Alkautsar	19/06/2023 19:23:58 WIB
97 Lebrata	19/06/2023 19:23:59 WIB
98 Muhammad Fakhrol Azmi	19/06/2023 19:25:07 WIB
99 Armansah	19/06/2023 19:25:46 WIB
100 Gregorius Welly Agung Poy	19/06/2023 19:26:06 WIB
101 Yulius Nur	19/06/2023 19:29:35 WIB
102 Farlaini	19/06/2023 19:30:06 WIB
103 Boris Dianjaya	19/06/2023 19:32:16 WIB
104 Irfan Nauval El Hassan	19/06/2023 19:32:31 WIB

105 Gregorius Matrecano	19/06/2023 19:32:33 WIB
106 Aris Maryani	19/06/2023 19:36:16 WIB
107 Rita Sahagia	19/06/2023 19:43:01 WIB
108 Susanto	19/06/2023 19:49:06 WIB
109 Asrul Bin Usman	19/06/2023 19:51:25 WIB
110 DENY RISMAWAN	19/06/2023 19:55:56 WIB
111 Moh. Nugrah	19/06/2023 19:56:35 WIB
112 Jamali	19/06/2023 19:58:04 WIB
113 Yani Hakim	19/06/2023 20:01:04 WIB
114 Mohammad Isa Litiloly	19/06/2023 21:00:29 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Mohammad Fauzie Dianjaya	19/06/2023 19:08:01 WIB
2	Mirza Kamal	

	19/06/2023 19:08:42 WIB
3 Muhammad Idris	19/06/2023 19:09:26 WIB
4 Abu Anas	19/06/2023 19:10:38 WIB
5 ERON NORMANDIA BACHSIN	19/06/2023 19:10:56 WIB
6 Afifa Resti Pradita	19/06/2023 19:11:33 WIB
7 Deny Boy	19/06/2023 19:11:36 WIB
8 Nur Afifah	19/06/2023 19:11:52 WIB
9 Imran Harahap	19/06/2023 19:11:53 WIB
10 Arifa Mutiara	19/06/2023 19:12:02 WIB
11 MUHAMMAD NAMRI	19/06/2023 19:12:39 WIB
12 Muhammad Arfah	19/06/2023 19:14:04 WIB
13 Arman Muis	19/06/2023 19:14:09 WIB
14 Joki Mardison	19/06/2023 19:14:44 WIB
15 Basuki	19/06/2023 19:14:44 WIB

16 Joki Mardison	19/06/2023 19:14:44 WIB
17 Joki Mardison	19/06/2023 19:14:44 WIB
18 Sri Mulyana	19/06/2023 19:15:00 WIB
19 Triana Widya Wijayanti	19/06/2023 19:15:04 WIB
20 Evi Pratiwi Handayani	19/06/2023 19:15:06 WIB
21 Januari Marianie	19/06/2023 19:15:08 WIB
22 Arni Dasrianti	19/06/2023 19:15:11 WIB
23 Diah Yudiastuti	19/06/2023 19:15:13 WIB
24 Lis Purwanti	19/06/2023 19:15:15 WIB
25 H. Yanuar Amnur	19/06/2023 19:15:19 WIB
26 Poppy Rezki Adiatma	19/06/2023 19:15:20 WIB
27 H. Hasan Basri	19/06/2023 19:16:24 WIB
28 H. Hasan Basri	19/06/2023 19:16:24 WIB
29 H. Hasan Basri	19/06/2023

	19:16:24 WIB
30 H. Hasan Basri	19/06/2023 19:16:25 WIB
31 H. Hasan Basri	19/06/2023 19:16:25 WIB
32 H. Hasan Basri	19/06/2023 19:16:25 WIB
33 H. Hasan Basri	19/06/2023 19:16:25 WIB
34 Muhamad Ahsan	19/06/2023 19:16:25 WIB
35 Muhamad Ahsan	19/06/2023 19:16:25 WIB
36 Fathurian Ramadhan	19/06/2023 19:16:38 WIB
37 Rusli	19/06/2023 19:16:43 WIB
38 Rusli	19/06/2023 19:17:02 WIB
39 Eti Yuliaty	19/06/2023 19:17:02 WIB
40 Abdullah	19/06/2023 19:17:12 WIB
41 Aspihani	19/06/2023 19:17:14 WIB
42 YUSRIL MARICAR	19/06/2023 19:17:16 WIB
43 Saiful Sabit Assidik	

	19/06/2023 19:17:28 WIB
44 MUHAMMAD IQBAL	19/06/2023 19:17:34 WIB
45 Nurul Fajar Rozyqin	19/06/2023 19:18:32 WIB
46 MAHDI PANA	19/06/2023 19:18:32 WIB
47 MAHDI PANA	19/06/2023 19:18:32 WIB
48 MAHDI PANA	19/06/2023 19:18:32 WIB
49 MAHDI PANA	19/06/2023 19:18:32 WIB
50 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:20:39 WIB
51 Safril Partang	19/06/2023 19:20:39 WIB
52 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:20:39 WIB
53 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:20:39 WIB
54 Muhammad Fajrin	19/06/2023 19:20:39 WIB
55 Muhammad Fajrin	19/06/2023 19:20:39 WIB
56 Muhammad Fajrin	19/06/2023 19:20:39 WIB

57 Yudi Setiawan	19/06/2023 19:20:39 WIB
58 Neneng Iceu Candrawati	19/06/2023 19:21:22 WIB
59 Yessi Yuga Puspita	19/06/2023 19:21:32 WIB
60 Albir Abdi	19/06/2023 19:21:34 WIB
61 Diah Sutarsih	19/06/2023 19:21:43 WIB
62 Irfan Febrianto	19/06/2023 19:22:17 WIB
63 Zaldi Heriwan	19/06/2023 19:22:32 WIB
64 Muhammad Riano Pertama	19/06/2023 19:22:34 WIB
65 Doriangat Pakpahan	19/06/2023 19:23:13 WIB
66 M. Heikal Akmal	19/06/2023 19:23:21 WIB
67 Faiz Alkautsar	19/06/2023 19:24:07 WIB
68 Lebrata	19/06/2023 19:24:07 WIB
69 Siti Dermawan Situmorang	19/06/2023 19:24:20 WIB
70 Azrul Saleh Rumata	19/06/2023

	19:24:24 WIB
71 Muhammad Fakhrol Azmi	19/06/2023 19:25:10 WIB
72 Armansah	19/06/2023 19:25:56 WIB
73 Gregorius Welly Agung Poy	19/06/2023 19:26:30 WIB
74 Aminuddin	19/06/2023 19:28:19 WIB
75 Aminuddin	19/06/2023 19:28:20 WIB
76 Yulius Nur	19/06/2023 19:29:42 WIB
77 Farlaini	19/06/2023 19:30:15 WIB
78 Yudi Setiawan	19/06/2023 19:30:20 WIB
79 Boris Dianjaya	19/06/2023 19:32:20 WIB
80 Gregorius Matrecano	19/06/2023 19:32:36 WIB
81 Irfan Nauval El Hassan	19/06/2023 19:32:37 WIB
82 H. Awaluddin Sibarani	19/06/2023 19:33:59 WIB
83 M. AFIAT HARIPAI	19/06/2023 19:34:48 WIB
84 Juardi Ardiansah	

	19/06/2023 19:36:17 WIB
85 Aris Maryani	19/06/2023 19:36:25 WIB
86 Rita Sahagia	19/06/2023 19:43:20 WIB
87 Caesar Sophan Aditya	19/06/2023 19:48:39 WIB
88 Susanto	19/06/2023 19:49:09 WIB
89 Asrul Bin Usman	19/06/2023 19:51:28 WIB
90 Susi Rahayu	19/06/2023 19:52:24 WIB
91 Samsabastian	19/06/2023 19:54:46 WIB
92 HERMAN LATABE	19/06/2023 19:55:26 WIB
93 DENY RISMAWAN	19/06/2023 19:56:13 WIB
94 Moh. Nugrah	19/06/2023 19:56:38 WIB
95 Jamali	19/06/2023 19:58:11 WIB
96 Supriyadi	19/06/2023 20:00:45 WIB
97 Yani Hakim	19/06/2023 20:01:08 WIB

98 Nyimas Nining Rachman	19/06/2023 20:03:28 WIB
99 Syaifudin	19/06/2023 20:28:11 WIB
100 Mohammad Isa Litiloly	19/06/2023 21:00:18 WIB
101 Muhammad Mir Purnama	19/06/2023 21:12:59 WIB

Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Joki Mardison	20/06/2023 07:38:47 WIB
2	Joki Mardison	20/06/2023 07:38:47 WIB
3	Nur Afifah	20/06/2023 07:39:31 WIB
4	Afifa Resti Pradita	20/06/2023 07:39:37 WIB
5	Imran Harahap	20/06/2023 07:40:53 WIB
6	Susi Rahayu	20/06/2023 07:41:33 WIB
7	Armansah	20/06/2023 07:44:38 WIB
8	Fathurian Ramadhan	

	20/06/2023 07:44:52 WIB
9 Sri Mulyana	20/06/2023 07:45:25 WIB
10 Ajat Sudrajat	20/06/2023 07:45:28 WIB
11 Diah Yudiastuti	20/06/2023 07:45:41 WIB
12 Aspihani	20/06/2023 07:46:11 WIB
13 Rusli	20/06/2023 07:46:30 WIB
14 Muhammad Fakhrol Azmi	20/06/2023 07:47:56 WIB
15 Poppy Rezki Adiatma	20/06/2023 07:48:52 WIB
16 Nyimas Nining Rachman	20/06/2023 07:49:25 WIB
17 Muhammad Arfah	20/06/2023 07:49:34 WIB
18 Mohammad Fauzie Dianjaya	20/06/2023 07:49:51 WIB
19 Abdullah	20/06/2023 07:49:55 WIB
20 ERON NORMANDIA BACHSIN	20/06/2023 07:49:57 WIB
21 Basuki	20/06/2023 07:50:03 WIB

22 Aminuddin	20/06/2023 07:50:09 WIB
23 Gregorius Matrecano	20/06/2023 07:50:13 WIB
24 H. Yanuar Amnur	20/06/2023 07:50:30 WIB
25 Evi Pratiwi Handayani	20/06/2023 07:50:32 WIB
26 Juardi Ardiansah	20/06/2023 07:50:45 WIB
27 MAHDI PANA	20/06/2023 07:50:51 WIB
28 Deny Boy	20/06/2023 07:51:20 WIB
29 H. Awaluddin Sibarani	20/06/2023 07:51:36 WIB
30 Neneng Iceu Candrawati	20/06/2023 07:51:47 WIB
31 MUHAMMAD NAMRI	20/06/2023 07:51:50 WIB
32 Syaifudin	20/06/2023 07:52:04 WIB
33 GATOT PRIADI	20/06/2023 07:52:15 WIB
34 Mirza Kamal	20/06/2023 07:52:39 WIB
35 Diah Sutarsih	20/06/2023

	07:53:04 WIB
36 M. Heikal Akmal	20/06/2023 07:53:31 WIB
37 Ahmad Loji	20/06/2023 07:54:14 WIB
38 Rita Sahagia	20/06/2023 07:54:14 WIB
39 Boris Dianjaya	20/06/2023 07:54:22 WIB
40 Gregorius Welly Agung Poy	20/06/2023 07:54:33 WIB
41 Aris Maryani	20/06/2023 07:54:55 WIB
42 Muhamad Ahsan	20/06/2023 07:55:18 WIB
43 Lebrata	20/06/2023 07:55:20 WIB
44 Arni Dasrianti	20/06/2023 07:55:27 WIB
45 Eti Yuliaty	20/06/2023 07:55:30 WIB
46 Arman Muis	20/06/2023 07:55:36 WIB
47 H. Hasan Basri	20/06/2023 07:55:40 WIB
48 Susanto	20/06/2023 07:55:42 WIB
49 Ratna Juita Yakoeb	

	20/06/2023 07:55:52 WIB
50 Abu Anas	20/06/2023 07:56:07 WIB
51 Doriangat Pakpahan	20/06/2023 07:56:39 WIB
52 Yudi Setiawan	20/06/2023 07:56:49 WIB
53 Saiful Sabit Assidik	20/06/2023 07:56:49 WIB
54 Alfian Trenggana	20/06/2023 07:56:55 WIB
55 Moh. Nugrah	20/06/2023 07:57:24 WIB
56 Nurmala	20/06/2023 07:57:44 WIB
57 Yessi Yuga Puspita	20/06/2023 07:57:58 WIB
58 Caesar Sophan Aditya	20/06/2023 07:58:03 WIB
59 YUSRIL MARICAR	20/06/2023 07:58:16 WIB
60 DIANSYAH PUTRA	20/06/2023 07:58:25 WIB
61 Yani Hakim	20/06/2023 07:58:27 WIB
62 Azrul Saleh Rumata	20/06/2023 07:58:40 WIB

63 Omisah	20/06/2023 07:58:46 WIB
64 Zaldi Heriwan	20/06/2023 07:59:00 WIB
65 Irfan Febrianto	20/06/2023 07:59:08 WIB
66 Safril Partang	20/06/2023 07:59:15 WIB
67 Farlaini	20/06/2023 07:59:30 WIB
68 Yoga Pranata	20/06/2023 07:59:38 WIB
69 H. Kasbiransyah	20/06/2023 07:59:49 WIB
70 Arifa Mutiara	20/06/2023 07:59:57 WIB
71 Yulius Nur	20/06/2023 08:00:07 WIB
72 Asrul Bin Usman	20/06/2023 08:00:41 WIB
73 Hamidah Yacoub	20/06/2023 08:00:50 WIB
74 Muhammad Idris	20/06/2023 08:01:19 WIB
75 Nurul Fajar Rozyqin	20/06/2023 08:01:46 WIB
76 MUHAMMAD IQBAL	20/06/2023

	08:01:50 WIB
77 Albir Abdi	20/06/2023 08:06:20 WIB
78 Lis Purwanti	20/06/2023 08:08:49 WIB
79 Faiz Alkautsar	20/06/2023 08:12:27 WIB
80 Samsabastian	20/06/2023 08:21:34 WIB
81 Yusniar Cecilia	20/06/2023 08:23:28 WIB
82 Januari Marianie	20/06/2023 08:24:29 WIB
83 Irfan Nauval El Hassan	20/06/2023 08:24:54 WIB
84 M. AFIAT HARIPAI	20/06/2023 08:25:17 WIB
85 Mohammad Isa Litololy	20/06/2023 08:26:05 WIB
86 Tahir	20/06/2023 08:29:18 WIB
87 HERMAN LATABE	20/06/2023 08:31:22 WIB
88 DENY RISMAWAN	20/06/2023 08:33:38 WIB
89 Supriyadi	20/06/2023 08:35:40 WIB
90 NS. Aji Martono	

	20/06/2023 08:35:59 WIB
91 Bambang Sudiono	20/06/2023 08:49:34 WIB
92 Mar'ie	20/06/2023 08:52:53 WIB
93 DEGA KAUTSAR PRADANA	20/06/2023 08:53:37 WIB
94 M. IQBAL SUMARLAN PUTRA	20/06/2023 08:53:58 WIB
95 Muhammad Fajrin	20/06/2023 09:00:00 WIB
96 R Lina Kurniasari	20/06/2023 09:44:14 WIB
97 Triana Widya Wijayanti	20/06/2023 09:45:54 WIB
98 Muhammad Mir Purnama	20/06/2023 09:51:52 WIB
99 Bambang Papuadi	20/06/2023 09:53:55 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Zulkarnain Muslim Asrialdo	20/06/2023 10:01:12 WIB
2	Albir Abdi	20/06/2023

	10:04:23 WIB
3 Revani Dina Fitra	20/06/2023 10:11:51 WIB
4 Erwin Wenda	20/06/2023 10:12:54 WIB
5 MAHDI PANA	20/06/2023 10:13:28 WIB
6 Basuki	20/06/2023 10:15:40 WIB
7 Muhammad Syaifulloh	20/06/2023 10:15:46 WIB
8 MEDI AFRIZAL	20/06/2023 10:16:27 WIB
9 Deny Boy	20/06/2023 10:17:08 WIB
10 Muhammad Arfah	20/06/2023 10:17:22 WIB
11 Zaldi Heriwan	20/06/2023 10:17:54 WIB
12 Aspihani	20/06/2023 10:20:19 WIB
13 YUSRIL MARICAR	20/06/2023 10:20:24 WIB
14 MUHAMMAD NAMRI	20/06/2023 10:20:37 WIB
15 Yudi Setiawan	20/06/2023 10:20:40 WIB
16 DENY RISMAWAN	

	20/06/2023 10:20:44 WIB
17 Alfian Trenggana	20/06/2023 10:20:45 WIB
18 Muhamad Ahsan	20/06/2023 10:20:58 WIB
19 Iis Rosmeria	20/06/2023 10:21:12 WIB
20 Nur Afifah	20/06/2023 10:21:13 WIB
21 HERMAN LATABE	20/06/2023 10:21:19 WIB
22 H. Awaluddin Sibarani	20/06/2023 10:21:39 WIB
23 Lis Purwanti	20/06/2023 10:21:40 WIB
24 Muhammad Fakhrol Azmi	20/06/2023 10:21:47 WIB
25 Abu Anas	20/06/2023 10:21:49 WIB
26 Abu Anas	20/06/2023 10:21:50 WIB
27 Abdullah	20/06/2023 10:21:59 WIB
28 Poppy Rezki Adiatma	20/06/2023 10:22:08 WIB
29 Arman Muis	20/06/2023 10:22:11 WIB

30 Afifa Resti Pradita	20/06/2023 10:22:13 WIB
31 Muhammad Idris	20/06/2023 10:22:28 WIB
32 Susi Rahayu	20/06/2023 10:22:29 WIB
33 Sri Mulyana	20/06/2023 10:22:34 WIB
34 M. IQBAL SUMARLAN PUTRA	20/06/2023 10:22:41 WIB
35 Yoga Pranata	20/06/2023 10:22:44 WIB
36 Joki Mardison	20/06/2023 10:22:50 WIB
37 GATOT PRIADI	20/06/2023 10:22:58 WIB
38 Arifa Mutiara	20/06/2023 10:23:00 WIB
39 Arni Dasrianti	20/06/2023 10:23:05 WIB
40 H. Yanuar Amnur	20/06/2023 10:23:11 WIB
41 ERON NORMANDIA BACHSIN	20/06/2023 10:23:20 WIB
42 Yulius Nur	20/06/2023 10:23:21 WIB
43 Diah Sutarsih	20/06/2023

	10:23:35 WIB
44 Sri Mulyana	20/06/2023 10:23:37 WIB
45 Mirza Kamal	20/06/2023 10:23:38 WIB
46 Safril Partang	20/06/2023 10:23:51 WIB
47 Evi Pratiwi Handayani	20/06/2023 10:23:51 WIB
48 R Lina Kurniasari	20/06/2023 10:24:07 WIB
49 Samsabastian	20/06/2023 10:24:07 WIB
50 DEGA KAUTSAR PRADANA	20/06/2023 10:24:08 WIB
51 Nyimas Nining Rachman	20/06/2023 10:24:16 WIB
52 Mohammad Fauzie Dianjaya	20/06/2023 10:24:23 WIB
53 Mohammad Fauzie Dianjaya	20/06/2023 10:24:24 WIB
54 Farlaini	20/06/2023 10:24:40 WIB
55 Diah Yudiasuti	20/06/2023 10:24:42 WIB
56 Era Marzuki	20/06/2023 10:24:45 WIB
57 Yessi Yuga Puspita	

	20/06/2023 10:24:54 WIB
58 Triana Widya Wijayanti	20/06/2023 10:25:04 WIB
59 Juardi Ardiansah	20/06/2023 10:25:10 WIB
60 Ratna Juita Yakoeb	20/06/2023 10:25:11 WIB
61 Omisah	20/06/2023 10:25:11 WIB
62 Imran Harahap	20/06/2023 10:25:12 WIB
63 Diah Yudiastuti	20/06/2023 10:25:18 WIB
64 Diah Yudiastuti	20/06/2023 10:25:18 WIB
65 Bambang Papuadi	20/06/2023 10:25:20 WIB
66 Aminuddin	20/06/2023 10:25:28 WIB
67 H. Kasbiransyah	20/06/2023 10:25:30 WIB
68 NOVEL YENIAPUT WETAPO	20/06/2023 10:25:45 WIB
69 Rusli	20/06/2023 10:25:47 WIB
70 Saiful Sabit Assidik	20/06/2023 10:26:17 WIB

71 Azrul Saleh Rumata	20/06/2023 10:26:36 WIB
72 Moh. Nugrah	20/06/2023 10:27:00 WIB
73 Yusniar Cecilia	20/06/2023 10:27:17 WIB
74 Armansah	20/06/2023 10:27:56 WIB
75 Januari Marianie	20/06/2023 10:28:03 WIB
76 Gregorius Welly Agung Poy	20/06/2023 10:28:39 WIB
77 Muhammad Fajrin	20/06/2023 10:29:03 WIB
78 Boris Dianjaya	20/06/2023 10:29:07 WIB
79 Harsuyana Dahlina Lubis	20/06/2023 10:29:34 WIB
80 H. Hasan Basri	20/06/2023 10:29:55 WIB
81 Eti Yuliati	20/06/2023 10:29:55 WIB
82 SOLAHUDDIN	20/06/2023 10:30:14 WIB
83 MUHAMMAD IQBAL	20/06/2023 10:30:19 WIB
84 Rita Sahagia	20/06/2023

	10:31:06 WIB
85 M. Heikal Akmal	20/06/2023 10:31:14 WIB
86 Syaifudin	20/06/2023 10:31:57 WIB
87 DIANSYAH PUTRA	20/06/2023 10:32:41 WIB
88 Siti Dermawan Situmorang	20/06/2023 10:33:42 WIB
89 Muhammad Riano Pertama	20/06/2023 10:33:55 WIB
90 Supriyadi	20/06/2023 10:34:38 WIB
91 Gregorius Matrecano	20/06/2023 10:34:41 WIB
92 Faiz Alkautsar	20/06/2023 10:37:04 WIB
93 Aris Maryani	20/06/2023 10:37:43 WIB
94 Bambang Sudiono	20/06/2023 10:37:56 WIB
95 Fathurian Ramadhan	20/06/2023 10:39:10 WIB
96 NS. Aji Martono	20/06/2023 10:39:11 WIB
97 Mar'ie	20/06/2023 10:39:53 WIB
98 Nurul Fajar Rozyqin	

	20/06/2023 10:39:53 WIB
99 Caesar Sophan Aditya	20/06/2023 10:42:52 WIB
100 Hilman Indra	20/06/2023 10:45:26 WIB
101 Muhammad Ramdhani	20/06/2023 10:48:46 WIB
102 Asrul Bin Usman	20/06/2023 10:54:25 WIB
103 Yanuar Syarif	20/06/2023 10:57:04 WIB
104 Kiagus Ahmad Basuni Firmansyah	20/06/2023 10:57:47 WIB
105 Susanto	20/06/2023 11:04:57 WIB
106 M. AFIAT HARIPAI	20/06/2023 11:05:30 WIB
107 Mohammad Isa Litololy	20/06/2023 11:08:45 WIB
108 Ahmad Loji	20/06/2023 11:12:12 WIB
109 Tahir	20/06/2023 11:12:51 WIB
110 Nurmala	20/06/2023 11:14:32 WIB
111 Irfan Nauval El Hassan	20/06/2023 11:33:29 WIB

112 Yani Hakim	20/06/2023 11:47:30 WIB
113 Irfan Febrianto	20/06/2023 12:02:49 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Muhammad Arfah	20/06/2023 13:04:05 WIB
2	Sukandi	20/06/2023 13:04:16 WIB
3	Susi Rahayu	20/06/2023 13:06:32 WIB
4	Armansah	20/06/2023 13:06:47 WIB
5	MAHDI PANA	20/06/2023 13:08:28 WIB
6	ERON NORMANDIA BACHSIN	20/06/2023 13:08:34 WIB
7	Joki Mardison	20/06/2023 13:08:42 WIB
8	Imran Harahap	20/06/2023 13:09:02 WIB
9	DENY RISMAWAN	20/06/2023 13:09:26 WIB
10	Safiril Partang	20/06/2023

	13:09:34 WIB
11 Bambang Sudiono	20/06/2023 13:09:47 WIB
12 Revani Dina Fitra	20/06/2023 13:09:50 WIB
13 Mar'ie	20/06/2023 13:10:12 WIB
14 Lis Purwanti	20/06/2023 13:10:14 WIB
15 Aminuddin	20/06/2023 13:10:21 WIB
16 Deny Boy	20/06/2023 13:10:42 WIB
17 Era Marzuki	20/06/2023 13:11:25 WIB
18 Basuki	20/06/2023 13:11:58 WIB
19 Albir Abdi	20/06/2023 13:12:08 WIB
20 H. Awaluddin Sibarani	20/06/2023 13:12:09 WIB
21 HERMAN LATABE	20/06/2023 13:12:15 WIB
22 Moh. Nugrah	20/06/2023 13:13:00 WIB
23 R Lina Kurniasari	20/06/2023 13:13:02 WIB
24 Juardi Ardiansah	

	20/06/2023 13:13:31 WIB
25 Iis Rosmeria	20/06/2023 13:13:36 WIB
26 Muhammad Fakhrol Azmi	20/06/2023 13:14:05 WIB
27 Aspihani	20/06/2023 13:14:17 WIB
28 DEGA KAUTSAR PRADANA	20/06/2023 13:15:17 WIB
29 M. IQBAL SUMARLAN PUTRA	20/06/2023 13:15:18 WIB
30 Nurul Fajar Rozyqin	20/06/2023 13:15:25 WIB
31 Muhammad Fajrin	20/06/2023 13:15:49 WIB
32 H. Hasan Basri	20/06/2023 13:15:52 WIB
33 Saiful Sabit Assidik	20/06/2023 13:16:10 WIB
34 Nyimas Nining Rachman	20/06/2023 13:16:17 WIB
35 DIANSYAH PUTRA	20/06/2023 13:16:26 WIB
36 Hamidah Yacoub	20/06/2023 13:16:30 WIB
37 GATOT PRIADI	20/06/2023 13:16:30 WIB

38 Abu Anas	20/06/2023 13:16:44 WIB
39 Sri Mulyana	20/06/2023 13:16:49 WIB
40 Afifa Resti Pradita	20/06/2023 13:17:28 WIB
41 Nur Afifah	20/06/2023 13:17:28 WIB
42 Nur Afifah	20/06/2023 13:17:28 WIB
43 Diah Yudiastuti	20/06/2023 13:17:33 WIB
44 Muhamad Ahsan	20/06/2023 13:17:40 WIB
45 Mohammad Fauzie Dianjaya	20/06/2023 13:18:05 WIB
46 Farlaini	20/06/2023 13:19:02 WIB
47 Evi Pratiwi Handayani	20/06/2023 13:19:29 WIB
48 Gregorius Welly Agung Poy	20/06/2023 13:19:30 WIB
49 Sri Mulyana	20/06/2023 13:20:23 WIB
50 Muhammad Syaifulloh	20/06/2023 13:20:27 WIB
51 Samsabastian	20/06/2023

	13:20:27 WIB
52 NS. Aji Martono	20/06/2023 13:20:31 WIB
53 Fathurian Ramadhan	20/06/2023 13:20:50 WIB
54 Triana Widya Wijayanti	20/06/2023 13:21:13 WIB
55 Supriyadi	20/06/2023 13:21:35 WIB
56 Zaldi Heriwan	20/06/2023 13:21:38 WIB
57 Boris Dianjaya	20/06/2023 13:21:44 WIB
58 Januari Marianie	20/06/2023 13:22:02 WIB
59 Alfian Trenggana	20/06/2023 13:22:02 WIB
60 Yoga Pranata	20/06/2023 13:22:23 WIB
61 Yusniar Cecilia	20/06/2023 13:23:03 WIB
62 Mohammad Isa Litololy	20/06/2023 13:23:03 WIB
63 Doriangat Pakpahan	20/06/2023 13:23:04 WIB
64 H. Yanuar Amnur	20/06/2023 13:23:05 WIB
65 Poppy Rezki Adiatma	

	20/06/2023 13:23:18 WIB
66 MUHAMMAD NAMRI	20/06/2023 13:23:24 WIB
67 Yulius Nur	20/06/2023 13:23:26 WIB
68 Susanto	20/06/2023 13:23:39 WIB
69 Rusli	20/06/2023 13:23:42 WIB
70 YUSRIL MARICAR	20/06/2023 13:24:05 WIB
71 Yessi Yuga Puspita	20/06/2023 13:24:33 WIB
72 Arifa Mutiara	20/06/2023 13:24:35 WIB
73 H. Kasbiransyah	20/06/2023 13:24:35 WIB
74 Ahmad Loji	20/06/2023 13:24:38 WIB
75 Arman Muis	20/06/2023 13:24:48 WIB
76 Lebrata	20/06/2023 13:25:06 WIB
77 Muhammad Riano Pertama	20/06/2023 13:25:06 WIB
78 Ratna Juita Yakoeb	20/06/2023 13:25:19 WIB

79 Gregorius Matrecano	20/06/2023 13:25:29 WIB
80 Abdullah	20/06/2023 13:25:36 WIB
81 Nurmala	20/06/2023 13:25:37 WIB
82 Yani Hakim	20/06/2023 13:25:57 WIB
83 Seprayogi Linel	20/06/2023 13:26:04 WIB
84 Arni Dasrianti	20/06/2023 13:26:10 WIB
85 Bambang Papuadi	20/06/2023 13:26:19 WIB
86 Muhammad Ramdhani	20/06/2023 13:28:38 WIB
87 Siti Dermawan Situmorang	20/06/2023 13:28:39 WIB
88 Diah Sutarsih	20/06/2023 13:29:18 WIB
89 Diah Sutarsih	20/06/2023 13:29:18 WIB
90 Syaifudin	20/06/2023 13:30:26 WIB
91 Eti Yuliaty	20/06/2023 13:31:40 WIB
92 Yudi Setiawan	20/06/2023

	13:32:22 WIB
93 Irfan Febrianto	20/06/2023 13:32:49 WIB
94 Neneng Iceu Candrawati	20/06/2023 13:32:50 WIB
95 Kiagus Ahmad Basuni Firmansyah	20/06/2023 13:33:47 WIB
96 Rita Sahagia	20/06/2023 13:33:54 WIB
97 Zulkarnain Muslim Asrialdo	20/06/2023 13:34:29 WIB
98 Tahir	20/06/2023 13:34:53 WIB
99 Yanuar Syarif	20/06/2023 13:35:15 WIB
100 M. AFIAT HARIPAI	20/06/2023 13:35:24 WIB
101 Aris Maryani	20/06/2023 13:36:51 WIB
102 NOVEL YENIAPUT WETAPO	20/06/2023 13:37:02 WIB
103 Khairani	20/06/2023 13:37:32 WIB
104 Azrul Saleh Rumata	20/06/2023 13:37:36 WIB
105 MUHAMMAD IQBAL	20/06/2023 13:37:37 WIB
106 MEDI AFRIZAL	

	20/06/2023 13:37:49 WIB
107 M. Heikal Akmal	20/06/2023 13:40:24 WIB
108 Faiz Alkautsar	20/06/2023 13:42:49 WIB
109 Asrul Bin Usman	20/06/2023 13:43:07 WIB
110 Arifa Mutiara	20/06/2023 13:47:58 WIB
111 Nathalis Hisage	20/06/2023 13:48:06 WIB
112 Mirza Kamal	20/06/2023 13:51:38 WIB
113 Hilman Indra	20/06/2023 14:01:18 WIB
114 Omisah	20/06/2023 14:09:34 WIB
115 Irfan Nauval El Hassan	20/06/2023 14:10:00 WIB
116 Ajat Sudrajat	20/06/2023 14:11:31 WIB
117 Muhammad Mir Purnama	20/06/2023 14:12:19 WIB
118 Edy Abraham Sukmadi	20/06/2023 14:53:08 WIB
119 Caesar Sophan Aditya	20/06/2023 15:11:38 WIB

Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Sri Mulyana	21/06/2023 08:30:53 WIB
2	MUHAMMAD NAMRI	21/06/2023 08:31:15 WIB
3	Evi Pratiwi Handayani	21/06/2023 08:31:49 WIB
4	Muhammad Ramdhani	21/06/2023 08:31:56 WIB
5	Sri Mulyana	21/06/2023 08:32:05 WIB
6	Mohammad Isa Litoloy	21/06/2023 08:32:10 WIB
7	Lis Purwanti	21/06/2023 08:32:30 WIB
8	Revani Dina Fitra	21/06/2023 08:32:46 WIB
9	Yudi Setiawan	21/06/2023 08:33:15 WIB
10	DEGA KAUTSAR PRADANA	21/06/2023 08:33:31 WIB
11	Rita Sahagia	21/06/2023 08:33:42 WIB
12	Muhammad Fakhrol Azmi	

	21/06/2023 08:34:06 WIB
13 Zaldi Heriwan	21/06/2023 08:34:20 WIB
14 Boris Dianjaya	21/06/2023 08:34:23 WIB
15 Nur Afifah	21/06/2023 08:35:49 WIB
16 Juardi Ardiansah	21/06/2023 08:35:51 WIB
17 Deny Boy	21/06/2023 08:35:56 WIB
18 Mirza Kamal	21/06/2023 08:35:58 WIB
19 Susi Rahayu	21/06/2023 08:36:06 WIB
20 Aspihani	21/06/2023 08:36:06 WIB
21 MUHAMMAD IQBAL	21/06/2023 08:36:09 WIB
22 MAHDI PANA	21/06/2023 08:36:13 WIB
23 Ratna Juita Yakoeb	21/06/2023 08:36:23 WIB
24 Ratna Juita Yakoeb	21/06/2023 08:36:27 WIB
25 Ratna Juita Yakoeb	21/06/2023 08:36:29 WIB

26 Farlaini	21/06/2023 08:36:48 WIB
27 Ratna Juita Yakoeb	21/06/2023 08:36:54 WIB
28 MEDI AFRIZAL	21/06/2023 08:37:15 WIB
29 Muhammad Arfah	21/06/2023 08:37:29 WIB
30 Nurmala	21/06/2023 08:37:35 WIB
31 Joki Mardison	21/06/2023 08:37:43 WIB
32 Joki Mardison	21/06/2023 08:37:44 WIB
33 Diah Sutarsih	21/06/2023 08:38:11 WIB
34 Diah Sutarsih	21/06/2023 08:38:12 WIB
35 Imran Harahap	21/06/2023 08:38:15 WIB
36 Yoga Pranata	21/06/2023 08:38:25 WIB
37 Doriangat Pakpahan	21/06/2023 08:38:28 WIB
38 Aminuddin	21/06/2023 08:38:29 WIB
39 Fathurian Ramadhan	21/06/2023

	08:38:46 WIB
40 Gregorius Matrecano	21/06/2023 08:39:10 WIB
41 Basuki	21/06/2023 08:39:21 WIB
42 H. Yanuar Amnur	21/06/2023 08:39:51 WIB
43 M. IQBAL SUMARLAN PUTRA	21/06/2023 08:40:09 WIB
44 H. Hasan Basri	21/06/2023 08:40:13 WIB
45 Abu Anas	21/06/2023 08:40:19 WIB
46 Siti Dermawan Situmorang	21/06/2023 08:40:21 WIB
47 Albir Abdi	21/06/2023 08:40:24 WIB
48 Afifa Resti Pradita	21/06/2023 08:40:37 WIB
49 Yani Hakim	21/06/2023 08:40:37 WIB
50 Syaifudin	21/06/2023 08:40:38 WIB
51 Muhammad Mir Purnama	21/06/2023 08:40:43 WIB
52 Khairani	21/06/2023 08:40:46 WIB
53 Arman Muis	

	21/06/2023 08:40:49 WIB
54 GATOT PRIADI	21/06/2023 08:40:50 WIB
55 Neneng Iceu Candrawati	21/06/2023 08:40:54 WIB
56 Sukandi	21/06/2023 08:40:56 WIB
57 H. Kasbiransyah	21/06/2023 08:41:03 WIB
58 Arifa Mutiara	21/06/2023 08:41:06 WIB
59 Diah Yudiastuti	21/06/2023 08:41:10 WIB
60 Ahmad Loji	21/06/2023 08:41:41 WIB
61 YUSRIL MARICAR	21/06/2023 08:41:48 WIB
62 Gregorius Welly Agung Poy	21/06/2023 08:41:58 WIB
63 Mohammad Fauzie Dianjaya	21/06/2023 08:42:11 WIB
64 Mohammad Fauzie Dianjaya	21/06/2023 08:42:11 WIB
65 Mohammad Fauzie Dianjaya	21/06/2023 08:42:11 WIB
66 Mohammad Fauzie Dianjaya	21/06/2023 08:42:11 WIB

67 Mohammad Fauzie Dianjaya	21/06/2023 08:42:11 WIB
68 Bambang Sudiono	21/06/2023 08:42:28 WIB
69 Iis Rosmeria	21/06/2023 08:42:32 WIB
70 DIANSYAH PUTRA	21/06/2023 08:42:33 WIB
71 Safril Partang	21/06/2023 08:43:12 WIB
72 Abdullah	21/06/2023 08:43:15 WIB
73 Mar'ie	21/06/2023 08:43:25 WIB
74 Omisah	21/06/2023 08:43:30 WIB
75 Alfian Trenggana	21/06/2023 08:43:34 WIB
76 Muhamad Ahsan	21/06/2023 08:43:35 WIB
77 Lebrata	21/06/2023 08:44:49 WIB
78 Ajat Sudrajat	21/06/2023 08:45:09 WIB
79 Muhammad Idris	21/06/2023 08:45:29 WIB
80 Poppy Rezki Adiatma	21/06/2023

	08:45:33 WIB
81 Triana Widya Wijayanti	21/06/2023 08:45:38 WIB
82 Tahir	21/06/2023 08:45:51 WIB
83 Harsuyana Dahlina Lubis	21/06/2023 08:45:57 WIB
84 Saiful Sabit Assidik	21/06/2023 08:46:00 WIB
85 Kiagus Ahmad Basuni Firmansyah	21/06/2023 08:46:14 WIB
86 Muhammad Fajrin	21/06/2023 08:46:19 WIB
87 Nurul Fajar Rozyqin	21/06/2023 08:46:44 WIB
88 R Lina Kurniasari	21/06/2023 08:46:48 WIB
89 M. Heikal Akmal	21/06/2023 08:47:15 WIB
90 SOLAHUDDIN	21/06/2023 08:47:30 WIB
91 M. AFIAT HARIPAI	21/06/2023 08:47:37 WIB
92 Rusli	21/06/2023 08:48:09 WIB
93 Aris Maryani	21/06/2023 08:48:15 WIB
94 Caesar Sophan Aditya	

	21/06/2023 08:49:15 WIB
95 Armansah	21/06/2023 08:50:41 WIB
96 Muhammad Riano Pertama	21/06/2023 08:50:49 WIB
97 HERMAN LATABE	21/06/2023 08:50:59 WIB
98 Seprayogi Linel	21/06/2023 08:52:03 WIB
99 Asrul Bin Usman	21/06/2023 08:52:17 WIB
100 Yessi Yuga Puspita	21/06/2023 08:53:43 WIB
101 Azrul Saleh Rumata	21/06/2023 08:53:45 WIB
102 Muhammad Syaifulloh	21/06/2023 08:55:19 WIB
103 Samsabastian	21/06/2023 08:56:10 WIB
104 Eti Yuliati	21/06/2023 08:57:02 WIB
105 Moh. Nugrah	21/06/2023 08:57:20 WIB
106 Bambang Papuadi	21/06/2023 08:57:26 WIB
107 Hamidah Yacoub	21/06/2023 08:57:36 WIB

108 Nyimas Nining Rachman	21/06/2023 08:57:51 WIB
109 Arni Dasrianti	21/06/2023 08:58:22 WIB
110 Yulius Nur	21/06/2023 08:58:26 WIB
111 Yanuar Syarif	21/06/2023 08:58:42 WIB
112 Susanto	21/06/2023 08:59:42 WIB
113 DENY RISMAWAN	21/06/2023 09:00:04 WIB
114 Supriyadi	21/06/2023 09:00:09 WIB
115 Faiz Alkautsar	21/06/2023 09:01:45 WIB
116 NS. Aji Martono	21/06/2023 09:01:57 WIB
117 Januari Marianie	21/06/2023 09:02:46 WIB
118 Erwin Wenda	21/06/2023 09:05:28 WIB
119 Irfan Febrianto	21/06/2023 09:09:33 WIB
120 Irfan Nauval El Hassan	21/06/2023 09:17:03 WIB
121 H. Awaluddin Sibarani	21/06/2023

	09:27:39 WIB
122 ERON NORMANDIA BACHSIN	21/06/2023 09:37:22 WIB
123 Zulkarnain Muslim Asrialdo	21/06/2023 09:50:53 WIB
124 EKO PRAYITNO	21/06/2023 10:11:16 WIB
125 Hilman Indra	21/06/2023 10:18:37 WIB

Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Sukandi	21/06/2023 10:02:16 WIB
2	DIANSYAH PUTRA	21/06/2023 10:03:00 WIB
3	Aspihani	21/06/2023 10:03:41 WIB
4	Nyimas Nining Rachman	21/06/2023 10:06:10 WIB
5	Revani Dina Fitra	21/06/2023 10:07:17 WIB
6	Kiagus Ahmad Basuni Firmansyah	21/06/2023 10:07:21 WIB
7	H. Hasan Basri	21/06/2023 10:09:05 WIB

8 Iis Rosmeria	21/06/2023 10:10:05 WIB
9 R Lina Kurniasari	21/06/2023 10:10:40 WIB
10 EKO PRAYITNO	21/06/2023 10:12:11 WIB
11 Hilman Indra	21/06/2023 10:18:41 WIB
12 Susi Rahayu	21/06/2023 10:20:29 WIB
13 Zaldi Heriwan	21/06/2023 10:24:50 WIB
14 MEDI AFRIZAL	21/06/2023 10:25:07 WIB
15 MUHAMMAD IQBAL	21/06/2023 10:25:27 WIB
16 Sri Mulyana	21/06/2023 10:26:48 WIB
17 Muhammad Idris	21/06/2023 10:27:20 WIB
18 MUHAMMAD NAMRI	21/06/2023 10:27:43 WIB
19 Faiz Alkautsar	21/06/2023 10:28:00 WIB
20 Boris Dianjaya	21/06/2023 10:28:37 WIB
21 Ratna Juita Yakoeb	21/06/2023

	10:29:06 WIB
22 Mar'ie	21/06/2023 10:29:13 WIB
23 Hamidah Yacoub	21/06/2023 10:29:49 WIB
24 H. Yanuar Amnur	21/06/2023 10:29:51 WIB
25 Juardi Ardiansah	21/06/2023 10:30:14 WIB
26 Muhammad Arfah	21/06/2023 10:30:20 WIB
27 Neneng Iceu Candrawati	21/06/2023 10:30:24 WIB
28 Neneng Iceu Candrawati	21/06/2023 10:30:35 WIB
29 Afifa Resti Pradita	21/06/2023 10:30:38 WIB
30 Neneng Iceu Candrawati	21/06/2023 10:30:49 WIB
31 Farlaini	21/06/2023 10:31:01 WIB
32 Gregorius Matrecano	21/06/2023 10:31:04 WIB
33 Nur Afifah	21/06/2023 10:31:22 WIB
34 Rita Sahagia	21/06/2023 10:31:23 WIB
35 Irfan Febrianto	

	21/06/2023 10:31:28 WIB
36 Diah Yudiastuti	21/06/2023 10:31:56 WIB
37 Evi Pratiwi Handayani	21/06/2023 10:32:05 WIB
38 Lis Purwanti	21/06/2023 10:32:09 WIB
39 Nurmala	21/06/2023 10:32:29 WIB
40 Abdullah	21/06/2023 10:32:31 WIB
41 Siti Dermawan Situmorang	21/06/2023 10:32:39 WIB
42 Triana Widya Wijayanti	21/06/2023 10:32:44 WIB
43 Bambang Papuadi	21/06/2023 10:33:12 WIB
44 Irfan Nauval El Hassan	21/06/2023 10:33:12 WIB
45 Doriangat Pakpahan	21/06/2023 10:33:30 WIB
46 Januari Marianie	21/06/2023 10:33:48 WIB
47 Arni Dasrianti	21/06/2023 10:33:56 WIB
48 Albir Abdi	21/06/2023 10:35:34 WIB

49 Yulius Nur	21/06/2023 10:35:42 WIB
50 Muhamad Ahsan	21/06/2023 10:36:20 WIB
51 Rusli	21/06/2023 10:36:24 WIB
52 ERON NORMANDIA BACHSIN	21/06/2023 10:36:28 WIB
53 Diah Sutarsih	21/06/2023 10:36:56 WIB
54 Diah Sutarsih	21/06/2023 10:36:56 WIB
55 Arifa Mutiara	21/06/2023 10:36:59 WIB
56 Padil	21/06/2023 10:37:48 WIB
57 Muhammad Fajrin	21/06/2023 10:38:48 WIB
58 YUSRIL MARICAR	21/06/2023 10:40:09 WIB
59 Abu Anas	21/06/2023 10:41:49 WIB
60 Aris Maryani	21/06/2023 10:42:03 WIB
61 Muhammad Riano Pertama	21/06/2023 10:43:04 WIB
62 Nurul Fajar Rozyqin	21/06/2023

	10:43:59 WIB
63 Azrul Saleh Rumata	21/06/2023 10:44:09 WIB
64 Alfian Trenggana	21/06/2023 10:44:12 WIB
65 Supriyadi	21/06/2023 10:46:08 WIB
66 M. AFIAT HARIPAI	21/06/2023 10:59:34 WIB
67 Saiful Sabit Assidik	21/06/2023 11:05:11 WIB
68 Poppy Rezki Adiatma	21/06/2023 11:05:23 WIB
69 ABD. RASID SALIM	21/06/2023 11:09:31 WIB
70 Muhammad Ramdhani	21/06/2023 11:15:35 WIB
71 Zulkarnain Muslim Asrialdo	21/06/2023 11:26:48 WIB
72 Yusniar Cecilia	21/06/2023 11:41:46 WIB
73 H. Awaluddin Sibarani	21/06/2023 11:48:15 WIB
74 Muhammad Syaifulloh	21/06/2023 12:08:51 WIB
75 Aminuddin	21/06/2023 12:53:30 WIB
76 Moh. Nugrah	

	21/06/2023 12:54:23 WIB
77 Fathurian Ramadhan	21/06/2023 12:59:23 WIB
78 Edy Abraham Sukmadi	21/06/2023 13:22:47 WIB
79 Edy Abraham Sukmadi	21/06/2023 13:22:47 WIB
80 Joki Mardison	21/06/2023 13:28:38 WIB
81 Joki Mardison	21/06/2023 13:28:39 WIB
82 Ahmad Loji	21/06/2023 13:39:43 WIB
83 HERMAN LATABE	21/06/2023 13:42:43 WIB
84 Yudi Setiawan	21/06/2023 13:44:46 WIB
85 Yudi Setiawan	21/06/2023 13:44:46 WIB
86 Asrul Bin Usman	21/06/2023 14:09:26 WIB
87 Yessi Yuga Puspita	21/06/2023 14:21:22 WIB
88 M. IQBAL SUMARLAN PUTRA	21/06/2023 14:28:25 WIB
89 DEGA KAUTSAR PRADANA	21/06/2023 14:29:19 WIB

90 Basuki	21/06/2023 14:34:09 WIB
91 Safril Partang	21/06/2023 14:48:20 WIB
92 NS. Aji Martono	21/06/2023 14:53:22 WIB
93 M. Heikal Akmal	21/06/2023 14:53:39 WIB
94 GATOT PRIADI	21/06/2023 15:17:16 WIB
95 Samsabastian	21/06/2023 15:20:55 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1 Safril Partang		22/06/2023 08:01:36 WIB
2 Faiz Alkautsar		22/06/2023 08:01:37 WIB
3 Rusli		22/06/2023 08:02:41 WIB
4 Zaldi Heriwan		22/06/2023 08:03:27 WIB
5 Aminuddin		22/06/2023 08:03:47 WIB
6 Aminuddin		

	22/06/2023 08:03:47 WIB
7 MEDI AFRIZAL	22/06/2023 08:03:55 WIB
8 MUHAMMAD NAMRI	22/06/2023 08:03:57 WIB
9 Deny Boy	22/06/2023 08:03:57 WIB
10 M. IQBAL SUMARLAN PUTRA	22/06/2023 08:04:03 WIB
11 Mirza Kamal	22/06/2023 08:04:06 WIB
12 Iis Rosmeria	22/06/2023 08:04:56 WIB
13 Basuki	22/06/2023 08:05:11 WIB
14 Arni Dasrianti	22/06/2023 08:05:26 WIB
15 DEGA KAUTSAR PRADANA	22/06/2023 08:05:37 WIB
16 GATOT PRIADI	22/06/2023 08:05:56 WIB
17 MUHAMMAD IQBAL	22/06/2023 08:06:27 WIB
18 Muhammad Arfah	22/06/2023 08:06:49 WIB
19 Evi Pratiwi Handayani	22/06/2023 08:07:00 WIB

20 Khairani	22/06/2023 08:07:11 WIB
21 Neneng Iceu Candrawati	22/06/2023 08:07:42 WIB
22 R Lina Kurniasari	22/06/2023 08:08:08 WIB
23 Revani Dina Fitra	22/06/2023 08:08:26 WIB
24 Muhammad Fakhrol Azmi	22/06/2023 08:09:34 WIB
25 Bambang Sudiono	22/06/2023 08:10:36 WIB
26 Muhammad Idris	22/06/2023 08:10:48 WIB
27 DIANSYAH PUTRA	22/06/2023 08:10:52 WIB
28 Siti Dermawan Situmorang	22/06/2023 08:11:05 WIB
29 YUSRIL MARICAR	22/06/2023 08:11:32 WIB
30 NS. Aji Martono	22/06/2023 08:11:43 WIB
31 Joki Mardison	22/06/2023 08:12:46 WIB
32 Syaifudin	22/06/2023 08:12:58 WIB
33 Ajat Sudrajat	22/06/2023

	08:13:03 WIB
34 Era Marzuki	22/06/2023 08:13:18 WIB
35 Susi Rahayu	22/06/2023 08:13:36 WIB
36 Lis Purwanti	22/06/2023 08:13:39 WIB
37 Irfan Nauval El Hassan	22/06/2023 08:13:56 WIB
38 Juardi Ardiansah	22/06/2023 08:14:07 WIB
39 Fathurian Ramadhan	22/06/2023 08:14:16 WIB
40 Sukandi	22/06/2023 08:14:22 WIB
41 Sri Mulyana	22/06/2023 08:14:50 WIB
42 Diah Sutarsih	22/06/2023 08:14:53 WIB
43 Diah Sutarsih	22/06/2023 08:14:53 WIB
44 Nyimas Nining Rachman	22/06/2023 08:15:13 WIB
45 Abdullah	22/06/2023 08:15:26 WIB
46 Arman Muis	22/06/2023 08:15:58 WIB
47 Nurmala	

	22/06/2023 08:16:00 WIB
48 Gregorius Welly Agung Poy	22/06/2023 08:16:18 WIB
49 Diah Yudiastuti	22/06/2023 08:16:22 WIB
50 Mar'ie	22/06/2023 08:16:23 WIB
51 Ratna Juita Yakoeb	22/06/2023 08:16:29 WIB
52 Omisah	22/06/2023 08:16:41 WIB
53 Farlaini	22/06/2023 08:17:31 WIB
54 H. Yanuar Amnur	22/06/2023 08:17:51 WIB
55 Azrul Saleh Rumata	22/06/2023 08:18:23 WIB
56 Muhamad Ahsan	22/06/2023 08:19:49 WIB
57 Boris Dianjaya	22/06/2023 08:20:02 WIB
58 Rita Sahagia	22/06/2023 08:20:12 WIB
59 Ahmad Loji	22/06/2023 08:20:14 WIB
60 Abu Anas	22/06/2023 08:21:34 WIB

61 Aris Maryani	22/06/2023 08:22:11 WIB
62 Armansah	22/06/2023 08:23:04 WIB
63 H. Hasan Basri	22/06/2023 08:23:08 WIB
64 Seprayogi Linel	22/06/2023 08:23:28 WIB
65 Triana Widya Wijayanti	22/06/2023 08:24:24 WIB
66 ABD. RASID SALIM	22/06/2023 08:24:28 WIB
67 Alfian Trenggana	22/06/2023 08:24:56 WIB
68 Yudi Setiawan	22/06/2023 08:25:16 WIB
69 Yudi Setiawan	22/06/2023 08:25:16 WIB
70 Aspihani	22/06/2023 08:25:17 WIB
71 NOVEL YENIAPUT WETAPO	22/06/2023 08:26:02 WIB
72 Gregorius Matrecano	22/06/2023 08:27:37 WIB
73 Muhammad Fajrin	22/06/2023 08:28:52 WIB
74 EKO PRAYITNO	22/06/2023

	08:29:03 WIB
75 Yessi Yuga Puspita	22/06/2023 08:29:07 WIB
76 EKO PRAYITNO	22/06/2023 08:29:39 WIB
77 Poppy Rezki Adiatma	22/06/2023 08:33:41 WIB
78 H. Awaluddin Sibarani	22/06/2023 08:33:42 WIB
79 Tahir	22/06/2023 08:33:54 WIB
80 HERMAN LATABE	22/06/2023 08:34:44 WIB
81 Saiful Sabit Assidik	22/06/2023 08:35:00 WIB
82 Yoga Pranata	22/06/2023 08:35:19 WIB
83 Albir Abdi	22/06/2023 08:36:02 WIB
84 Irfan Febrianto	22/06/2023 08:37:00 WIB
85 ZAINUL ALIM M. NGIU	22/06/2023 08:37:25 WIB
86 Nathalis Hisage	22/06/2023 08:37:35 WIB
87 Muhammad Riano Pertama	22/06/2023 08:38:38 WIB
88 M. AFIAT HARIPAI	

	22/06/2023 08:39:04 WIB
89 H. Kasbiransyah	22/06/2023 08:40:26 WIB
90 Andi Putra	22/06/2023 08:40:35 WIB
91 Muhammad Syaifulloh	22/06/2023 08:43:25 WIB
92 Caesar Sophan Aditya	22/06/2023 08:44:28 WIB
93 Susanto	22/06/2023 08:45:58 WIB
94 Edy Abraham Sukmadi	22/06/2023 08:46:06 WIB
95 Bambang Papuadi	22/06/2023 08:49:58 WIB
96 Nur Afifah	22/06/2023 08:51:47 WIB
97 Arifa Mutiara	22/06/2023 08:51:53 WIB
98 Samsabastian	22/06/2023 08:53:23 WIB
99 Lebrata	22/06/2023 08:53:50 WIB
100 Mohammad Fauzie Dianjaya	22/06/2023 08:54:14 WIB
101 Supriyadi	22/06/2023 08:54:39 WIB

102 M. Heikal Akmal	22/06/2023 08:57:35 WIB
103 MAHDI PANA	22/06/2023 09:00:45 WIB
104 Januari Marianie	22/06/2023 09:04:06 WIB
105 Yani Hakim	22/06/2023 09:13:47 WIB
106 Mohammad Isa Litoloy	22/06/2023 09:25:17 WIB
107 Nurul Fajar Rozyqin	22/06/2023 09:28:18 WIB
108 Zulkarnain Muslim Asrialdo	22/06/2023 09:34:16 WIB
109 Moh. Nugrah	22/06/2023 09:43:45 WIB
110 SOLAHUDDIN	22/06/2023 09:48:47 WIB
111 Kiagus Ahmad Basuni Firmansyah	22/06/2023 09:51:28 WIB
112 Yusniar Cecilia	22/06/2023 10:01:36 WIB
113 Afifa Resti Pradita	22/06/2023 10:03:47 WIB
114 Muhammad Ramdhani	22/06/2023 10:18:21 WIB
115 Eti Yuliati	22/06/2023

	10:19:41 WIB
116 Hamidah Yacoub	22/06/2023 10:20:47 WIB
117 Muhammad Mir Purnama	22/06/2023 10:24:56 WIB
118 Asrul Bin Usman	22/06/2023 10:26:41 WIB
119 Imran Harahap	22/06/2023 10:27:29 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	M. IQBAL SUMARLAN PUTRA	22/06/2023 10:30:07 WIB
2	DEGA KAUTSAR PRADANA	22/06/2023 10:30:18 WIB
3	M. Heikal Akmal	22/06/2023 10:30:39 WIB
4	Mar'ie	22/06/2023 10:30:46 WIB
5	Bambang Papuadi	22/06/2023 10:30:51 WIB
6	Bambang Sudiono	22/06/2023 10:31:02 WIB
7	Juardi Ardiansah	22/06/2023 10:31:03 WIB
8	Yessi Yuga Puspita	

	22/06/2023 10:31:34 WIB
9 EKO PRAYITNO	22/06/2023 10:31:48 WIB
10 Yusniar Cecilia	22/06/2023 10:31:59 WIB
11 H. Hasan Basri	22/06/2023 10:32:01 WIB
12 Januari Marianie	22/06/2023 10:32:15 WIB
13 Muhammad Syaifulloh	22/06/2023 10:32:49 WIB
14 Zulkarnain Muslim Asrialdo	22/06/2023 10:33:11 WIB
15 Faiz Alkautsar	22/06/2023 10:33:16 WIB
16 Yudi Setiawan	22/06/2023 10:34:15 WIB
17 Aspihani	22/06/2023 10:34:18 WIB
18 Mirza Kamal	22/06/2023 10:34:36 WIB
19 ERON NORMANDIA BACHSIN	22/06/2023 10:34:44 WIB
20 Muhammad Riano Pertama	22/06/2023 10:36:10 WIB
21 Yoga Pranata	22/06/2023 10:36:45 WIB

22 YUSRIL MARICAR	22/06/2023 10:36:48 WIB
23 Irfan Febrianto	22/06/2023 10:36:50 WIB
24 Samsabastian	22/06/2023 10:36:55 WIB
25 Yoga Pranata	22/06/2023 10:37:07 WIB
26 Muhammad Fajrin	22/06/2023 10:37:15 WIB
27 DENY RISMAWAN	22/06/2023 10:37:29 WIB
28 M. AFIAT HARIPAI	22/06/2023 10:37:42 WIB
29 Arifa Mutiara	22/06/2023 10:37:43 WIB
30 HERMAN LATABE	22/06/2023 10:37:52 WIB
31 H. Yanuar Amnur	22/06/2023 10:37:55 WIB
32 Yanuar Syarif	22/06/2023 10:37:58 WIB
33 Poppy Rezki Adiatma	22/06/2023 10:38:03 WIB
34 Boris Dianjaya	22/06/2023 10:38:10 WIB
35 Susi Rahayu	22/06/2023

	10:38:31 WIB
36 Era Marzuki	22/06/2023 10:38:38 WIB
37 Muhammad Mir Purnama	22/06/2023 10:38:52 WIB
38 Joki Mardison	22/06/2023 10:39:05 WIB
39 MUHAMMAD NAMRI	22/06/2023 10:39:09 WIB
40 Fathurian Ramadhan	22/06/2023 10:39:25 WIB
41 Aminuddin	22/06/2023 10:39:34 WIB
42 Aris Maryani	22/06/2023 10:39:37 WIB
43 Siti Dermawan Situmorang	22/06/2023 10:39:38 WIB
44 Yani Hakim	22/06/2023 10:40:34 WIB
45 Mohammad Isa Litololy	22/06/2023 10:41:28 WIB
46 ZAINUL ALIM M. NGIU	22/06/2023 10:41:37 WIB
47 Andi Putra	22/06/2023 10:42:19 WIB
48 Syaifudin	22/06/2023 10:42:19 WIB
49 Nyimas Nining Rachman	

	22/06/2023 10:42:51 WIB
50 Nurmala	22/06/2023 10:43:22 WIB
51 Basuki	22/06/2023 10:44:11 WIB
52 Rusli	22/06/2023 10:44:15 WIB
53 Muhammad Arfah	22/06/2023 10:45:03 WIB
54 Yulius Nur	22/06/2023 10:45:24 WIB
55 Muhammad Idris	22/06/2023 10:45:29 WIB
56 Armansah	22/06/2023 10:45:47 WIB
57 Sri Mulyana	22/06/2023 10:50:08 WIB
58 Albir Abdi	22/06/2023 10:50:19 WIB
59 H. Kasbiransyah	22/06/2023 10:50:34 WIB
60 Triana Widya Wijayanti	22/06/2023 10:50:37 WIB
61 Lis Purwanti	22/06/2023 10:50:57 WIB
62 Asrul Bin Usman	22/06/2023 10:51:30 WIB

63 Diah Yudiastuti	22/06/2023 10:54:57 WIB
64 Safril Partang	22/06/2023 10:55:40 WIB
65 Alfian Trenggana	22/06/2023 10:57:11 WIB
66 Afifa Resti Pradita	22/06/2023 10:58:36 WIB
67 Evi Pratiwi Handayani	22/06/2023 10:59:49 WIB
68 Abdullah	22/06/2023 11:05:51 WIB
69 Nurul Fajar Rozyqin	22/06/2023 11:05:55 WIB
70 Gregorius Welly Agung Poy	22/06/2023 11:06:23 WIB
71 Tahir	22/06/2023 11:07:13 WIB
72 Ahmad Loji	22/06/2023 11:08:00 WIB
73 Diah Sutarsih	22/06/2023 11:13:00 WIB
74 ABD. RASID SALIM	22/06/2023 11:16:30 WIB
75 Caesar Sophan Aditya	22/06/2023 11:17:48 WIB
76 Zaldi Heriwan	22/06/2023

	11:20:55 WIB
77 Supriyadi	22/06/2023 11:21:00 WIB
78 Khairani	22/06/2023 11:21:30 WIB
79 MUHAMMAD IQBAL	22/06/2023 11:21:32 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DAPAT DIUNDUH MELALUI AKUN
SIMULTAN PESERTA DENGAN *LOGIN*
DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username :
Pusdiklat_MKRI

password : **pusdikmk**

Username :
GK3_PUSDIKLAT

password : **pusdikmkri**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Peserta Menyusun Keterangan Pihak Terkait berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Keterangan Pihak Terkait dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Tugas Individu
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek4@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Keterangan Pihak Terkait Perseorangan

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Keterangan Pihak Terkait Partai Politik



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Rabu,
21 Juni 2023**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



**Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI BULAN BINTANG

KELAS 1

Narasumber

: Yunita Rhamadani

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	Juardi Ardiansah, S.E., M.H.	DPP	65	70	65	68
2	2	Nyimas Nining Rachman, S.H.	DPP	75	65	70	68
3	3	Adv DIANSYAH PUTRA, S.Kom., S.H., M.M.	DPW Jawa Barat				0
4	5	Rusli, S.Sos.I	DPW Aceh	88	85	88	86.2
5	6	Sukandi, M.Pd.	DPW Lampung	68	66	65	66.2
6	7	Alfian Trenggana, S.H., M.H.	DPW Bali	80	83	80	81.8
7	13	Susi Rahayu, S.H.	DPW Kalimantan Timur	90	90	90	90
8	16	Nurul Fajar Rozyqin, S.H.	DPW Jawa Timur	90	88	86	88
9	17	Safriil Partang, S.H., M.H.	DPW DKI Jakarta				0
10	18	Muhammad Idris, S.H., M.H.	DPW Sumatera Utara	85	80	85	82
11	20	Revani Dina Fitra, S.E., S.H.	DPP	85	80	85	82
12	22	ERON NORMANDIA BACHSIN, A.md	DPP	80	78	80	78.8
13	23	MAHDI PANA	DPP	78	75	70	74.6
14	24	Poppy Rezki Adiatma, S.H., M.H.	DPW Kalimantan Selatan	80	78	82	79.2
15	27	Era Marzuki, S.H.	DPW Banten	80	82	80	81.2
16	28	H. Kasbiransyah, S.E.I.	DPW Bangka Belitung	78	80	78	79.2
17	29	Supriyadi, S.H.	DPW Nusa Tenggara Barat	65	65	65	65
18	32	Yulius Nur, S.P.	DPW Jambi	78	80	80	79.6
19	34	Muhammad Mir Purnama, S.E.	DPP	82	82	85	82.6
20	37	Dr. H. Nur Raihan, M.A.	DPP	70	68	65	67.8
21	38	Susanto, S.Kom., M.M.	DPP	80	82	80	81.2
22	41	Arifa Mutiara	DPW Kalimantan Tengah	70	70	70	70
23	44	Nur Afifah, S.Pd.	DPW Kalimantan Tengah	68	68	65	67.4
24	45	Muhamad Ahsan, S.H.	DPW Sumatera Selatan	75	75	75	75
25	46	Tahir, S.Sos.	DPW Sulawesi Selatan	90	90	85	89
26	52	Nurmala	DPW Papua Barat Daya	68	67	65	66.8
27	55	Albir Abdi, S.H.	DPW Papua Selatan	80	80	80	80
28	58	Sri Mulyana	DPW Kalimantan Barat	68	68	68	68
29	62	Joki Mardison, S.H., M.H.	DPW Riau	75	70	75	72
30	69	Lebrata, S.H., M.H.	DPW Kepulauan Riau	80	75	75	76
31	70	Asrul Bin Usman, S.IP.	DPW Maluku	70	68	70	68.8
32	76	YUSRIL MARICAR, S.H.	DPW Sulawesi Barat	85	85	85	85
33	87	Gregorius Welly Agung Poy, S.M.	DPW Nusa Tenggara Timur	65	65	68	65.6
34	109	Zulkarnain Muslim Asrialdo	DPW Papua	70	65	60	65
		ada tugas atas nama eko prayitno tp tdk ada di daftar nama		80	78	75	77.8
		ada tugas atas nama aspiani tp tdk ada di daftar nama		80	78	80	78.8



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI BULAN BINTANG

KELAS 2

Narasumber

: Rahadian Prima Nugraha

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	4	Ajat Sudrajat	DPW Jawa Barat				0
2	8	Ki Agus Ahmad Basuni Firmansyah, S.H.	DPW Lampung				0
3	9	Mirza Kamal, S.H., M.E.	DPW Aceh	90	85	80	85
4	12	Abu Anas, S.H.	DPW Bali	90	80	85	83
5	19	Drs. H. Awaluddin Sibarani, S.H., M.Si.	DPW Sumatera Utara	90	85	90	87
6	25	Aspiani, S.H., M.H.	DPW Kalimantan Selatan	90	75	80	79
7	33	Muhammad Arfah, S.H.	DPW Jambi	90	85	85	86
8	39	Omisah, S.Pd.I.	DPP	70	70	70	70
9	40	Farlaini, S.Sos.	DPP	80	80	75	79
10	42	Afifa Resti Pradita, S.Pd.	DPW Kalimantan Tengah	90	80	85	83
11	43	Eti Yulianti, S.Pd.I.	DPP	80	70	75	73
12	48	Ir. Armansah, M.M.	DPW Sumatera Selatan	80	75	75	76
13	49	Diah Sutarsih, S.I.Kom.	DPP	90	80	85	83
14	54	Pengkuh Ragii Nugroho	DPP				0
15	56	Triana Widya Wijayanti, S.Sos., M.Pd.	DPP	90	85	85	86
16	57	Diah Yudiastuti	DPP	80	70	75	73
17	59	Evi Pratiwi Handayani, S.Sos.	DPP	80	75	75	76
18	60	Lis Purwanti, S.Sos.	DPP	90	80	80	82
19	64	Arni Dasrianti, A.Md.	DPP	90	85	85	86
20	74	Zaldi Heriwan, S.Ag.	DPW Sumatera Barat	90	85	85	86
21	77	Adv. Dr. Soesanto Gunawan, S.H., M.H., M.M.	DPW Jawa Tengah	80	75	75	76
22	79	Yusniar Cecilia	DPW Sulawesi Tenggara	80	75	75	76
23	85	MUHAMMAD NAMRI	DPW Sulawesi Barat	90	70	80	76
24	88	Gregorius Matrecano, S.Ip.	DPW Nusa Tenggara Timur	80	75	75	76
25	91	DENY RISMAWAN	DPW Sulawesi Tengah	80	75	75	76
26	98	Azhar, S.E.	DPW Sulawesi Utara				0
27	99	Khairani, A.Md.	DPP	80	70	75	73
28	100	Ir. Achmad Bagulu	DPW Gorontalo	90	80	80	82
29	111	Bambang Papuadi	DPW Papua	90	85	80	85
30	113	Agus Salim	DPW Kepulauan Riau	80	75	75	76
31	126	EKO PRAYITNO	DPP	90	80	80	82
32	127	MEDI AFRIZAL	DPW Sumatera Barat				0
33	128	Muhammad Ramdhani	DPP				0



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI BULAN BINTANG

KELAS 3

Narasumber

: Alboin Pasaribu

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	10	Muhammad Fakhrol Azmi, S.H.I.	DPW Aceh				0
2	11	Samsabastian, S.H.	DPW Lampung				68
3	14	Imran Harahap, S.H.	DPW Bali				70
4	15	Deny Boy, S.P., S.H.	DPW Kalimantan Timur				80
5	21	Aminuddin, S.E., S.H., M.H.	DPW Sumatera Utara				68
6	26	Saiful Sabit Assidik, S.H.I.	DPW Kalimantan Selatan				70
7	30	Yoga Pranata, A.Md.	DPW Bangka Belitung				70
8	35	ADVOKAT SOLAHUDDIN, S.H., M.H.	DPW Jawa Barat				0
9	36	Basuki, S.H.I.	DPW Jambi				68
10	44	Nur Afifah, S.Pd.	DPW Kalimantan Tengah				0
11	47	Arman Muis, S.T.	DPW Sulawesi Selatan				68
12	51	Caesar Sophan Aditya, S.H.	DPW Sumatera Selatan				80
13	63	Ahmad Loji, S.Pd.I.	DPW Papua Barat Daya				65
14	65	Aris Maryani, S.H.	DPP				70
15	66	H. Yanuar Amnur, S.Sos.	DPP				77
16	67	M. Heikal Akmal, S.H., M.H.	DPW Riau				70
17	71	GATOT PRIADI, S.H., M.H.	DPP				80
18	72	Faiz Alkautsar	DPP				75
19	73	Mohammad Fauzie Dianjaya, S.H.	DPP				75
20	78	Januari Marianie	DPW Papua Selatan				68
21	81	Doriangat Pakpahan	DPP				70
22	82	Irfan Febrianto	DPP				0
23	83	Hamidah Yacoub, B.A.	DPP				68
24	84	Siti Dermawan Situmorang, S.Kom. I.	DPP				73
25	89	Yani Hakim, S.H., M.H.	DPW Maluku				75
26	92	Azrul Saleh Rumata	DPP				65
27	96	Moh. Nugrah, S.E.	DPW Sulawesi Tengah				68
28	101	ZAINUL ALIM M. NGIU, S.H.	DPW Gorontalo				68
29	115	Saeiful	DPW DKI Jakarta				0
30	117	Bambang Sudiono, S.H.	DPW Kalimantan Barat				82
31	119	Padil, S.S., S.H., M.H.	DPW Nusa Tenggara Barat				80
32	129	Yanuar Syarif	DPP				0
33	131	Muhammad Syaifulloh	DPP				75



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI BULAN BINTANG

KELAS 4

Narasumber

: Andriani W. Novitasari

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	31	Boris Dianjaya, S.H.	DPW Bangka Belitung	65	60	60	61
2	50	Abdullah, S.T.	DPW Sulawesi Selatan	65	65	65	65
3	53	Yessi Yuga Puspita, S.E.	DPW Sumatera Selatan	70	65	65	66
4	61	Fathurian Ramadhan, S.H.	DPW Maluku Utara	70	70	70	70
5	68	H. Hasan Basri, S.Ag., S.H., M.H.	DPW Riau	70	75	75	74
6	75	Neneng Iceu Candrawati	DPW Papua Barat	70	65	70	67
7	80	Harsuyana Dahlina Lubis, S.Pd.	DPW Papua Selatan	70	70	70	70
8	86	M. AFIAT HARIPAI, S.P., S.H.	DPW Sulawesi Barat	75	70	70	71
9	90	Mohammad Isa Litolily, S.Sos.I.	DPW Maluku				0
10	93	Ir. Syaifudin	DPP				0
11	94	Irfan Nauval El Hassan, M.I.Kom.	DPW Nusa Tenggara Timur	65	60	60	61
12	95	MUHAMMAD IQBAL, S.H.	DPW Sumatera Barat				0
13	97	HERMAN LATABE, S.H.	DPW Sulawesi Tengah	65	65	65	65
14	102	ABD. RASID SALIM, S.T., M.Si., IP.	DPW Gorontalo	65	60	60	61
15	103	Yudi Setiawan	DPP	70	65	70	67
16	104	Ratna Juita Yakoeb, S.Ag.	DPP	70	70	70	70
17	105	Rita Sahagia, S.E.	DPP	65	65	60	64
18	106	NS. Aji Martono, S.H.I., CSA.	DPP	65	60	60	61
19	107	Muhammad Fajrin, S.H.	DPP	70	75	70	73
20	108	Muhammad Riano Pertama, S.H.	DPP	70	70	70	70
60	110	NOVEL YENIAPUT WETAPO, S.E.	DPW Papua Pegunungan	60	60	60	60
22	112	Erwin Wenda, S.H.	DPW Papua	70	60	65	63
23	114	Andi Putra, S.H.	DPW Kepulauan Riau	70	70	70	70
24	116	Seprayogi Linel, S.H.	DPW DKI Jakarta	70	70	65	69
25	118	Mar'ie, S.H.	DPW Kalimantan Barat	65	60	60	61
26	120	Drs. Jamali, S.H., M.Pd.	DPW Nusa Tenggara Barat	65	65	65	65
27	121	Firmansyah, S.H., M.H.	DPP				0
28	122	Hilman Indra	DPP				0
29	123	R Lina Kurniasari	DPP	65	65	65	65
30	124	M. IQBAL SUMARLAN PUTRA, S.H., M.H.	DPP	75	70	75	72
31	125	DEGA KAUTSAR PRADANA, S.H., M.Si. (HAN)	DPP	70	70	70	70
32	130	Iis Rosmeria	DPP	70	65	65	66
33	132	Nathalis Hisage	DPW Papua Pegunungan	65	60	65	62

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI BULAN BINTANG

NAMA NARASUMBER : Yunita Rhamadani

KELAS : I

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Masih banyak yang menggunakan lembar jawaban, tidak dikerjakan di laptop
	hasilnya menjadi kurang optimal, karena waktu yang dibutuhkan peserta
	menjadi lebih banyak. Juga menjadi cepat kelelahan akhirnya tidak dikerjakan
	secara serius
2	Banyak peserta yang salah kirim email. Untuk itu perlu koordinasi antar kelas
3	Ada peserta yang mengerjakan tugas Pihak Terkait padahal dirinya ada di kelas
	yang mendapat tugas membuat permohonan. Tugas dikerjakan secara baik, relatif
	sangat lengkap, tapi menjadi dipertanyakan apakah yang bersangkutan benar
	mengerjakan sendiri atau mengcopy tugas teman dari kelas lain
4	Masih banyak peserta yang mencantumkan SK penetapan hasil menjadi SK pada
	bagian kedudukan hukum. Perlu diingatkan kembali bahwa KPU mengeluarkan
	beberapa SK diantaranya terkait dengan kepesertaan yang harus disebutkan
	sebagai dasar pertimbangan kedudukan hukum Pemohon
5	Untuk peserta yang mendapat nilai tinggi cukup banyak tidak seperti biasanya
	Dari sekian banyak yang mendapat nilai tinggi tidak ada yang plagiat
	Terlihat dari uraian posita yang dikreasikan dengan cukup baik tidak hanya
	sekedar mengcopy soal

6	Masih banyak peserta yang tidak menghapus guidance yang ada pada template.
7	Ada dua peserta belum mengumpulkan tugas
8	
9	
10	
11	
12	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI BULAN BINTANG

NAMA NARASUMBER : Rahadian P Nugraha

KELAS : 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Untuk (template) jawaban khususnya bagian kedudukan hukum Pemohon apakah tidak lebih runut jika poin c (uraian legalitas caleg) lebih dulu ketimbang poin b (uraian persetujuan DPP)
2	
3	
4	
5	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI BULAN BINTANG

NAMA NARASUMBER : ANDRIANI WAHYUNINGTYAS NOVITASARI

KELAS : 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	EVALUASI UMUM
	Terdapat 5 orang peserta yang tidak mengumpulkan tugas penyusunan Keterangan Pihak Terkait
	Terdapat 7 orang peserta yang mengerjakan dan mengumpulkan tugas penyusunan Keterangan Pihak Terkait secara manual (tulis tangan dan diantaranya hanya mengisi titik-titik yang terdapat dalam templete).
	Pada saat sesi diskusi dalam kelas terdapat beberapa peserta yang substansinya di luar materi yang disampaikan oleh panitia; Terdapat pertanyaan mengenai persoalan-persoalan dan dinamika yang timbul dalam persidangan seperti: <ul style="list-style-type: none">▪ Apakah MK dapat membuat kebijakan untuk menambah waktu penerimaan permohonan PPHU:▪ Bagaimana cara menginventaris dan membrikan kode bukti yang baik dan benar;▪ Bagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi apabila terdapat surat kuasa yang memberikan kuasa untuk diberikan hak pilih kepada beberapa masyarakat;▪ Bagaimana tip dan trik bisa memenangkan Pemohon dalam berperkara PPHU.
2	SISTEMATIKA PERMOHONAN
	Masih terdapat peserta yang belum memahami menyusun identitas permohonan pemohon, Pesrta antusias mengerjakan dan berusaha memahami latihan menyusun keterangan PT sesuai dengan sistematika permohonan
3	KEWENANGAN, KEDUDUKAN HUKUM, TENGGANG WAKTU
	Peserta telah memahami bagian kewenangan dan kedudukan hukum
	Terdapat beberapa peserta yang masih salah dalam menghitung tenggang waktu pengajuan permohonan .

4	DALAM POKOK PERMOHONAN (POSITA) DAN PETITUM
	Dalam penyusunan Keterangan Pihak Terkait, beberapa peserta dalam menguraikan, menjelaskan, dan mengkonstruksikan keterangan PT masih menggunakan templete yang seadanya;
	Beberapa Peserta dalam menyusun keterangan PT, uraian dalam pokok permohonan tidak bertentangan dengan petitum;
	Peserta telah mencantumkan kode bukti PT untuk menunjang dalil-dalil yang disampaikan dalam Keterangan Pihak Terkait.
5	KESALAHAN TULIS (TYPO)
	Masih dijumpai beberapa salah ketik.

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

Sesi I	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, SH 2. YM Dr. Manahan M.P. Sitompul, SH., M.Hum.
Moderator	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Elbrata_Batam : jika sengketa Pemilu th 2024 menumpuk, persiapan apa yg akan di lakukan MK?
2.	Nurul Fajar_Malang : Untuk menjaga integritas Hakim MK agar tidak menangani perkara yang ada di daerah asalnya bagai mana dengan panel yg berasal dari anggota DPR yg disitu ketika pemohonnya atau pihak terkait dari partai yg sama? Siapa yg menentukan pihak terkait apakah itu dari pemohon atau dari Hakim MK sendiri? Mungkinkah ketika persidangan berlangsung ada parpol lain diluar pemohon maupun terkait dia yg merasa punya kepentingan terhadap hasil perolehan suara dari KPU tersebut sehingga dia meningkatkan diri sebeagai pihak terkait atau interpensi?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

Sesi II	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Narasumber	Dr. Fajar Laksono
Moderator	Suhardi

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Susanto Gunawan_Jateng : Mohon kisi kisi untuk menguji Undang Undang dari MK karna mungkin saya secara mikro bicaranya bahwa orang yg dipidana karna dia mempunyai kartu kuning atau ODGJ itu bisa di lepas?
2.	Jamali_NTB : dari pungsi Undang Undang seperti apakah dlm keadilan karna dlm syarat syarat PNS harus mempunyai kartu kuning, sementara mantan terpidana 5 tahun bisa mencalonkan dirinya sebagai legislative atau pilpres, kira kira dimana letak keadilan atau kedemokrasian dalam undang undang ini?
3.	Supriyadi_NTB : apa bapak mendengar dan apa kekuatan kami ketika person atau orang melakukan uji terhadap undang undang itu?
4.	Yanuar An Nur_Ketua badan Kaderisasi Partai Pusat : Yg Kita Tunggu Kewenangan MK membubarkan Partai Politik?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

Sesi III	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	Dr. Wiryanto, SH., M.Hum
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Diah : apakah pihak terkait harus ada pemohon dulu?
2.	Ambon : sarat Formil, batas waktu 3 x 24 jam sehingga kalo misalnya lewat dari itu maka gugur? Selisih suara yg bisa di ajukan ke MK, seperti ada terjadi kecurangan seperti jumlah partai A dan B jumlah selisihnya 20 ribu apakah bisa di ajukan ke MK?
3.	Hasan Basri _Riau : Berkaitan dengan masalah Hukum Acara MK, Bisa ga MK memutus apa yg tdk diminta oleh pemohon?
4.	Padil-NTB : Terkait dg termohon dan pihak terkait, Apakah pihak terkait caleg yg bersangkutan sekaligus ikut Ketua di masing masing tingkatan sebagai pihak terkait
5.	Muh. Iqbal _Sumbar : Sejatinya para pemohon akan berhadapan 3 pihak, Ketika dalil dalil yg jadi alasan para pemohon mungkinkah pihak terkait dan Bawaslu sbg pihak yg memberikan keterangan membenarkan sebagian atau seluruh poin yg di dalilkan oleh pemohon atau secara mutlak melawan atau memberikan keterangan yg bertentangan?
6.	Lampung : Masalah Pihak terkait, apakah pihak terkait itu langsung diberitahu kepada orang yg bersangkutan atau cukup dipusat atau disampaikan ke yg bersangkutan?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

Sesi IV	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
Narasumber	1. Riska Aprian 2. Agung Wisnu Laksono
Moderator	Nanda Adytiansyah

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Susanto Gunawan_Jateng : pada saat persidangan apakah minta ijin ke kampus apa ke MK?
2.	Ian_Lampung : apakah mengerjakan ulang lagi kalo down lg applaud permohonan?



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta

Bimbingan Teknis

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

 Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik

 **Tepat waktu** dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi

 Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**

 Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**

 Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas

 Tidak merokok dalam kamar

 Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB

 Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB

 Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Pusdik

 Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4



Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas $37,5^{\circ}\text{C}$), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



Moderator mengatur jalannya diskusi

19



Narasumber selesai memberikan materi

20



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal *Post Test* di akun **SIMULTAN** masing-masing

21



Peserta mengikuti acara penutupan

22



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat

23



Uang transport peserta (jika ada) akan dilaksanakan dengan mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan
Pusdik akan dibersihkan dengan
menggunakan disinfektan



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

Markas Besar : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan Tlp. (021) 79180734, 79180765, Email.: dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id

Surat Tugas

Nomor : AT.295/DPP/Sek/06/2023

Yang bertandatangan di bawah ini Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang menugaskan kepada nama-nama terlampir untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang.

Hari/tanggal : Senin s.d. Kamis
19 s.d. 22 Juni 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jln. Raya Bogor Puncak KM 83, Cisarua Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dewan Pimpinan Pusat
PARTAI BULAN BINTANG

Ketua Umum

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra



Sekretaris Jenderal,

Ir. Afriansyah Noor, M.Si

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

No.	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW	Mengantikan
1	Azanil Kelana	Wakil Sekretaris Jenderal	DPP	
2	Husni Jumat, SH., S. Sos.I	Ketua Bidang	DPP	Lisipurwanti
3	Firmansyah,SH., MH	Ketua Bidang	DPP	
4	Solihin Pure,SP	Wakil Sekretaris Jenderal	DPP	Triana Widya Wijayanti, S.Sos., M.Pd
5	Hennry NF	Staf Sekretariat DPP	DPP	Diah Yudiastuti
6	NS. Aji Martono,SHI,CSA	Ketua Bidang	DPP	
7	Ir. Doriangat Pakpahan	Ketua Bidang	DPP	
8	Ratna Juita Jakoeb,S.Ag	Ketua Bidang	DPP	
9	Ir. Silvia Rahmi	Wakil Bendahara	DPP	
10	Evi Pratiwi Handayani, S.Sos	Wakil Bendahara	DPP	
11	Andriani, ST	Ketua Bidang	DPP	
12	Fitriyana Ikhsan Syahrul	Wakil Bendahara	DPP	
13	Yanuar Amnur	Ketua BKP	DPP	
14	Eti Yuliati S.Pd.I	Anggota Dep.	DPP	
15	Indah Jayasari, SH, MH	Anggota Dep.	DPP	
16	Aris Maryani	Staff Sekretariat DPP	DPP	
17	Nyimas Nining Rachman	Anggota Dep.	DPP	
18	Faiz Alkautsar	Anggota Pemuda BB	DPP	
19	Arni Dasrianti	Dep. Perlindungan Anak	DPP	
20	Farlaini	Anggota BKP	DPP	
21	Diah Sutarsih, S.I.Kom	Ket. Dep. Pemberdayaan Perempuan.	DPP	
22	M. Mir Purnama, SE	Anggota Da'ina	DPP	
23	Iis Yeni Suryani	Dep.	DPP	Juardi Ardiansah, SE.,MH-
24	Afrizal S.H., M.H	Anggota BKP	DPP	Susanto
25	MAHDI PANA	Wakil Komandan Brigade	DPP	
26	EKO PRAYITNO	Asisten Intelijen Internal Brigade	DPP	
27	IWAN KURNIAWAN JUSUF	Staff Usaha dan Dana Brigade	DPP	
28	ERON NORMANDIA BACHSIN	Staff Usaha dan Dana Brigade	DPP	
29	Hamidah Yacoub, B.A.	Ketua Muslimat BB	DPP	
30	Yessi Yuga Puspita, S.E.	Sekretaris Muslimat BB	DPP	
31	Siti Dermawan, S.Kom.I.	Anggota Muslimat BB	DPP	
32	GATOT PRIADI, SH., MH	Sekretaris Umum DPP LABH Bulan Bintang	DPP	
33	YOLIS SUHADI, SH., MH	Bendahara Umum DPP LABH Bulan Bintang	DPP	
34	DEGA KAUTSAR PRADANA, SH., M.Si (HAN);	Anggota LABH	DPP	
35	M. IQBAL SUMARLAN PUTRA, SH., MH	Anggota LABH	DPP	
36	Nova ardinal	Anggota Dep.	DPP	
37	Iis Rosmeria	Anggota Dep.	DPP	Dr. Lalu Zulkifli (Da'ina)
38	Mirza Kamal, S.H.,M.E	Wakil Ketua BAPPILU	ACEH	
39	Rusli	Wakil Ketua DPW		
40	M. Fakhru Azmi	Sekretaris DPC PBB Aceh Barat		
41	Kahar Juli, SH. M.H.	Pengurus DPW	DPW KALTIM	
42	Deny Boy, S.P. SH.	DPC SAMARINDA		
43	Susi Rahayu, SH.	Wakil Ketua DPW		

44	WS Pramono	Ketua DPW KALTENG	DPW KALTENG	Afifa Resti Pradita
45	Eman Supriyadi	Sek Bappilu wilayah		Nur Afifah
46	Arifa Mutiara	Anggota DPW		
47	Adv. Dr.Soesanto Gunawan SH MH,MM	Penguru DPW	DPW JAWA TENGAH	
48	Adv.Laksana Budi Ermawan, SH,MH	Penguru DPW		
49	Adv. Ainurrofiq SH	Penguru DPW		
50	Zainal Abidin Tuatoy,S.Sy.M.H	Ketua DPC PBB Kota Bengkulu	DPW BENGKULU	
51	Rizal, SH	Sekretaris DPC PBB Kota Bengkulu		
52	Livia Oktarina, SH	Bendahara DPC PBB Kota Bengkulu		
53	Agus Salim	Ketua DPW PBB Kepri	DPW KEPRI	
54	Andi Putra.SH	Ketua DPC Kota Batam		
55	Lebrata,SH,MH	Anggota Departemen		
56	H. Kasbiransyah,S.E.I MH	Ketua DPW	DPW BABEL	
57	Sherlly, SH	Bendahara DPW		
58	Yogo Pranata A.md	Pengurus DPW		
59	Drs.H.Awaluddin sibarani.SH.M.Si	Ketua DPW	DPW SUMUT	
60	Muhammad Idris.SH.MH.	Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang		
61	Aminuddin.SH.	Ketua Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Bulan		
62	Achmad Djabid, SH.	Ketua DPW	DPW MALUT	
63	Iksan Bahrudin, SH.	Pengurus DPW		
64	Jurais Betawi, SH.	Pengurus DPW		
65	Fadil SS, SH,MA	Ketua LABH PBB Prov. NTB	DPW NTB	
66	Supriyadi, SH	Pengurus DPW		
67	Drs. Jamali, SH,M.Pd	Pengurus LABH PBB		
68	H. Hasan Basri, S.Ag.,S.H.,M.H	Ketua LABH Bulan Bintang	DPW RIAU	
69	Joki Mardison, SH., MH	Kabid Advokasi & Bantuan Hukum		
70	M. Heikal Akmal, SH.,MH	Kabid Humas & Antar Lembaga		
71	Achmad Bagulu	Ketua DPW	GORONTALO	
72	ZAINUL ALIM M. NGIU, SH	Pengurus DPW		
73	ABD. RASID SALIM, ST., M.Si., IP	Pengurus DPW		
74	SOLAHUDDIN, SH., MH	Ketua DPC Kab. Bogor	JABAR	
75	IIP SYARIPUDIN, SH	Pengurus DPW		Omisah
76	DIANSYAH PUTRA, S.Kom	Penguru DPW		
77	Saeiful	Ketua DPW	DKI Jakarta	
78	Safiril Partang, SH.,MH	Sekretaris DPW		
79	Seprayogi, SH	Pengurus DPW		
80	Baim, S.Sos	Ketua DPW	KALTARA	
81	Merlin Edward Keyko Aldrin, SH	Pengurus DPW		
82	Suardi	Pengurus DPW		
83	Zulkarnain Muslim Asrialdo	Ketua DPW	PAPUA	
84	Bambang Papuadi	Anggota PBB		
85	Erwin Wenda	Anggota PBB		
86	HERMAN LATABE,SH	Anggota DPW	SULTENG	
87	Muh. Nugrah	Anggota DPW		
88	DENY RISMAWAN	Pengurus DPW		
89	Ir.Armansah.MM	Ketua DPW PBB SUMSEL	SUMSEL	
90	Muhamad ahsan SH,	Ketua LABH BB Sumsel		
91	ERWAN, SH	Kabid Humas & Antar Lembaga		Caesar Sophan Aditya, SH

92	Irfan Nauval El Hassan	Sekretaris DPW	NTT	
93	Gregorius Welly Agung Poy	Pengurus DPW		
94	Gregorius Matrecano	Pengurus DPW		
95	Ahmad Loji	Ketua DPW	Papua Barat Daya	
96	Nurmala	Pengurus DPW		
97	Nur Laila Maelan	Pengurus DPW		
98	M. AFIAT HARIPAI	Ketua DPW	SULBAR	
99	YUSRIL MARICAR	Pengurus DPW		
100	HAMSYAH HAMING	Pengurus DPW		MUHAMMAD NAMRI
101	Mochlas Akhsanu Murti,S.H	Pengurus DPW	DIY	
102	Indah Febri Sonia	Pengurus DPW		
103	Azrul Saleh Rumata	Pengurus		
104	Tahir, S.Sos.	Sekretaris DPW	SULSEL	
105	Abdulla, ST	Pengurus DPW		
106	Arman Muis, ST	Pengurus DPW		
107	NOVEL YENIAPUT WETAPO,SE	Ketua DPW	Papua Pegunungan	
108	IRYAMAN,ST	Pengurus DPW		KAYAFAR WANDIKBO
109	SAYUK WINARNO DHANU DHIHARDJO	Pengurus DPW		HOCHAMAD AMIN HERU SUSANTO
110	Yulius Nur, S.P	Ketua DPW PBB Provinsi Jambi	JAMBI	
111	Basuki, S.Hi, MH	Ketua LABH PBB Provinsi Jambi		
112	Muhammad Arfah, S.H	Sekretaris LABH PBB Provinsi Jambi		
113	Mus'taan	Ketua DPW	KALBAR	
114	Bambang sudiono SH	Pengurus DPW		
115	Mar'ie SH	Pengurus DPW		
116	Alfian Trebggana, SH.MH	Pengurus DPW	BALI	
117	Imran Harahap, SH	Pengurus LABH DPW		
118	Muhammad Abu Amas, SH	Pengurus LABH DPW		
119	H. M. Subhan, Lc,M.H	Sekretaris DPW	KALSEL	
120	Poppy Rezki Adiatma, SH.MH	Ketua LABH DPW		
121	Aspihani, SH.MH	KABid Advokasi dan LABH BB		
122	Era Marzuki, SH	Ketua LABH Kab. Serang	BANTEN	
123	Aditiawarman Azwir, SH	Ketua LABH DCP Kota Tangerang		
124	Juhdi	Ketua Pemuda Bulan Bintang		
125	Mohammad Isa Liti;oly, S.Sos.I	Ketua DPW	MALUKU	
126	Asrul Bin Usman, S.IP	Sekretaris DPW		
127	Yani Hakim, SH	Ketua LABH DPW		
128	M.Judhi Irawan	Anggota PBB	LAMPUNG	Samsabastian SH
129	Erianto Mantriko	Anggota PBB		Sukandi MPDi
130	Putri	Anggota PBB		Kiagus Firmansyah SH
131	Albir Abdi	Anggota PBB	Papua Tengah	Fransiskus Magai
132	Cut putri	Anggota PBB		Yustinus Butu
133	Hazairin	Anggota PBB		Yahuda Edowai
134	Fajrin Nasution, SH..	Anggota PBB	Papua Selatan	Albir Abdi
135	Rita Sahagia	Anggota PBB		Sri Mulyana
136	Harsuryana Dahlina Lubis	Anggota PBB		
137	ZALDI HERIWAN	Ketua DPW PBB Prov. Sumatera Barat	SUMBAR	
138	MEDI AFRIZAL	Sekretaris DPW PBB Prov. Sumatera Barat		
139	MUHAMMAD IQBAL	Sekretaris BAPPILU DPW PBB Prov. Sumatera Barat		

140	Yudi Hardiansyah, S.H.	Pengurus DPW	JATIM	
141	Sumartono, S.H.,M.H.	Pengurus DPW		Amirul Haidaruddin, S.H.
142	Nurul Fajar Rozyqin, S.H.	Pengurus DPW		
143	Januari Mariane	Ketua DPW	SULUT	Azhar, SE
144	Neneg Iceu Candrawati	Sekretaris DPW		Rahmat Tambuwun
145	Yusniar Cecilia	Pengurus DPW		Mansur Tanor
146	Irfan Febrianto	Anggota PBB	SULTRA	
147	Faridha Syufiantini	Anggota PBB		Yudi Setiawan
148	Dian puspasari	Anggota PBB		Yusniar Cecilia
149	Muhamad Rizqi Zulkarnaen	Anggota PBB	Papua Barat	Neneg Iceu Candrawati
150	Ragil	Anggota PBB		

**DAFTAR PESERTA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI BULAN BINTANG**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	Pendidikan
1	Juardi Ardiansah, S.E., M.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S2
2	Nyimas Nining Rachman,	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
3	Adv DIANSYAH PUTRA, S	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
4	Ajat Sudrajat	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	SMA
5	Rusli, S.Sos.I	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S1
6	Sukandi, M.Pd.	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	S2
7	Alfian Trenggana, S.H., M	Laki-laki	DPW Bali	BALI	S2
8	Kiagus Ahmad Basuni Firr	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	S1
9	Mirza Kamal, S.H., M.E.	Laki-laki	DPW Aceh	-	S2
10	Muhammad Fakhrol Azm	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S1
11	Samsabastian, S.H.	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	S1
12	Abu Anas, S.H.	Laki-laki	DPW Bali	BALI	S1
13	Susi Rahayu, S.H.	Perempuan	DPW Kalimantan Timur	KALIMANTAN	S1
14	Imran Harahap, S.H.	Laki-laki	DPW Bali	BALI	S1
15	Deny Boy, S.P., S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Timur	KALIMANTAN	S1
16	Nurul Fajar Rozyqin, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1
17	Safril Partang, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2
18	Muhammad Idris, S.H., M	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UT	S2
19	Drs. H. Awaluddin Sibara	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UT	S2
20	Revani Dina Fitra, S.E., S.H	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
21	Aminuddin, S.E., S.H., M.I	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UT	S2
22	ERON NORMANDIA BACH	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	DIII
23	MAHDI PANA	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	SMA
24	Poppy Rezki Adiatma, S.H	Laki-laki	DPW Kalimantan Selatan	KALIMANTAN	S2
25	Aspihani, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Selatan	KALIMANTAN	S2
26	Saiful Sabit Assidik, S.H.I.	Laki-laki	DPW Kalimantan Selatan	KALIMANTAN	S1
27	Era Marzuki, S.H.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S1
28	H. Kasbiransyah, S.E.I.	Laki-laki	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELIT	S1
29	Supriyadi, S.H.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGA	S1
30	Yoga Pranata, A.Md.	Laki-laki	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELIT	DIII
31	Boris Dianjaya, S.H.	Laki-laki	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELIT	S1
32	Yulius Nur, S.P.	Laki-laki	DPW Jambi	JAMBI	S1
33	Muhammad Arfah, S.H.	Laki-laki	DPW Jambi	JAMBI	S1
34	Muhammad Mir Purnama	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
35	ADVOKAT SOLAHUDDIN,	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
36	Basuki, S.H.I.	Laki-laki	DPW Jambi	JAMBI	S1
37	Dr. H. Nur Raihan, M.A.	-	DPP	D.K.I. JAKARTA	-
38	Susanto, S.Kom., M.M.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
39	Omisah, S.Pd.I.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
40	Farlaini, S.Sos.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
41	Arifa Mutiara	Perempuan	DPW Kalimantan Tengah	KALIMANTAN	SMA
42	Afifa Resti Pradita, S.Pd.	Perempuan	DPW Kalimantan Tengah	KALIMANTAN	S1
43	Eti Yuliati, S.Pd.I.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
44	Nur Afifah, S.Pd.	Perempuan	DPW Kalimantan Tengah	KALIMANTAN	-
45	Muhamad Ahsan, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SE	S1

46	Tahir, S.Sos.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SEL	S1
47	Arman Muis, S.T.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SEL	S1
48	Ir. Armansah, M.M.	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SE	S2
49	Diah Sutarsih, S.I.Kom.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
50	Abdullah, S.T.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SEL	S1
51	Caesar Sophan Aditya, S.I	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SE	S1
52	Nurmala	Perempuan	DPW Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	SMA
53	Yessi Yuga Puspita, S.E.	Perempuan	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SE	S1
54	Pengkuh Ragil Nugroho	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
55	Albir Abdi, S.H., CLA.	Laki-laki	DPW Papua Selatan	JAMBI	S1
56	Triana Widya Wijayanti, S	Perempuan	DPP	JAWA BARAT	S2
57	Diah Yudiastuti	Perempuan	DPP	JAWA BARAT	SMA
58	Sri Mulyana	Perempuan	DPW Kalimantan Barat	KALIMANTAN	SMA
59	Evi Pratiwi Handayani, S.S	Perempuan	DPP	JAWA BARAT	S1
60	Lis Purwanti, S.Sos.	Perempuan	DPP	JAWA BARAT	S1
61	Fathurian Ramadhan, S.H	Laki-laki	DPW Maluku Utara	JAWA BARAT	S1
62	Joki Mardison, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Riau	RIAU	S2
63	Ahmad Loji, S.Pd.I.	Laki-laki	DPW Partai Bulan Bintang Pro	PAPUA BARAT	S1
64	Arni Dasrianti, A.Md.	Perempuan	DPP PARTAI BULAN BINTANG	JAWA BARAT	DIII
65	Aris Maryani, S.H.	Perempuan	DPP	BANTEN	S1
66	H. Yanuar Amnur, S.Sos.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S1
67	M. Heikal Akmal, S.H., M.	Laki-laki	DPW Riau	RIAU	S2
68	H. Hasan Basri, S.Ag., S.H	Laki-laki	DPW Riau	RIAU	S2
69	Lebrata, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Kepulauan Riau	KEPULAUAN R	S2
70	Asrul Bin Usman, S.IP.	Laki-laki	DPW Maluku	MALUKU	S1
71	GATOT PRIADI, S.H., M.H	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
72	Faiz Alkautsar	Laki-laki	DPP	BANTEN	SMA
73	Mohammad Fauzie Dianj	Laki-laki	DPP	BANTEN	S1
74	Zaldi Heriwan, S.Ag.	Laki-laki	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BA	S1
75	Neneng Iceu Candrawati	Perempuan	DPW Papua Barat	-	SMA
76	YUSRIL MARICAR, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BAR	S1
77	Adv. Dr. Soesanto Gunaw	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S3
78	Januari Marianie	Perempuan	DPW Papua Selatan	JAWA BARAT	SMA
79	Yusniar Cecilia	Perempuan	DPW Sulawesi Tenggara	D.K.I. JAKARTA	SMA
80	Harsuyana Dahlina Lubis,	Perempuan	DPW Papua Selatan	-	S1
81	Doriangat Pakpahan	Perempuan	DPP	JAWA BARAT	S1
82	Irfan Febrianto	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	DIII
83	Hamidah Yacoub, B.A.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
84	Siti Dermawan Situmorar	Perempuan	DPP	JAWA BARAT	S1
85	MUHAMMAD NAMRI	Laki-laki	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BAR	SMA
86	M. AFIAT HARIPAI, S.P., S	Laki-laki	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BAR	S1
87	Gregorius Welly Agung P	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGA	S1
88	Gregorius Matrecano, S.I	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGA	S1
89	Yani Hakim, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Maluku	MALUKU	S2
90	Mohammad Isa Litololy, S	Laki-laki	DPW Maluku	MALUKU	S1
91	DENY RISMAWAN	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TEN	SMA
92	Azrul Saleh Rumata	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	SMA
93	Ir. Syaifudin	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
94	Irfan Nauval El Hassan, S.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGA	S2
95	MUHAMMAD IQBAL, S.H	Laki-laki	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BA	S1

96	Moh. Nugrah, S.E.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TEN	-
97	HERMAN LATABE, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tengah	SULAWESI TEN	S1
98	Azhar, S.E.	Laki-laki	DPW Sulawesi Utara	SULAWESI UTA	S1
99	Khairani, A.Md.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	DIII
100	Ir. Achmad Bagulu, S.T., I	Laki-laki	DPW Gorontalo	GORONTALO	S1
101	ZAINUL ALIM M. NGIU, S.	Laki-laki	DPW Gorontalo	GORONTALO	S1
102	ABD. RASID SALIM, S.T., M	Laki-laki	DPW Gorontalo	GORONTALO	S2
103	Yudi Setiawan	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	SMA
104	Ratna Juita Yakoeb, S.Ag.	Perempuan	DPP	JAWA BARAT	S1
105	Rita Sahagia, S.E.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
106	NS. Aji Martono, S.H.I., C.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
107	Muhammad Fajrin, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
108	Muhammad Riano Pertar	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
109	Zulkarnain Muslim Asrial	Laki-laki	DPW Papua	PAPUA	SMA
110	NOVEL YENIAPUT WETAP	Laki-laki	DPW Papua Pegunungan	PAPUA PEGUN	S1
111	Bambang Papuadi	Laki-laki	DPW Papua	PAPUA	SMA
112	Erwin Wenda, S.H.	Laki-laki	DPW Papua	PAPUA	S1
113	Agus Salim	Laki-laki	DPW Kepulauan Riau	KEPULAUAN R	DIII
114	Andi Putra, S.H.	Laki-laki	DPW Kepulauan Riau	KEPULAUAN R	S1
115	Saeful	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	-	-
116	Seprayogi Linel, S.H., M.H	Laki-laki	DPW DKI JAKARTA	BANTEN	S2
117	Bambang Sudiono, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Barat	KALIMANTAN	S1
118	Mar'ie, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Barat	KALIMANTAN	S1
119	Padil, S.S., S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGA	S2
120	Drs. Jamali, S.H., M.Pd.	-	DPW Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGA	-
121	Firmansyah, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	-	S2
122	Hilman Indra	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
123	R Lina Kurniasari	Perempuan	DPP	JAWA BARAT	S1
124	M. IQBAL SUMARLAN PU	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
125	DEGA KAUTSAR PRADAN	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
126	EKO PRAYITNO	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	SMA
127	MEDI AFRIZAL, ,S.H.I.	Laki-laki	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BA	S1
128	Muhammad Ramdhani, S	Laki-laki	DPP	LAMPUNG	S1
129	Yanuar Syarif	Laki-laki	DPW lampung	LAMPUNG	S1
130	Iis Rosmeria	Perempuan	DPP	JAWA BARAT	S1
131	Muhammad Syaifulloh, S	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
132	Nathalis Hisage	Laki-laki	DPW Papua Pegunungan	PAPUA PEGUN	SMA
133	Edy Abraham Sukmadi, S.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S1

LAPORAN KEUANGAN
Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi Partai Bulan Bintang
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Achmad Djabid dkk	Biaya Perjalanan Dinas Peserta	Rp 483,144,000
2	Wiryanto dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narasumber	Rp 19,411,535
3	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp 2,500,000
4	Heri dkk	Honor Instruktur Senam	Rp 800,000
5	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 44,816,250
6	CV Pandora	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 123,740,000
7	Koperasi Konstitusi	Biaya Pengadaan Seminar Kit	Rp 58,464,345
8	Honor Narsum		Rp 8,500,000
9	Rangga Fotocopy	Biaya Penggandaan Bahan	Rp 396,000
TOTAL			Rp 741,772,130